DEWI "DEE" LESTARI

Menulis Itu Seperti Para Darwis

ISSN 0215-076X

SUSAH TIDUR?

Kami punya obatnya.

Ya, kami memang punya resep manjur untuk anda yang susah tidur: Baca BALAIRUNG di atas pembaringan Anda!

Setelah melahap isinya, Anda akan mudah tertidur.
Bisa jadi karena buaian kata-kata 'sok ilmiah'.
(diksi berbuih-buih --terkadang-- juga bisa memuakkan)
Atau juga karena dekapan gagasan-gagasan yang 'sok orisinal'.
Namun banyak pula yang telah membuktikan:
BALAIRUNG bisa mengantar mereka terlelap dalam mimpi indah.
Mimpi yang mengudar banyak gagasan.
Mimpi yang memberi harapan baru:
Esok pagi, Indonesia menjadi (sedikit) lebih baik.

SUSAH TIDUR BISA DISEBABKAN GANGGUAN FISIK MAUPUN PSIKIS. BILA KELUHAN TERUS BERLANJUT, HUBUNGI ROHANIWAN TERDEKAT.

Cover:
Terbang Bersama Kenangan
L. Rizki "Kinoy" Rahman

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

BALAIRUNG

balairung.org

❐**Penerbit:** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM-UGM) ❐**Izin Penerbitan Khusus:** SK Menpen RI No. 1039/ DIRJEN PPG/STT/1986; SK Rektor UGM No. UGM/82/7798/ UM/01/37 Tgl. 14 Desember 1985; ISSN: 0215-076X ❐**Pelindung:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. (Rektor UGM) ❐**Penasihat:** Ir. Bambang Kartika (PR III UGM); Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri; Amir Effendi Siregar, M.A.; Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❐**Pemimpin Umum:** Hs. Bachtiar ❐**Sekretaris Umum:** Nurhidayati ❐**Bendahara Umum:** Fitria Agustina ❐**Pemimpin Redaksi:** Darmanto ❐**Sekretaris Redaksi:** Ririn Tri Astuti ❐**Redaktur Eksekutif:** Monica Eviandaru, Luqman Hakim Arifin, M. Bustom ❐**Redaktur Pelaksana:** Ajar Abdillah Edi, Maesita Maharani ❐**Reporter:** Sugi Siswiyanti, Nurul Aini, Dede Syarif, Annas Abdul Ghofur, Anni Zunaidah, Ferdinandus Setu, N. Budi Baskoro, M. Iqbal Aji Daryono, Zaenal Afifuddin, Tarli, Fauzul Muhammad, Indradya S.P., M. Thowaf Z., Nanik Supriyanti, Imam Karyadi Aryanto, Raisnain Ali, Samsul Maarif ❐**Redaktur Bahasa:** Veronica Kusuma, Mahfud Ikhwan ❐**Direktur Perusahaan:** Erwin Susanto ❐**Sekretaris Perusahaan:** Reny Indrawati ❐**Kabag Sirkulasi:** Agung Marhaenis ❐**Kabag Promosi:** Shiza Taufa ❐**Kabag Iklan:** Yudo Baskoro ❐**Staf Perusahaan:** Dwi Fachriani Astuti, Jatu Arum Sari, Ronggo Ahmadio, Solichin Afandi, Annisa Galih Aristi, Kholis Syafroni, Peni Lestari, Prima Laksimitasari, Primakrisna T., Riky Ferdianto, M. Roma, Anna Fardiana, Widhi Budhiartati, Fika Ariani Utami, M. Ardiansyah ❐**Kepala Litbang:** Bekti Dwi Andari ❐**Staf Litbang:** Iwan Achmad Ambiya, Sofyan Rosyidi, Asriah Nurdini, Rony Wijaya ❐**Kepala Produksi:** Lalu Rizki Rahman ❐**Staf Produksi:** Dave Ardian Seta, Adi Baskoro, Titik Puji Lestari, Efendi, Pratama Febrian ❐**Fotografer:** Fajar Rizqi, Ika Rahmawati Hilal, Triwina Wahyudi ❐**Koordinator On-line:** Dian Fikriani ❐**Staf On-line:** Ita Mutiara Dewi, M. Abdur Rouf, Sayid Munawar, Hary Mulyana, Zaki Ahmad Fitrianto ❐**Rekening:** Tahapan BCA Yogyakarta No. 0371.882.153 (a.n. Fitria Agustina) ❐**Alamat Redaksi/Perusahaan:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281; Telp. 0274-901703, Faks. 0274- 566171, E-mail: balairung.ugm@eudoramail.com ❐**Situs:** www.balairung.org

SCRIPTA MANENT!

Dari manakah kuasa Eropa bermula? Orang mengira dari kegairahan yang meletup-letup setelah pembekapan khazanah ilmu pengetahuan oleh doktrin gereja pada era kegelapan (*dark age*). Lantas dari manakah nafsu untuk menjelajah sains itu muncul? Apakah langsung begitu adanya—seperti katak yang lahir dari kolam—sebagaimana diimani Aristoteles? Tentu saja tidak.

Muasal pencerahan Eropa, tak sekadar lahir dari hiruk-pikuk pertanyaan Immanuel Kant, "*Was heiss aufklarung?*", tahun 1784 di Berlin. Atau, dari kegetiran hidup Galileo yang diinkuisisi dan dikafirkan oleh gereja. Tentunya, Copernicus tak dengan sendirinya mencetuskan paradigma *helio sentris*-nya dari langit kosong. Rene Descartes tak bisa tiba-tiba mencetuskan postulat *cogito ergo sum*-nya tanpa sebab.

Para penggagas pencerahan itu mesti berterima kasih kepada rahib-rahib di biara ordo Santo Benedictus—yang penuh dengan labirin perpustakaan. Hampir seluruh hidup mereka diabdikan untuk menyalin naskah-naskah kuno menjadi buku. Para rahib ini mentranskrip khazanah peradaban Islam, Persia, Yunani, serta belahan dunia lain, lantas menerjemahkan dalam bahasa ibunya. Tugas utama mereka adalah mencari naskah dan mentransfer ilmu ke tradisi Eropa.[1]

Bagaimana mereka berjasa? Kekhawatiran terbesar para rahib yang kebanyakan hidup di dataran tinggi Skotlandia ini, menurut James J. O'Donnel dalam buku terkenalnya, *Avatars of The World, From Papyrus to Cyberspace* (1998), kehilangan tradisi penulisan Makanya, tradisi menulis manuskrip merupakan makanan bagi darah daging kehidupan mereka. Menulis, bagi para rahib itu, adalah kerja jiwa yang sama baktinya dengan mencintai tuhan.

Bahkan salah seorang kepala ordo Benedictus yang menulis buku *De Laude Scriptorum* (1492), Trithemius menulis, "Tak ada kerja aktif yang lebih baik bagi biarawan caritas selain tetap berjaga semalaman menyalin naskah-naskah ilahiah.". Etos kerja para biarawan yang *nggetih* mencintai tulisan, bagi Trithemius, akan memberikan empat kemanfaatan. Rutuk Trithemius lagi:

> "Biarawan yang mencurahkan waktunya untuk menulis akan mendapat empat manfaat: pemanfaatan waktu yang berharga: pemahaman menjadi tercerahkan bersama dengan menulis: jiwanya terbentuk kobaran pengabdian: dan pahala yang mulia yang diterima setelah kematian."[2]

Mereka, dengan semangat-semangat yang tak kunjung dirundung putus, mengembara ke Negeri Timur Jauh. Sambil berziarah, mengumpulkan naskah, menyalin dan menerbitkannya. akhirnya warisan pengetahuan itu terselamatkan dengan rapi. Kelak, transkrip naskah—yang telah menjadi buku—itulah yang ditelan oleh filosof dan ilmuwan Eropa masa pencerahan untuk menandai suatu era: Modernitas Eropa!

Tulisan para rahib itu, bersamaan dengan ditemukannya risalah Guttenberg, melatari dan memberi andil bagi pembentukan fondasi gagasan besar tentang zaman modern: ilmu pengetahuan, nasionalisme, rasionalisme, sekularisme, dan segenap turunannya. Bagaimana mereka—kaum Kaukasoid itu—mengembangkan ide dan menyebarluaskan kesadaran untuk meninggalkan "masa lalu tanpa surat wasiat"?

Ben Anderson mengungkapkan, peradaban baru tersebut terbangun melalui kapitalisme cetak.[3] Kapitalisme cetak, persisnya: teknologi cetak massal, memberi efek demokratisasi bacaan. Dengan demikian, pengetahuan bisa dinikmati siapa saja. Betapa kaum Protestan, pada waktu itu, bisa membongkar kemapanan politik Santo Katolik di Roma dengan mencetak sendiri pahamnya.

Hadirnya pemajalan budaya cetak-tulis memberi ruang bagi pergulatan ide-ide dan isu politik, ekonomi, ataupun kegairahan berfantasi mengenai dunia baru. Bahkan, kesadaran hidup berbangsa, sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan, misalnya—masih kata Ben, dimulai dari kesamaan kosakata, bahasa, harapan-harapan, impian yang tersebar melalui kumpulan ide yang disatukan dalam buku.

Dengan bantuan risalah Guttenberg, ide gampang merembes kemana-mana. Dengan buku, penemuan-penemuan terbaru, kemajuan-kemajuan bisa dirayakan secara luas dan murah. Dengan kata lain, kebudayaan modern terbangun, terbentuk, dan berkembang di atas tirisan-tirisan huruf yang disatukan dan dicetak masal.[4]

Telaah terhadap tradisi tulis di atas mungkin tampak keterlaluan. Premis-premis itu, mungkin terlalu berlebihan. Mungkin juga karena iri dan kagum. Tapi, ada contoh lain. Jepang, lewat Restorasi Meiji, bisa seperti sekarang ini, lahir dari persetubuhan dengan tradisi modernisme Eropa. Persetubuhan itu, tak lain, dimediasi oleh buku. Hampir segenap pengetahuan Eropa—dari ilmu bedah, anatomi, taksonomi sampai filosofi—disalin, diterjemahkan, dan dinikmati sebagai kelaziman bagi warga Jepang.

Tapi kita bukanlah Eropa. Juga, bukan Jepang. Kita

bukan anak sah modernisme. Kita tak bisa mengenali sejarah di luar pengalaman yang kita bangun sendiri. Kita juga tak mengimani era modern sebagai yang lebih baik. Kita tak kuasa menolak semangat-semangat pengembaraan idenya dan penjelajahan gagasannya—yang senjata utamanya adalah buku.

Jika kita menuntut untuk menyebarluaskan ide, masihkah efektif dengan kentongan dan balai desa, serta khotbah-khotbah? Tanpa menyadarinya, kita terlalu lama terendam dalam kebudayaan oral dan asyik masyuk dalam keberlisanan. Pengetahuan yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut, kerap kali, luntur oleh lupa dan sakit kepala. Bukankah lisan hanya meneruskan kearifan-kearifan yang terbatas?[5]

Untuk mencegah lunturnya ingatan, manusia mengabadikannya dengan papyrus, lontar dan prasasti. Sebab, dengan menulis dalam buku, pengetahuan tak bisa hilang (*scripta manent*). Melalui buku, pengetahuan disimpan, disistematisasikan, diawetkan, dibaca, dan akan melahirkan tanggapan. Dengan demikian, prasyarat adanya transfer wacana yang lebih rapi, terstruktur, dan mengilhami akan didapatkan.

Tapi, masalahnya bukan mana yang baik atau buruk—antara tradisi lisan dan tradisi tulis. Bukankah keduanya menyimpan kekhawatiran masing-masing? Mungkin hanya takhayul bila banyaknya buku, secara kilat, mempercepat pencerdasan suatu bangsa. Akan sangat ceroboh jika kepintaran suatu kebudayaan hanya semata-mata diukur dari jumlah buku yang beredar.[6] Tapi akan kelihatan sangat dungu juga bila kita masih mengagungkan budaya lisan dengan citra yang romantik.

Yang pasti, barangkali utama, melalui tulisan, semua memori disimpan—dan karena itu dingat. Tulisan, dengan demikian, adalah sarana untuk melawan kekuasaan yang sangat menakutkan: lupa.

Mengapa buku menjadi penting dan utama dalam Jurnal BALAIRUNG kali ini? Sudah terlalu sering kita mencerna pendapat mengenai pentingnya buku. Buku, di zaman mutakhir, adalah sebentuk materialisasi tulisan. Ia adalah wadah utama—setidaknya sampai saat ini—proses menulis, membaca, dan menyebarkan pengetahuan. Sebuah kebenaran diungkapkan, dikritik, ditolak, diperbaharui, dibalas dengan kebenaran lain melalui buku.

Ignas Kleden mencatat,[7] buku adalah sebuah produk kebudayaan. Kekuatan buku sebenarnya terletak pada rahim kebudayaan yang menghidupinya. Buku dapat dipandang sebagai sebuah produk budaya, tingkah laku budaya, dan terutama sebagai proses produksi budaya. Kehadiran buku, tak pelak, adalah cerminan masyarakat. Kalau bukunya bagus, kemungkinan masyarakat berkualitas, lebih mungkin.

Buku adalah gema dari suatu zaman—yang bisa ditafsirkan selebar mungkin pada zaman yang berbeda. Buku adalah kodifikasi pikiran, pengalaman, perasaan, dan kegelisahan. Atau, kegembiraan manusia pada suatu kurun. Tapi, ia tak hanya sebagai artefak budaya yang beku dan mati. Buku bisa lebih mengawetkan pelbagai ingatan dan memori. Buku kadangkala, memberi watak revolusionernya terhadap perubahan. Tapi ia juga bisa menjadi racun bagi pikiran.

Buku, mestilah disini, berkait berkelindan dengan tradisi membaca. Ia, senyatanya, bisa memberi landasan terstruktur untuk pembelajaran lateral, rapi, sistematis. Ia juga bisa jadi penyimpan masa lalu. Sejarah, dengan demikian, tak hanya berdasar desas-desus. Ia bisa dinikmati siapa saja. Tidak hanya mereka yang mendapat wahyu atas nama mukjizat. Asal bisa baca, semua akses pengetahuan atas dunia bisa dinikmati, melalui buku.

Karlina Leksono menilai, buku adalah medium pengayaan eksistensial.[8] Proses membaca dan menulis buku, bagi ahli kosmologi dan filsafat ini, sejatinya akan mendorong pembentukan rohani yang kaya warna. Keduanya adalah pembentuk masa depan. Buku menyebabkan pembacanya "bernyanyi-sunyi" dalam ruang yang sangat privat, sendirian. Dan itu tak kita temui dalam kebudayaan yang hanya mengandalkan uap liur dan desas-desus.

Buku memfasilitasi orang untuk menarik diri dalam kegaduhan. Pembaca buku akan dapat reflektif, kritis, dan memelihara suaka dari sekeliling. Ini mungkin mirip dengan ide Boris Pasternak : kebenaran tidak diketemukan dalam keramaian gerombolan. Sebagai pembaca buku, seseorang adalah subjek yang menerjemahkan, meresepsi dan menafsirkan makna secara aktif.

Sayang, watak menguntungkan dan energi besar buku belum sepenuhnya disadari banyak pihak di Indonesia. Dari tahun ke tahun, produksi buku kita tak beranjak. Buku, sebagai kekuatan budaya yang mampu menggerakkan perubahan kurang diperhatikan. Dhaniel Dhakidae mencatat, jumlah judul buku baru yang diterbitkan hanya 0,0009% pertahun, sangat jauh bila dibanding dengan rata-rata negara berkembang 55 judul perpenduduk (0,0055%). Prosentase produksi buku kita pun jauh dari harapan. Tahun 1995, hanya sekira 4.000 judul buku baru diproduksi. Bandingkan dengan Jepang yang mencetak 48.053 judul.[9] Itu baru jumlah judul. Belum jumlah oplah buku.

Tak heran jika indeks *Book Production Consumption* (BPC) Indonesia paling rendah di antara negara berkembang. Kita hanya mencatat 0,144%, sementara negara seperti Filipina, BPC-nya 0,286%. Dan, akan semakin jauh dengan BPC negara maju yang 0,35%.[10] Kadangkala yang agak menipu, jumlah buku yang diproduksi di Indonesia kebanyakan buku-buku proyek pemerintah. Khususnya buku pelajaran yang isinya bersifat memuji-muji penguasa dan sepenuhnya berisi fakta-fakta gelap pendukung rezim lalim.

Bahkan, tanpa sadar kita memiliki ketakutan—yang

sama sekali tak beralasan—terhadap buku yang di luar paham. Seperti dicatat Stanley, sejak 1965—1996, secara resmi buku yang diberangus mencapai 2000 judul. Kadang ketakutan terhadap paham lain yang ditulis pada buku menyebabkan kita marah lantas membakarnya. Juga, kualitas buku kita menurut Edward Kimman, "Di luar karya terjemahan dan adaptasi yang tidak sah...hanya sekira 30—35% (dari buku terbitan Indonesia) yang orisinal."[11]

Tampaknya, buku belum jadi bagian integral sistem nilai budaya. Barangkali masih menjadi unsur asing. Tapi jangan keburu pesimis dulu. Kami lihat sekarang, unit produksi budaya di Indonesia—meski pelan-pelan—sedang beranjak. Tiap hari, kalau kita rajin ke toko buku, kita akan mendapati nama penerbitan buku baru. Seringkali nama itu ganjil dan aneh. Juga kita sering melihat banyak sekali penulis baru lahir, tiap bulannya.

Setelah mengalami zaman gelap empat dekade terakhir, kegairahan terhadap penjelajahan gagasan dan ide kian membesar. Ketakutan terhadap buku kritis, nakal, dan bersemangat memberontak sudah terlampaui. Kini, analog dengan zaman gelap Eropa, Indonesia—tepatnya gagasan tentang Indonesia—sedang menapak pencerahanya. Diaspora penerbitan buku pasca Mei 1998 membawa nuansa tersendiri bagi geliat khazanah intelektualitas—sebuah modal membangun narasi bangsa yang lebih sehat dan teduh.

Suasana dunia penerbitan Indonesia sepanjang sejarahnya tak pernah sewarna-warni sekarang. Banyak tema ditawarkan, banyak ide bergulat, banyak kesadaran subversif ditarungkan. Dengan demikian, transfer pengetahuan, penjelajahan gagasan, bisa lebih beraneka. Dan, yang lebih penting, banyak perdebatan tak meruap di udara serta-merta. Banyak perbincangan--dari diskusi, seminar, pidato-pidato kunci--dibakukan, ditulis, dipelajari, dan jadi bahan renungan.

Kalau angka resmi jumlah penerbit di Indonesia tahun 1997 hanya 518, saat ini pastinya jauh membengkak. Jumlah buku yang dicetak massal pun melambung. Di Yogya saja, paling sedikit ada 114 penerbit, 4.230 judul buku baru terbit dengan oplah tak kurang dari 6.480.000 buah sepanjang setahun terakhir.[12] Bandingkan dengan rata-rata judul buku nasional yang terbit tahun 1996: cuma 8.299.

Kadang-kadang dengan sedikit ngawur dan nekat, banyak penerbit, menerbitkan buku dengan judul yang panas dan membikin tersentak. Agaknya dengan modal yang penting terbit, membuat gambaran manis kuantitas penerbitan buku di Indonesia belum sepenuhnya dibarengi dengan meningkatnya kualitas. Masih banyak buku diterjemahkan dengan kacau, editing tak rapi, penilepan royalti penulis, *mark-up* jumlah halaman dan jenis huruf, dan pelbagai masalah lain yang tak akan selesai dikupas dalam satu buku sendiri.

Ada banyak problematika yang kalau kita kuliti dengan teliti, penerbitan buku di Indonesia masih jauh dari harapan. Tapi, itu tak mengapa. Dipandang dari segi produksi budaya, kata Ignas Kleden lagi, semakin banyak buku ditulis semakin mudah proses belajar berlangsung. Buku yang telah tercetak semuanya bermanfaat. Apakah buku itu ditulis dengan baik atau dengan buruk, dengan penuh kejujuran atau kebohongan, tetap saja berguna. Buku yang baik adalah baik dan bermanfaat. Sebuah buku yang jelek adalah jelek dan bermanfaat, karena kedua jenis buku itu, atas caranya masing-masing, tetap dapat mendorong proses produksi budaya.

> "Seburuk apapun sebuah buku, ia tetap berguna bagi pembacanya, paling tidak untuk merangsang semangat bahwa suatu saat si pembaca akan membuat yang lebih baik."[13]

Industri cetak huruf di lingkungan kita yang kini mulai tumbuh kembang bisa dipandang—meminjam istilah Pierre Bordeu—sebagai modal budaya. Ia bisa menjadi modal untuk membiakkan tradisi berpikir lurus, menukik, paripurna kita yang kembang kempis. Bisa membentangkan budaya membaca yang kian hari kian mencemaskan. (Serangan citra dan kesementaraan melalui TV diam-diam sudah membunuh waktu baca kita, ternyata!).

Hadirnya penerbitan-penerbitan baru, meski cenderung nekat, bisa menyembulkan harapan adanya *enterpreneurship* (pembaharuan) sosial. Para penerbit baru tersebut bisa menjadi kekuatan reformatif. Dengan modal yang cekak dan pengetahuan tentang pasar yang minimal, mereka terus mendesakkan gagasan mengenai harapan-harapan masyarakat yang sehat. Kalaupun terjadi praktek-praktek kotor terhadap penulis, pengecer dan konsumen, kami kira itu adalah bagian yang wajar dari proses.

Tak adil kita terlalu cepat berharap penerbitan di Indonesia langsung bagus. Bukankah proses menuju penerbitan yang sehat, rapi, dan bagus secara manajerial tidak dalam waktu dua tahun? Kita hampir-hampir tak pernah punya pengalaman yang cukup untuk melahirkan penerbit yang berwawasan kebudayaan. Seburuk apapun penerbitan kita, pantas didukung dan dikompori. Ia, sekali lagi adalah modal sosial, yagn teramat mahal bila diabaikan. Dengan selalu mengkritik dan memberitahu pentingnya peran mereka dalam etos sosial, bisa jadi penerbitan akan menuju titik optimalnya.

Bersemangatnya para usahawan buku, terutama yang kami ketahui di Yogyakarta, sayangnya tak diimbangi dengan adanya kajian yang menyeluruh mengenai jalinan bisnis ini. Padahal pilar penting proses belajar mengajar di Indonesia misalnya masih tergantung dengan buku. Institusi pendidikan kita akan berhasil menjadi salah satu pilar budaya yang sukses

kalau buku-buku yang menunjangnya juga cerdas dan mendidik.

Berangkat dari pembacaan mengenai minimnya data perbukuan, kami mengangkat tema rona pebukuan di Indonesia. Kami memandang, maraknya penerbitan adalah bagian dari "*renaissance*" Indonesia. Seperti kemajuan Eropa yang datang dari para rahib Benedictus yang bekerja keras menyalin naskah dan menerbitkan buku, "modernisme" Indonesia, bisa saja datang dari kegigihan para pengusaha buku. Melalui buku, rasa berbangsa sebagai komuntias yang dibayangkan, transfer ilmu pengetahuan, dan transgresi wacana terus berlangsung.

Dalam jurnal kali ini, kami tak sekadar mengundang penulis luar untuk mengalirkan gagasannya mengenai buku. Edisi ini juga kami lengkapi dengan riset redaksi tentang perbukuan di Yogyakarta. Selain itu pula, kami tampilkan *polling* pola konsumsi buku mahasiswa. Pilihan riset redaksi ini kami tempuh untuk menggalakkan iklim penelitian yang, agaknya, mulai melemah dalam etos persma.

Menggarap jurnal BALAIRUNG kali ini memberikan banyak pengalaman. Terutama, betapa susahnya mencari mahasiswa yang punya gagasan panjang dan napas yang tak pendek dalam menulis. Kami juga mengaku sulit meyakinkan penulis, pentingnya sebuah kertas kerja yang bermutu, berlandaskan penelitian lapangan. Agar kita bisa mendapat data yang jernih menyegarkan, baru, dan tak banyak menelan asumsi. Tetapi begitulah, kami mengakui benar-benar kesulitan.

Beberapa kenalan kami yang kami anggap mumpuni—misalnya, ia kerap menulis di media massa—dan kami ajak kerjasama menulis jurnal, ternyata banyak menyerah di tengah jalan. (Kami mengontak 30-an mahasiswa. Sementara naskah yang tuntas-selesai masuk ke meja redaksi cuma 8!!!). Padahal kami sudah murah hati memundurkan tenggat. Tentunya, kami tak hendak menyalahkan siapa-siapa. Memang seperti itulah realitas iklim intelektualitas mahasiswa kita. Kering, mandeg, miskin, manja, jalan di tempat dalam ihwal pemikiran dan penulisan.

Akan tetapi, jurnal ini harus berdamai dengan kondisi. Meski sebetik harapan yang kami tanam gagal bersemai, kami boleh berharap-harap di masa mendatang, jurnal kami akan diminati banyak mahasiswa. Bukankah, kata Bertolt Brecht, "memulai sesuatu dengan baru meski jelek akan lebih berharga dan mulia daripada mengawali langkah dengan sesuatu yang lama meskipun bagus." Jurnal ini juga kami anggap sebagai undangan BALAIRUNG kepada mahasiswa di segenap tanah air untuk turut peran dalam jurnal BALAIRUNG selanjutnya.

Jurnal yang tengah Anda baca ini, mengambil semangat untuk tak tinggi hati. Jurnal kali ini tentu jauh dari ambisi untuk mengetengahkan wajah perbukuan Indonesia dengan data segar, lengkap, dan penuh pemetaan masalah—meski keinginan ke situ juga kami rawat dan pelihara. Hanya saja, jurnal BALAIRUNG kali ini sedikit berusaha mengetuk-ngetuk pintu bagi munculnya riset dan pembacaan yang lebih serius mengenai perbukuan Indonesia. Kami hanya ingin memberi rangsangan segar bagi penelitian yang lebih detail dan kompleks mengenai industri cetak huruf mutakhir Indonesia. Silakan membaca!❐

Darmanto

Catatan Akhir:

[1] Ketekunan mencari, mentranskrip, dan menuliskan naskah warisan dunia lama ke dalam bentuk baru—yang lebih rapi dan sistematis—oleh biarawan gereja Santo Benedictus ini terkenal dengan sebutan *Nomadic Tradition* dalam khazanah Eropa. Jasa luar biasa ini, secara memikat, disinggung Putut Widjarnarko dalam risalah pendeknya, "Senjakala Budaya Baca", dalam rubrik Bentara Budaya harian *Kompas*, 4 Mei 2001. Lihat pula Franz Magnis-Suseno, "Membukukan Manusia, Memanusiakan Buku", dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 23.

[2] Kutipan ini saya ambil sepenuhnya dari tulisan Putut Widjarnarko, *op. cit.*

[3] Simak Bennedict Anderson, *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spreed of Nationalism* (London: Verso, 1983).

[4] Peralihan suatu zaman menuju modern, setidaknya, menurut Daniel Lerner, ditandai oleh akses mereka terhadap tulisan—baik buku maupun koran. Asumsi mengenai korelasi positif antara proses modernisasi dan buku dari Daniel Lerner ini disitir dari uraian cemerlang Ignas Kleden, "Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik tentang Kebudayaan", dalam Alfons Taryadi (ed.), *Buku dalam Indonesia Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999). Lebih lengkap, lihat Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978).

[5] Dilema ini berujung pada masalah keberaksaraan (*literacy*) dan kelisanan (*orality*). Indonesia, yang lahir dari tradisi oral, memiliki kecenderungan solider. Tapi, tradisi itu tak cepat menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sempurna. Tradisi lisan akan memunculkan pikiran formulaik, sloganisme dan verbalisme ilmiah, serta sikap dependen. Sedangkan tradisi tulis akan membawa orang pada individualisasi, fragmentasi, dan alienasi. Lebih lengkapnya, lihat A. Teeuw, *Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994).

[6] Tesis ini diadaptasi dari seorang peneliti Sastra Indonesia berkebangsaan Belanda, Will Derks, "Pengarang Indonesia sebagai Tukang Cerita", dalam *Kalam*, No. 11/1998. Ia menuturkan, "...usaha untuk mengukur kemajuan Sastra Indonesia berdasarkan jumlah judul buku baru...merupakan usaha yang keliru."

[7] Ignas Kleden, *op. cit.*

[8] Karlina Leksono lebih jauh menulis, "...membaca dan menulis merupakan bagian yang memungkinkan perkembangan penalaran individual, pemikiran kritis independen, pembangkitan kepekaan terhadap kemanusiaan...". Untuk keterangan lengkap, periksa Karlina Leksono, "Membaca dan Menulis: Sebuah Pengalaman Eksistensial", dalam Alfons Taryadi, *op. cit.*

[9] Data ini saya ambil dari Dhaniel Dhakidae, "Ekonomi Politik Industri Buku di Indonesia", dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa*, *op. cit.*

[10] Lihat uraian Teddy Surianto, "Potret Distribusi Buku di Indonesia", dalam Alfons Taryadi, *op. cit.*

[11] Semua kutipan dari Stanley dan Edward Kimman dalam paragraf ini saya cuplik dari Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia* (Melbourne: Oxford University Press, 2000).

[12] Lihat riset redaksi BALAIRUNG dalam jurnal ini. Sebagai bahan perbandingan, menurut data statistik yang dikeluarkan UNESCO (1993), di Indonesia hanya 12 judul baru untuk tiap sejuta penduduk. Ini tentu jauh dengan kondisi sekarang. Di Yogya saja, tiap bulan satu penerbit bisa menerbitkan rata-rata tiga judul baru.

[13] Ignas Kleden, *op. cit.*

PERBUKUAN INDONESIA

TRANSLASI DAN TRANSGRESI*

Krishna Sen
Profesor Ilmu Komunikasi dan Direktur Pusat Kajian Kebudayaan dan Komunikasi, Universitas Murdoch, Australia

David T. Hill
Profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Murdoch, Australia

1. Pendahuluan

Kesusastraan Indonesia, umumnya dalam terjemahan, seringkali menjadi titik masuk bagi para pelajar luar negeri untuk mengkaji kebudayaan Indonesia. Tokoh-tokoh kesusastraan Indonesia seperti Pramoedya dan Rendra lebih terkenal di Australia, misalnya, ketimbang bintang film atau musisi Indonesia, meski bintang film dan musisi Indonesia lebih tenar di sini. Toh demikian, artikel ini tak akan membicarakan kesusastraan sebagai ruang estetika karya kreatif individual, tapi tentang industri penerbitan yang membawa hasil-hasil kerja "literer", dan beragam karya tulis lainnya, ke dalam pasar.

Melihat struktur industri dan sedikitnya jumlah pengarang, kami berpendapat bahwa dunia penerbitan buku telah menjadi lokus yang signifikan dalam globalisasi kebudayaan Indonesia selama Orde Baru (Orba). Argumen ini dielaborasi di sekitar tiga tema. Kami mulai dengan melihat peningkatan industri penerbitan komersial nasional yang berbasis di Jakarta yang—dalam gaya bisnis dan produknya—meningkat hingga berskala internasional (dan lintas-media) selama periode Orba. Pada bagian kedua bab ini, kami mengkaji penerbitan "kesusastraan"—novel-novel terbitan penerbit-penerbit besar, dan sastra yang berkembang semi-bawah-tanah tapi secara kultural dan politik berperan penting. Menurut kami, semasa Orba berkuasa keduanya (sastra-populer yang menjadi arus utama dan sastra-politik bawah tanah), dalam cara yang berbeda-beda dan kompleks, menyatu dengan ekonomi-politik dan kebudayaan global.

Pembahasan kami diperumit dengan ketegangan yang berlangsung terus-menerus tentang penentuan sastra, siapa dan bagaimana mendefinisikannya, dalam Orba. Bahkan, pengertian tentang sebuah "buku" tak selalu jelas. Banyak karya tulis yang diterbitkan di Indonesia—beberapa oleh intelektual-intelektual yang diakui dan dijual di toko-toko buku—tak memuat nomor ISBN (*International Standard Book Number*), yang dalam industri penerbitan internasional merupakan suatu persyaratan formal untuk semua buku.[1] Ada buku yang beredar yang tidak menyebutkan nama penerbit atau percetakannya di Indonesia.[2] Jadi, bagaimanakah seharusnya kami membuat batasan yang jelas tentang penerbitan Indonesia, ketika ada manuskrip berbahasa Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri oleh para emigran Indonesia?

Kami memfokuskan kajian ini pada buku-buku berbahasa Indonesia. Ini sesuai dengan definisi kami tentang media nasional, juga sebagian lebih karena jumlah penerbitan buku berbahasa daerah masih sangat sedikit. Meskipun masyarakat Jawa adalah suku mayoritas,[3] tapi ternyata buku yang diterbitkan dalam bahasa ini sangat sedikit, kalah dengan terbitan lain yang berbahasa suku minoritas.[4] Di satu sisi, dalam pembahasan kami tentang pola-pola penerbitan, tampak bahwa karya-karya Indonesia (karya tulis orisinal yang ditulis dalam bahasa Indonesia) juga masih minoritas dalam pasaran buku. Dan di sisi lainnya, sejumlah kecil namun penting dari apa yang disebut sebagai karya tulis Indonesia yang "orisinal"—sastra, yang populer maupun politis—disirkulasikan melalui usaha kecil, lokal, dan kadang-kadang semi-bawah-tanah.

2. Sejarah Awal, Isu-Isu yang Tetap Bertahan

Sejak awal penerbitan buku di Indonesia, usaha-usaha untuk meredam muatan etika, estetika, dan politik dalam karya-karya sastra yang disponsori oleh negara sama kuatnya dengan perlawanan terhadapnya. Penerbit Balai Pustaka (BP) didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1908 untuk "menciptakan bahasa Melayu yang baru dan modern, serta sastra yang modern dan mengandung kebaruan".[5] Menurut Maier, penerbitan milik pemerintah merupakan bagian dari proyek kolonial

Belanda untuk membentuk bahasa Indonesia (lebih tepatnya, dalam konteks sejarah, bahasa Melayu) dengan memisahkannya dari kondisi "heteroglosia" (suatu campuran antara bermacam bahasa lokal dengan bahasa-bahasa Eropa) yang melanda masyarakat Hindia kala itu.

Pada saat yang bersamaan, BP menghilangkan tema-tema nasionalis[6] dengan cara membentuk sebuah kesusastraan Indonesia yang disesuaikan dengan kemauan kaum elit pribumi—yang, kala itu, sedang menanjak. Proyek ini sukses dalam pengertian bahwa karya-karya unggulan dalam kesusastraan awal Indonesia, setidaknya pada paruh pertama abad ke-20, ditentukan semata-mata oleh para pengarang seperti Marah Rusli, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisjahbana, dan pengarang lain yang bukunya diterbitkan oleh BP. Tapi, baik sebelum maupun sesudah pendirian Balai Pustaka, suatu industri penerbitan yang tak resmi menerbitkan sejumlah besar apa yang disebut sebagai "bacaan liar"—teks-teks yang dianggap tak pantas dan di luar kontrol penguasa kolonial Belanda.[7]

Setelah Indonesia merdeka, BP resmi menjadi penerbitan milik pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri. Untuk bertahan selama krisis finansial pada 1960-an, BP dipaksa mencetak lagi novel-novel yang telah masyhur untuk diajarkan di sekolah. Usaha BP untuk mencari naskah-naskah baru terhalangi oleh politik yang terpolarisasi antara "kiri/kanan" waktu itu, juga kekacauan ekonomi. Sama seperti banyak lembaga sastra dan kebudayaan yang lain, BP telah "dibersihkan" dari golongan Kiri setelah Soeharto memegang kendali kekuasaan. BP tidak pernah dapat merebut kembali pangsa pasarnya sehingga penerbit komersial nasional segera mengambil alih perannya, dalam upaya menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi 1970-an dan sesudahnya.

Pada 1995, BP menghadapi masa depan yang tak menentu. BP mengalami gempuran akibat menurunnya pemasaran buku-buku sastra—yang merupakan komoditas utama BP—dan minimnya distribusi dan promosi. Pada 1996 BP juga mengalami privatisasi secara bertahap sebagaimana badan usaha milik negara (BUMN) yang lain. Selama Orba, penerbit komersial besar berikut kelebihan yang mereka punyai, juga penerbit semi-bawah-tanah yang kecil dan berskala lokal, menjadi jauh lebih kuat secara finansial dalam industri buku—sebagaimana dulu BP mendeterminasi dan meredam muatan-muatan estetis dan politis dalam karya-karya unggulan.

Dalam kajiannnya tentang kesusastraan Orba, Ariel Heryanto mencatat terjadinya penerusan upaya-upaya yang seringkali tak berhasil, sebagian dilakukan oleh negara, dan sebagian yang lain melalui simbol-simbol estetika oleh lembaga-lembaga budaya di Indonesia yang telah mapan secara historis, untuk "mendefinisikan sastra Indonesia dengan cara membedakannya dari apa yang bukan sastra Indonesia".[8] Menurut Heryanto, kesusastraan didefinisikan melalui pembedaaan antara empat kategori penerbitan:

1. apa yang diterima sebagai "kesusastraan luhur" oleh jurnal-jurnal sastra seperti *Horison* dan lembaga-lembaga kebudayaan yang disokong oleh pemerintah Orba;
2. apa yang dilarang oleh pemerintah dengan dasar pemikiran politik mereka, meskipun tak mengingkari "mutu sastra", seperti beberapa karya Rendra dan Pramoedya (dibicarakan kemudian dalam artikel ini);
3. apa yang divonis oleh kritikus sastra sebagai fiksi populer Indonesia, termasuk bentuk fiksi terpopuler di Indonesia, novel-novel populer dan komik;
4. apa yang dipisahkan dari kesusastraan Indonesia baik sebagai non-Indonesia (kesusastraan dalam bahasa daerah) atau sebagai non-sastra.

Mengikuti pandangan Heryanto, kami melihat bahwa politik rezim Orba menjelang keruntuhannya dan ekonomi politik penerbit terus mengikis batasan-batasan dalam mana kesusastraan Indonesia telah definisikan secara historis: batasan antara ke-Indonesia-an dan ke-asing-an, sastra dan non-sastra, antara "bacaan yang diizinkan" oleh Orba dan "bacaan liar". Ironisnya, pada dekade terakhir kekuasaan Orba, beberapa dari apa yang diklaim sebagai "sastra luhur" (seperti karya-karya Pramoedya) ternyata merupakan "bacaan liar" juga, dalam pengertian bahwa mereka berada di luar jalur industri penerbitan resmi dan melanggar peraturan negara yang mengatur isi dan sirkulasi buku.

3. Industri Penerbitan Buku Masa Orde Baru

Industri penerbitan buku di Indonesia kecil jika dilihat dari standar regional. Pada 1980-an di Indonesia diterbitkan 4.000—5.000 judul per tahun.[9] Pada 1992, angka itu meningkat menjadi 6.000, tapi di Indonesia produksi buku tetap lebih sedikit untuk tiap orang dalam masyarakat dibanding banyak negara tetangganya, seperti Korea Selatan dan Thailand, walaupun kedua negara ini memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit.[10] Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia pun tak memasukkan buku bacaan ke dalam data sosial-kebudayaannya, yang mengukur penggunaan semua media (radio, TV, koran, dan majalah) sama seperti olahraga dan partisipasi masyarakat.[11]

Dikategorikan sebagai "budaya" dan, karenanya,

berada di bawah wewenang Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, penerbitan buku kurang dikontrol oleh Orba dibanding film, TV, atau pers yang berada di bawah wewenang Departemen Penerangan. Tak ada izin khusus yang disyaratkan untuk buku terbitan, selain persyaratan normal untuk mendaftarkan perusahaan atau lembaga di bawah Departeman Industri dan Perdagangan. Bahkan, hambatan-hambatan bagi bekas tahanan politik untuk memiliki, menjalankan, atau tampil di TV, radio, dan film tak berlaku untuk penerbitan buku—penerbit buku Hasta Mitra, yang menerbitkan buku-buku Pramoedya, dimiliki dan dijalankan secara terang-terangan oleh mantan tahanan politik. Tak ada pula usaha untuk mengontrol industri penerbitan buku ini dengan cara memaksa para pelakunya menjadi anggota suatu asosiasi profesional yang dikontrol pemerintah. Keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) tak bersifat memaksa—baik PT Citra Lamtoro Gung Persada milik Tutut maupun Hasta Mitra (penerbit yang paling sering dilarang). Organisasi ini menunjukkan kelemahan politiknya, baik perannya sebagai perantara negara dalam industri perbukuan maupun sebagai wakil dari para anggotanya.

Juga tak seperti pers dan TV, penerbitan buku sebagai suatu industri secara umum tak dilirik oleh para kapitalis-kroni. Satu-satunya pengecualian adalah PT Citra Lamtoro Gung Persada yang didirikan oleh anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (lebih dikenal sebagai Mbak Tutut), yang menerbitkan otobiografi ayahnya.

Namun, kelemahan-kelemahan perangkat kontrol ini menyebabkan industri buku tumbuh pesat. Penerbit besar seperti Gramedia dibuat seperti "amuba": membelah diri dan membentuk sel-sel yang terus bertambah, masing-masing dalam spesialisasi dan fokusnya sendiri, dan berkompetisi meningkatkan pasarnya. Penerbit kecil berskala regional datang dan pergi. Sementara, kelompok-kelompok oposisi politik dapat mengedarkan secara diam-diam beragam wacana. Merajalelanya pembajakan buku menggambarkan lemahnya penegakan peraturan hak cipta tahun 1982 (UU Hak Cipta No. 6/1982, direvisi menjadi UU Hak Cipta No. 7/1987), yang diratifikasi setelah tekanan internasional.[12]

Menurut data IKAPI, pada awal 1990-an, setengah dari penerbit Indonesia ada di Jakarta, 42% di Jawa, kurang dari 6% di Sumatra, 0,5% di Bali, dan kurang dari 1% di Indonesia timur (Kalimantan sampai Irian Jaya).[13] Data ini mengindikasikan pola konsentrasi di ibukota, meski tak dapat disamaratakan untuk semua penerbit. Satu-satunya penerbit di wilayah Indonesia timur yang berskala nasional adalah Nusa Indah di Flores. Penerbit ini mengkhususkan terbitannya pada masalah-masalah kristiani dan pendidikan. Sebenarnya, tak ada penerbitan komersial yang menggunakan bahasa daerah, kecuali untuk buku-buku sekolah dan buku-buku keagamaan—yang jumlahnya sedikit. Di samping itu, buku-buku produksi luar Jawa dan Sumatra sangat sedikit yang beredar di ibukota atau kota-kota besar. Amat sulit untuk mendapatkan buku terbitan Irian Jaya, misalnya, di toko buku Jakarta dan Yogyakarta.

"....di Indonesia produksi buku tetap lebih sedikit untuk tiap orang dalam masyarakat dibanding banyak negara tetangganya, seperti Korea Selatan dan Thailand, walaupun kedua negara ini memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit."

3.1. Toko Buku Lokal: Yogyakarta

Beberapa ratus meter arah utara dari pertigaan Jalan Gejayan yang merupakan pertemuan antara kampus IKIP Yogyakarta, Sanata Dharma, dan Atmajaya, ada sebuah penerbitan dan toko buku kecil yaitu Social Agency. Bagian depan toko ini terbuka, dindingnya

TERCELUP. BASKORO

dipenuhi buku-buku, persediaan buku-buku diskon ditumpuk di lantai—memperlihatkan suasana toko buku kuno. Toko ini memajang pilihan buku yang sangat luas, mulai dari buku pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah sampai terbitan bermutu tinggi yang merekam kesenian Indonesia yang luhur. Semuanya ditempatkan di muka toko namun terkesan sesak. Yang patut diacungi jempol adalah perhatian para pengunjung yang lebih tertuju pada koleksi buku daripada umur buku yang bersangkutan. Berbeda dari kebiasaan "tawar-menawar" (sesuatu yang masih umum dilakukan di toko-toko dan warung-warung pinggir jalan tapi tak berlaku di toko-toko baru), Social Agency secara otomatis memberikan diskon untuk setiap buku, sedikitnya 10%, tanpa menunggu pembeli memintanya. Toko ini juga tak mengiklankan perihal diskon ini. Bahkan, selama enam bulan kami di Yogya, tak kami jumpai iklan tentang toko ini. Di bagian belakang toko, di belakang rak buku, terdapat satu pesawat telepon. Namun, toko ini tak punya mesin faksimili, *e-mail*, tak menerima pembayaran dengan kartu kredit, atau juga bahan-bahan promosi.

Pemilik toko buku Social Agency juga mendirikan sebuah perusahaan penerbitan kecil, Pustaka Pelajar, yang menerbitkan karya-karya menarik dari ilmuwan dan akademisi lokal Yogya (Jawa Tengah).[14] Buku-buku terbitan Pustaka Pelajar ini didistribusikan di Jakarta dan kota-kota di Jawa lainnya. Jangkauan perusahaan ini terbatas dan pangsa pasarnya pun kecil. Pustaka Pelajar hanyalah satu dari 27 penerbit di Yogya yang menjadi anggota IKAPI. Tapi, Pustaka Pelajar tak berpartisipasi dalam promosi buku yang diselenggarakan tiap tahun oleh IKAPI. Penerbit ini juga tak mencantumkan hasil terbitannya dalam daftar buku tahunan organisasi.[15] Pustaka Pelajar merupakan cerminan dari ratusan penerbit kecil lokal di seluruh Indonesia yang perjalanannya berliku-liku namun dapat tetap bertahan.

Sekitar satu atau dua kilometer dari Social Agency ke arah barat daya terdapat toko buku besar milik penerbit nasional, Gramedia cabang Yogya. Gramedia terletak di samping beberapa bank dan kantor serta mendominasi perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Cik Di Tiro. Dari area parkir bawah tanah, pengunjung berjalan naik menuju ruangan luas yang dipenuhi dengan gerai dan etalase yang memajang kaset, peralatan tulis, olahraga, dan kantor. Sebuah tangga ada di tengah ruangan, menghubungkan dengan lantai atas yang berisi

barang-barang pelancongan, barisan novel berbahasa Inggris, buku panduan perjalanan dan seni, serta buku-buku yang berhubungan dengan bisnis Gramedia lainnya. Sebuah papan promosi khusus di tangga menampilkan terbitan lokal terbaru, yang merupakan satu-satunya di toko itu. Lantas, deretan-deretan buku, *game* komputer, CD-ROM, dan majalah menjadikan Gramedia cabang Yogya ini tak banyak berbeda dengan cabang di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Surabaya.

3.2. Penerbit Nasional: Gramedia

Toko buku Gramedia di Yogya adalah satu di antara lebih dari 30 toko buku Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia. Toko yang pertama didirikan pada tahun 1970 di Jakarta. Pada 1980-an, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) tercatat sebagai penerbit terbesar di Indonesia. Dan pada 1995 KKG diperkirakan menjadi konglomerat terbesar ke-58 di Indonesia, dengan lebih dari 40 anak perusahaan.[16]

Selain menerbitkan harian *Kompas*, pada tahun 1973 Gramedia memulai usaha penerbitan buku dengan menerbitkan novel Marga T., *Karmila*, yang sebelumnya telah diserialkan di *Kompas* pula. Sebagai novel pertama yang menampilkan suatu gaya populer baru, *Karmila* amat menjanjikan karena selalu laris terjual. Selain itu, *Karmila* juga membuktikan pasar potensial bagi buku semacam ini, dan memulai suatu generasi baru penulis populer.[17] Pada 1980, unit penerbitan umum, PT Gramedia Pustaka Utama (GPU), didirikan dan pada 1995 sudah mampu memproduksi sekira 250 judul baru dalam setahun.[18]

Untuk menyatukan dan lebih menguatkan pengawasan terhadap pasar baru, didirikan Kelompok Penerbitan Buku dan Sarana Pendidikan (KPBSP Gramedia), yang menggabungkan GPU dengan dua unit penerbitan buku lainnya. Yang pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (atau Grasindo), yang didirikan pada 1990, mengkhususkan pada buku-buku pendidikan dan sekolah. Grasindo menjual lebih dari 10 juta kopi dalam empat tahun pertamanya, dan pada 1995 menerbitan lebih dari 20 judul baru tiap bulannya.

Namun, keuntungan gabungan yang diterima oleh kedua penerbitan ini masih kalah jika dibandingkan dengan unit penerbitan ketiga Gramedia, yaitu Elex Media Komputindo (EMK). EMK didirikan tahun 1985, mengkhususkan diri pada teknologi komputer dan barang-barang elektronik (termasuk CD-ROM), manajemen dan bisnis, serta komik anak-anak.[19] EMK meningkatkan judul buku terbitannya dari 231 pada 1991 menjadi 567 pada 1994. Pada 1996, EMK memiliki divisi penjualan sendiri untuk mempromosikan produk mereka, khususnya komik yang selalu laris, juga sebuah divisi peranti lunak/perkomputeran yang sedang berkembang.Selain itu, EMK juga membuat situs internet untuk penerbit Gramedia, yang merupakan satu dari empat situs milik penerbit-penerbit di Indonesia (April 1997). Pada akhir 1996, EMK mendirikan *internet service provider* (ISP) komersial: UniInternet. Buku-buku terbitan baru dipromosikan di situs Gramedia dan selalu diperbarui secara teratur. Akhir tahun 1998, Gramedia Bookstore On-line (KPG Bosol) menawarkan penjualan buku secara *on-line*.[20]

Konglomerasi penerbitan buku ini, sebagaimana penerbitan koran dan majalah, didukung dengan PT Percetakan Gramedia yang didirikan pada 1972. Melalui kantor pusatnya di Jakarta, Gramedia mampu mencapai angka sekira 20% dalam sirkulasi buku baru nasional. Dalam sebuah daftar penjualan buku-buku terlaris pada Desember 1995, Gramedia menerbitkan semua buku fiksi dan dua dari tujuh buku nonfiksi.

Di Yogya, toko buku Gramedia menjadi cabang konglomerasi nasional dalam penjualan buku secara eceran. Tak seperti Pustaka Pelajar dan Social Agency, Gramedia tak bergantung ataupun berhubungan dengan karya terbitan lokal. Walaupun sudah sukses dengan Marga T. dan penulis-penulis lain yang memiliki gaya dan tipe yang sama (seperti Ashadi Siregar, Yogyakarta), pada pertengahan 1990-an buku paling sukses KKG adalah terjemahan buku luar negeri, baik buku petunjuk bisnis Amerika atau komik kartun Jepang. KKG melakukan pula perjanjian dengan lebih dari 60 agen dan penerbit buku internasional.

4. Buku-Buku Terbitan

Daftar Buku IKAPI 1996 memuat 8.299 judul buku yang disusun alfabetis tapi kacau—selain kurang lengkap, kategorinya juga tidak tetap dari tahun ke tahun. Namun demikian, daftar ini mengindikasikan beberapa pola produksi dan pembelian buku. Kategori terbesar dari daftar itu adalah fiksi, termasuk buku fiksi anak sekolah, yang terdiri dari 868 judul. Hanya 32 judul merupakan novel sastra, 69 novel populer, dan 18 puisi, tapi 239 dikategorikan sebagai komik atau cerita bergambar. Jika semuanya ini memang dikategorikan sebagai "sastra", jumlahnya mencapai 1.226 judul atau 15% dari total judul yang ada. Sedangkan novel yang jelas-jelas dikategorikan sebagai sastra jumlahnya kurang dari 0,5%.

Kategori terbesar kedua adalah "Islam". Sama seperti banyak negara lainnya, buku-buku religius merupakan teks pertama yang dicetak di Hindia Belanda, dan menjadi sebuah ukuran penting dalam penerbitan buku di Indonesia.[21] Pada 1990-an, sekira 10% penerbit (anggota IKAPI)[22] menjadikan buku-

buku Islam sebagai produk utama mereka. Kebanyakan dari mereka adalah penerbit kecil yang berada di luar Jakarta, dan beberapa bahkan menjual buku seharga Rp600 (padahal harga koran nasional Rp700). Kebanyakan judul dalam kategori "Islam" yang ada dalam daftar IKAPI merupakan terjemahan dari teks Arab.

Kebanyakan kategori dalam daftar IKAPI 1996—sebagian ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan sosial, yang dirancang sebagai buku sekolah dan universitas—kadang tak memisahkan buku-buku terjemahan dengan yang aslinya. Dalam daftar tersebut, baik *Bhagavat Gita* (teks agama Hindhu) maupun buku *Total Quality Management* tak dianggap sebagai terjemahan. Berdasarkan data terakhir tahun 1970-an, Kimman memperkirakan, "Di luar karya terjemahan dan adaptasi yang tak sah…hanya sekira 30—35% (dari buku terbitan Indonesia) yang orisinal."[23] Maksud konsep "orisinalitas" ini, tentu saja, adalah karya yang sungguh-sungguh asli, terpisah antara adaptasi dengan yang aslinya. Tetapi, pada 1990-an, terjemahan berhasil menarik perhatian pasar yang cepat berkembang, seperti komik, fiksi populer, dan buku-buku perkomputeran.

Bagi penerbit terbesar di Indonesia, Gramedia, investasi terbaik dan penjualan produk tercepat dicapai dari buku-buku bertopik pengembangan-diri praktis, manajemen bisnis, masak-memasak, terjemahan roman asing populer, dan novel misteri karya pengarang yang telah dikenal akrab oleh pembaca di toko-toko buku Gramedia di Jakarta, seperti halnya di New York dan London. Mereka adalah Sidney Sheldon, Agatha Christie, Danielle Steel, Jackie Collins, dll.

Bahkan sebelum pendirian Balai Pustaka, buku-buku berbahasa asing telah dinikmati melalui penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Secara bisnis dirasa lebih murah untuk menerjemahkan buku yang terbukti laris di pasaran internasional daripada membayar royalti yang pantas untuk naskah asli yang ditulis oleh pengarang Indonesia. Pada awal 1990-an, tarif royalti pengarang antara satu hingga dua juta rupiah untuk sekira 3.000 eksemplar buku pada cetakan pertama. Gramedia seringkali menerbitkan buku-buku terjemahannya berdekatan waktunya dengan penerbitan buku aslinya. Jadi, semacam "menumpang" momen promosi internasional untuk buku baru tersebut ataupun ketenaran pengarangnya. Strategi yang lain, buku terjemahan itu sampulnya dibuat semirip mungkin dengan versi bahasa Inggrisnya, dan ini terbukti meningkatkan volume penjualan. Daftar buku-buku IKAPI pada tahun 1995 memuat tujuh karya fiksi terlaris yang kesemuanya diterbitkan oleh Gramedia; dua buku berasal dari Jepang, sisanya dari Amerika.

4.1. Komik Terjemahan

Komik Amerika tetap memegang posisi dominan, tapi sumber-sumber saduran komik mulai bervariasi sejak awal 1980-an. Yang pertama *Asterix*, komik Prancis, dan *Minim*, komik Meksiko. Keduanya diterbitkan pertama kali di koran *Sinar Harapan*, kemudian diterbitkan secara berseri oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan. Keduanya langsung menggoncang pasar komik Jakarta![24]

Komik Jepang mulai muncul di Indonesia pada awal 1990-an, di saat seluruh penerbit cuma menerbitkan komik Amerika.[25] Penerbit yang paling sering menerbitkan komik Jepang adalah Elex Media Komputindo (EMK). Dari 1.500 judul yang telah diterbitkan oleh EMK antara 1985—1994, 606 komik adalah komik anak-anak dan 90% berasal dari Jepang. Komik perintis yang terkenal adalah *Dragon Ball* (edisi pertama terbit tahun 1992), *Doraemon* (1992), dan *Sailor Moon* (Februari 1994). Masing-masing secara berurutan terjual sekira 40, 50, dan 65 ribu kopi pada 1995.[26]

Kepopuleran komik-komik tersebut tidaklah aneh. Di Malaysia dan Hongkong, setengah dari judul komik yang beredar di toko koran dan majalah merupakan terjemahan dari komik Jepang. Di Korea, negara yang melarang impor kartun Jepang, komik bajakan tumbuh subur.[27] Seri kartun animasi *Sailor Moon* telah dipopulerkan di 80 negara termasuk Indonesia, melalui gambar-gambar pada peralatan sekolah, stiker, peralatan mandi, alat kosmetik, bungkus permen, kain, pakaian jadi, tas sekolah, *CD*, *laptop*, dan banyak lagi.[28] Pencarian sepintas yang kami lakukan di internet, pada 200 situs tentang *Sailor Moon*, menunjukan fanatisme penggemarnya, satu di antaranya berada di *server* RADnet Indonesia. Sedangkan situs-situs lain—yang tak terhitung jumlahnya—sangat fanatik pada karakter pahlawan *Manga* lainnya (istilah Jepang untuk komik yang telah terkenal di seluruh penjuru dunia).

Sailor Moon dan komik Jepang lainnya yang diterbitkan oleh EMK dapat dibeli eceran, di dalam satu kotak kemasan atau dalam kemasan buku berikut kaset audionya. Agar karakter komik lebih dikenal di Indonesia, perusahaan penerbit *Manga* mengadakan persetujuan dengan empat dari lima televisi swasta di sini. Empat televisi swasta tersebut menayangkan acara kartun secara berseri pada jam tayang anak. Pemasaran *Manga* telah mendunia dan meliputi berbagai media.

Tingkat kekerasan dan seksualitas di beberapa karakter *Manga* merupakan masalah bagi distributor *Manga* di Asia Tenggara. Distributor dari Malaysia mengatakan, "Kami sangat selektif…. Sebagian besar

komik Jepang menampilkan banyak kekerasan."[29] Di Indonesia, teledrama dan komik impor sering menampilkan adegan kekerasan yang penuh lumuran darah, sehingga kekerasan bukanlah perhatian utama. Justru pornografi dan hal-hal yang berhubungan dengan seks harus disensor. Perbandingan antara *Manga* versi asli Jepang dengan versi Indonesia pada edisi pertama *Dragon Ball* menunjukan perbedaan pada macam dan besarnya penyensoran.[30] Payudara wanita, organ vital, dan bahkan pakaian dalam yang seharusnya tampak pada versi aslinya digambar ulang atau dihapus. Organ vital pria hanya dihapus sekali-sekali. Kadang kala seluruh halaman dihapus untuk "menyucikan" komik versi Indonesia dari hal-hal yang berhubungan dengan seks dan sadisme yang ada pada versi aslinya.

"Di luar karya terjemahan dan adaptasi yang tak sah...hanya sekira 30–35% (dari buku terbitan Indonesia) yang orisinal."

Pengadaptasian menurut selera nasional dan peraturan pemerintah tak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, boneka *Sailor Moon* diubah penampilannya agar dapat "lebih Kaukasian", tapi produk lainnya yang belum diubah tetap dapat diterima masyarakat luar Jepang tanpa hambatan. "Pesaing terberat kami adalah Disney," ucap direktur perusahaan pencipta *Manga* dan *Dragon Ball Z* (sambungan dari cerita *Dragon Ball*).[31] Penampilan *Manga* lebih mudah diterima secara global daripada karakter kartun yang bersifat kedaerahan, misalnya *Archie Andrews* dan bahkan tokoh petualang terbaik *Donald Duck*, juga kartun sejenisnya yang beredar di banyak negara pada 1950-an. Pengarang *Manga* (namanya diperlihatkan hanya pada bagian, belakang bukan pada sampul depan) mungkin terdengar asing, tapi karyanya dapat diterima dan beredar secara luas, mendunia. Tentu saja, asal-usul *Manga* disembunyikan sewaktu dipasarkan. Komik Jepang yang diterbitkan EMK seringkali beredar dengan judul berbahasa Inggris, misalnya *Little New York, Miss Modern, Take The "A" Train, Secret Five, Seven Magic, Apple Dream, Black Dance, Saint Roommate, Silent Scream, Sweet Love, Dark City*, dsb. Pada "Serial Cerita Dunia", novel wanita klasik Inggris, *Little Woman*, yang dikarang oleh Louisa May Alcott, muncul sebagai *Young Girls* karangan "Olcott" dan Yoko Kitajima. Di Indonesia novel ini beredar dalam versi komik.[32]

Beberapa orang memperdebatkan, mengapa pasar untuk komik lokal, cerita rakyat, dan epik merosot tajam dibanding komik luar negeri? Sebabnya, komik asli terlalu "menggurui", tak sesuai dengan pasaran anak muda.[33] Rupanya, perhitungan kasar menunjukkan, jumlah pembaca komik terjemahan jauh lebih banyak dibanding komik lokal.[34] Komik Indonesia biasanya diproduksi oleh penerbit kecil, pelaku pasar gelap, dan didistribusikan melalui kios dan loper. Ini berbeda dengan komik Jepang dan Amerika yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar dan didistribusikan oleh toko-toko buku besar.

Usaha untuk mengkreasi komik lokal dalam format baru yang sesuai dengan pasaran penerbitan, yang selama ini dihuni oleh komik asing, mulai dirintis. Novelis terkenal, Motinggo Busye, menerbitkan beberapa komik dengan penerbit Grafiti. Pada 1992, EMK menerbitkan satu serial komik lokal berjudul *Panji Koming* (oleh pengamat internasional dianggap mirip dengan tokoh komik *Asterix*, yang juga populer di Indonesia) yang pernah diterbitkan berseri oleh *Kompas*. Pada 1996, EMK meluncurkan serial *Panji Tengkorak*—berdasarkan cerita rakyat Jawa dan judul sinetron yang muncul

"Di luar karya terjemahan dan adaptasi yang tak sah...hanya sekitar 30—35% (dari buku terbitan Indonesia) yang orisinal."

pada tahun tersebut. Terlepas dari penerbit besar, pada pertengahan 1990-an sekumpulan mahasiswa dari Bandung menerbitkan komik bulanan berisi 24 halaman, judulnya *Kapten Bandung*, dicetak hitam-putih. Dari usaha lokal seperti ini, tetap tak ada yang sesukses komik terjemahan.

Kegagalan dalam menyesuaikan isi cerita bergaya Indonesia ke dalam format strip komik gaya internasional dapat sedikit terjawab oleh analisis Tim Lindsay. Penelitiannya tentang komik Indonesia yang berasal dari epik *Ramayana* versi Jawa (terbit tahun 1980). Lindsay berpendapat, kecanggihan dan keruwetan epik serta wayang *Ramayana* dihilangkan dalam usaha untuk menyesuaikannya dengan karakter Kapten Marvel dan Batman: "Komik *Ramayana* hanya bersifat menghibur sesaat, dan seiring perjalanan waktu serta perubahan masyarakat, komik *Ramayana* menunjukan penurunan makna bahkan sebagai sebuah hiburan sekalipun."[35] Pada sebuah pasar yang tak terlalu sensitif terhadap sumber, keaslian, dan kekhasan budaya, suatu komik—atau bahkan jenis lainnya yang mencari kesuksesan komersial—akan mampu menjadi "seberapa lokal"-kah?

4.2. Buku Fiksi Nasional

Antara tahun 1995—1996, GPU, divisi penerbitan Gramedia yang paling beragam jangkauannya, menerbitkan 46 buku kategori "fiksi untuk remaja dan anak-anak".[36] Hanya delapan judul buku yang dikarang oleh pengarang Indonesia, empat di antaranya adalah serial *Lupus*.

Muda dan agak nakal merupakan karakter khas dari aktor utama, Lupus, diciptakan oleh Hilman Hariwijaya. Serial Lupus pertama kali dipopulerkan di majalah mingguan anak muda terbitan KKG, *Hai*. Buku cerita *Lupus* mulai beredar di pasaran pada 1986. Tak mungkin menikmati cerita Lupus tanpa dibekali pengetahuan tentang bahasa Inggris dan simbol-simbol budaya populer yang mendunia: *"Read my stories, and you will* ngocol *forever"*, bunyi slogan di sebelah judulnya, *Interview With the Nyamuk*. *"National bestseller, sold over* 1.421.000 *copies"*,[37] demikian bunyi tulisan pada bagian bawah sampul buku itu. Pada bagian belakang terdapat sebuah foto pengarang beserta musisi berambut pirang pucat bertuliskan: *"Hilman with Nick*

TRANSLATOR. KELIK SUPRIYANTO
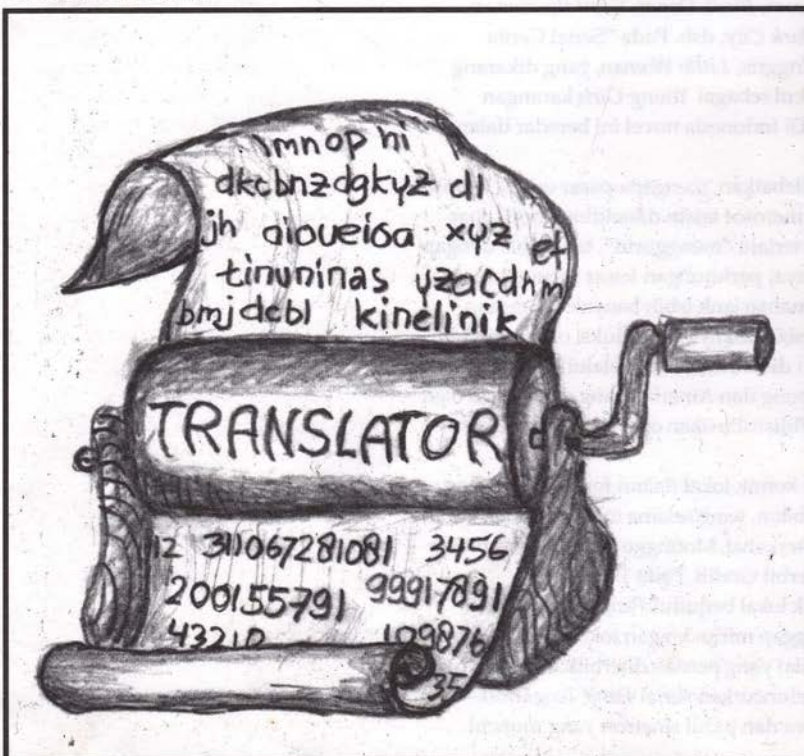
Rhodes (Duran Duran)". Selain alamat penerbit, terdapat dua kata Indonesia lain pada sampul depan buku tersebut, yaitu *ngocol* (bahasa slank, artinya "membual" atau "besar mulut") dan *nyamuk*. Penulisan tanda baca pada angka penjualan "1.421.000" mengikuti penulisan bahasa Indonesia karena menggunakan tanda titik, bukan koma. Pada bagian dalam terdapat apa yang disebutkan sebagai *bookography* (daftar buku yang pernah ditulis oleh pengarangnya).

Buku cerita *Lupus* menggunakan bahasa prokem yang berasal dari kaum muda urban, dan ditaburi istilah-istilah bahasa Inggris (*fashionable, catwalk, impossible, top-scorer*), juga menampilkan benda-benda bergengsi "internasional"sebagai wujud budaya konsumtif (sepatu Airwalk, *fettucini, pizza*, Black Forest, Toblerone, *walkman, skateboard, grunge*). Beberapa dari humor ini sangat tergantung pada permainan kata antara bahasa Inggris dan Indonesia: "*Ayam sorry, Ayam sorry, Mom! Gout lagi busy sekale!*" (hal.120). "*Ayam*" yang terdengar seperti "*I am*" dalam bahasa Inggris berarti 'ayam' dalam bahasa Indonesia atau '*chicken*' dalam bahasa Inggris. Nuansa humor ini mengelak dari penerjemahan ke dalam satu bahasa tertentu yang telah dibakukan.

Cerita *Lupus* bukanlah sesuatu yang unik dalam fiksi Indonesia dilihat dari cara pengolahan beragam bahasanya. Beberapa dari cerita fiksi Indonesia yang paling termasyhur pasca-1965 penuh dengan ungkapan bahasa Jawa. *Pengakuan Pariyem* (1981) karya Linus Suryadi menyertakan 40 halaman daftar istilah Jawa. Ternyata, penggunaan bahasa Inggris dengan gaya ABG (anak baru *gedhe*—anak remaja)[38] bukanlah hal baru. Karya kritis Yudhistira Ardi Nugraha, *Arjuna Mencari Cinta* (1977), yang berdasarkan humor dengan menggunakan nama-nama Jawa dan prokem Indonesia, dipenuhi dengan permainan kata dari bahasa Inggris dan Indonesia.

Hal baru dari serial *Lupus* adalah, pertama, penggunaan bahasa Inggris pada judul dan sampul, seperti pada halaman persembahan "*for forever friends...thanks buat kontribusinya*", dan judul bab dalam bahasa Inggris, yang membuat buku ini tak dapat dibedakan dengan fiksi terjemahan yang kini sedang marak bersaing. Kedua, sebagian besar penggunaan istilah-istilah dan tanda-tanda umum bahasa Inggris, seperti *fettucini* (salah satu jenis makanan Italia) dan *grunge* (salah satu aliran musik keras), tak mengimplikasikan suatu usaha penyadaran diri. Apalagi, kata-kata ini tak dapat dihindari (bagaimana seseorang menerjemahkan *grunge*?) karena mereka merupakan bagian dari lingkungan pergaulan dalam cerita fiksi itu, yang juga milik para pembacanya. Bahasa Inggris dalam serial *Lupus* merupakan bagian dari komunikasi masyarakat Indonesia pula.

Dalam cerita *Lupus*, si Lupus—seperti juga Hilman, penulisnya—bekerja di majalah populer untuk anak muda *Hai*. Ibunya menjual kue dan adiknya, Lulu, berpacaran dengan "Bule" (orang berkulit putih). Di situ tidak sepenuhnya jelas apakah si Bule sungguh-sungguh "bule" (orang asing berkulit putih), meski dalam sketsa-sketsa hitam-putih rambut si Bule berwarna putih. Dia kaya, seperti karakter-karakter yang lain, tapi ditipu oleh "nyamuk", nama panggilan untuk "si penghisap darah", yakni Lupus sendiri. "Kamar Lupus dipenuhi deretan karya terjemahan sedari John Grisham sampai cerita Donal Bebek.... Lupus sangat suka cerita-cerita detektif Sherlock Holmes" (hal.179). Dalam bagian-bagian yang lain, Lupus memamerkan pengetahuannya tentang buku Roald Dahl, Jules Feiffer, Katherine Paterson, dan masih banyak lagi, yang telah diterjemahkan oleh bibinya—seorang penulis yang sebenarnya pintar tapi hidup sebagai tukang penerjemah akibat "cerita karyanya sendiri (penulis lokal—Red.) tak laku" (hal. 152): kejadian yang memang sudah biasa dalam industri penerbitan, tempat Lupus bekerja kini.

Dapat dipastikan bahwa banyaknya simbol asing dalam *Lupus* dipengaruhi oleh cara pemasaran penerbit untuk membuat produk Indonesia tampak seperti barang dagangan luar negeri yang lebih populer. Lebih dari itu, buku-buku favorit *Lupus* diterbitkan oleh Gramedia yang juga menerbitkan semua karya fiksi Hilman. Tapi, bahasa dan gaya cerita Lupus sepertinya menghilangkan batas antara "dalam negeri" dan "luar negeri", "yang Indonesia" dan "yang asing". Pada salah satu kisah, Lupus bepergian ke Hongkong sama mudahnya dengan adiknya yang piknik ke Yogya. Dalam dua cerita yang terakhir, Lupus pergi ke Amerika Serikat, "negeri impian". Cerita bermula dari hal yang, tampaknya, merupakan kritik usang kaum nasionalis:

> Sepanjang hidupnya Lupus ingin melihat sendiri negara yang telah begitu sering ia lihat dalam film-film, yang menguasai perfilman Indonesia. Begitu kuatnya situasi ini sehingga membuat film-film lokal tergeser. Negara Clinton adalah pengekspor produk ini, karena di samping mengekspor film-filmnya, Amerika secara otomatis juga mengekspor gaya hidup Amerika kepada anak-anak muda di sini. Musik rap, metal, Levi's, Coca-Cola, Marlboro, pakaian dan aksesoris yang mencirikan orang Amerika, yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda di Indonesia (hal. 150).

Namun, kesadaran tentang "yang asing" melebur

pada akhir cerita dan pada akhir buku ketika objek-objek "yang Amerika" itu dinaturalisasikan, sebagai bagian dari gaya hidup anak-anak muda Jakarta. Pernyataan ini, kelihatannya, dipelajarinya dari wacana-wacana kaum nasionalis dari generasi yang lain, tak sesuai dengan gaya hidup Lupus. Ia muncul lebih sebagai pernyataan terhadap fakta ketimbang mempertanyakan kehadiran Amerika dalam kehidupan kaum muda Jakarta. Pada akhir cerita lawatannya ke Amerika, Lupus belajar tentang hidup dari temannya yang juga seorang Amerika, Bill, yang di sini juga dikatakan bahwa "hanya mereka yang sangat sukses menjadi kaya, sedangkan orang-orang seperti aku hanyalah orang biasa. Sebuah mobil pun aku tak punya" (hal.168). Lupus kembali dari sebuah perjalanan ke pegunungan dengan Bill, dan mendapatkan sebuah surat panjang dari teman-temannya di Jakarta tentang perjalanan mereka ke Yogya, sebagai akhir cerita *Nyamuk*.

Melintasi perbedaan umum, pembacaan kita terhadap *Lupus* sejajar dengan pembacaan Ben Anderson terhadap kartun-kartun politik Johny Hidajat pada awal Orba. Dengan membandingkan kartun-kartun karya Sibarani (pra-1965, sayap Kiri) dan Johny Hidayat (era 1970-an, populis), Anderson berpendapat, "Pembandingan dengan tanda-tanda dan simbol-simbol asing memperlihatkan Sibarani persis sebagai seorang 'nasionalis'—seorang yang melihat negara sebagai suatu *enterprise*... mendefenisikan apa itu nasional adalah suatu proyek yang rumit dalam penjajaran dan pemisahan antara 'yang asing' dengan 'yang pribumi'."[39]

Kartun Djon Domino karya Hidajat tak memuat kata-kata dan karakter asing. "Bagaimana seseorang menjelaskan tidak adanya orang-orang asing dalam kartun Hidajat, ketika Jakarta diisi dengan begitu banyak pengaruh dominasi mereka?" (hal. 192). Jawaban Anderson atas pertanyaannya sendiri mungkin kini dapat kita terapkan dalam pembacaan kita terhadap Lupus: "Pada dasarnya orang-orang asing tak membuat perbedaan. Memasukkan mereka ke dalam dunia kartun tak akan mengubah karakter mereka, tapi justru memperluas ruang geraknya.... Dalam karya-karya Hidajat, 'yang Amerika'...terbukti bukan apa-apa: mereka cuma percabangan lebih lanjut dari suatu 'keluarga' besar yang tak dikenali" (hal.192).

Metropolitan Jakarta, lingkungan tempat hidup Lupus dan fansnya, bahkan dipenuhi kata, objek, manusia, dan simbol yang datang dari luar Indonesia. Kita dapat melihat banyaknya elemen asing yang masuk ke Indonesia sebagai bagian dari globalisasi kebudayaan dan ekonomi, yang menghilangkan batas-batas kebangsaan. Namun, bahkan pada awal Orba, sedikitnya tampilan orang asing dalam kartun Djon Domino mungkin telah menunjukkan, sebagai mana pembacaan Anderson, suatu erosi atas batasan antara "yang Indonesia" dengan "yang asing". Lupus telah mewarisi dunia Domino, bukan Sibarani, di mana perbedaaan antara "kami" dan "mereka", atau "bahasa Indonesia" dengan "bahasa Barat" bersama simbol-simbolnya, adalah sesuatu yang penting. Penggunaan kata dan citra asing dalam Lupus tiada bedanya dengan tak digunakannya itu dalam kartun-kartun Domino: "pada dasarnya mereka tak benar-benar membuat perbedaan". Bule merupakan bagian dari keluarga besar Lupus, seperti teman Amerika-nya, Bill, dan "Bapak dan Ibu Green", teman bibinya yang pintar tadi. Di samping komentarnya tentang film-film Indonesia, Lupus tak akrab dengan buku, film, dan musik populer Indonesia. Dia menjadi ciri penjelas tentang Jakarta yang terglobalisasi pada 1990-an, dan suatu tanda naturalisasi kebudayaan.

5. Peraturan dan Pembatasan

Intervensi politik oleh negara Orba, transformasi ekonomi, dan tren transnasional terhadap globalisasi, semuanya memberikan andilnya bagi penjauhan radikal pemikiran Lupus dari ide-ide nasionalisme sayap Kiri pra-1965, yang diwakili oleh Sibarani. Kita sekarang melihat intervensi langsung oleh negara Orba untuk melenyapkan wacana-wacana tertentu. Tampaknya, tradisi kesusastraan sayap Kiri barangkali tak dihapuskan oleh aksi pembunuhan besar-besaran pada 1965—1966 berikut praktik-praktik penyensoran, dan kini dicontoh oleh suatu generasi baru sebagai bagian dari perlawanan mereka terhadap kekuasaan Orba.

Seperti telah dibahas di muka, Orba menghancurkan lembaga-lembaga politik dan kebudayaan milik kaum Kiri. Peraturan sensor digunakan untuk menghindari publikasi kritik-kritik langsung terhadap Orba, khususnya wacana-wacana yang diidentifikasikan sebagai Kiri karena isi ataupun afiliasi politik penulisnya. Sensor pemerintah terhadap buku, bagaimanapun, lebih tidak jelas dibanding politik sensornya terhadap media lain.

Pada 1996, diperkirakan 2.000 buku telah dilarang sejak 1965.[40] Pada tanggal 30 November 1965, dua bulan setelah peristiwa kudeta 1 Oktober yang menaikkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penguasa, 70 judul buku telah dilarang beredar di lembaga-lembaga pendidikan nasional oleh Kolonel K. Setiadi Kartohadikusumo, pejabat Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Ini diikuti dengan pembredelan terhadap semua karya 87 penulis yang terlibat PKI. Selama beberapa tahun kemudian, lembaga-lembaga pemerintah melanjutkan pembredelan itu, bahkan menghancurkan terbitan penulis dan lembaga-lembaga Kiri. "Tim Pengawasan

dan Penerapan Larangan terhadap Ajaran Komunis (Marxis-Lenis) dan Marxisme-Mao Tshe Tungisme" melarang kepemilikan, peredaran, atau penjualan di wilayah Jakarta terhadap 174 buku dan majalah, pada Maret 1967. Buku-buku tetap dilarang oleh Orba tapi dalam jumlah yang lebih kecil. Jika dihitung, pada tahun 1980-an rata-rata tiap tahun ada 14 buku yang dilarang.

Pada prinsipnya, suatu penerbitan dapat dibredel jika ia dianggap "mengganggu ketenteraman masyarakat", suatu definisi yang luas dan lentur.[41] Buku-buku juga dilarang jika dianggap porno—tak cuma majalah-majalah untuk orang dewasa, tapi buku-buku tentang pendidikan seks untuk anak-anak pula. Bagaimanapun, politik merupakan alasan yang paling sering digunakan untuk melakukan pembredelan. Tak pernah ada petunjuk khusus yang menjelaskan topik-topik apa yang tak diizinkan itu. Rupanya, pengalaman menunjukkan bahwa sesuatu dapat dilarang jika ia dianggap: (1) melawan ideologi Pancasila, UUD 1945, atau GBHN; (2) menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme-Komunisme; (3) mengancam stabilitas dan persatuan nasional; (4) merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional; (5) menyebarkan hal-hal yang dinilai cabul dan gambar-gambar porno; (6) antiagama atau dapat menekan agama-agama resmi di Indonesia; (7) mengganggu pelaksanaan "pembangunan" nasional; dan (8) mungkin memperburuk ketegangan antarsuku, agama, ras, dan kelompok sosial.

Pandangan-pandangan lain tentang PKI, yang meski cuma sedikit berbeda dengan penafsiran pemerintah, akan dilarang juga. Karya-karya semua penulis Kiri dari periode pra-1965, termasuk novelis Indonesia terkemuka, Pramoedya Ananta Toer, tetap dilarang beredar pada akhir Orba. Larangan ini menimpa pula pada sejumlah studi akademis tentang Orba yang diterbitkan di luar negeri.[42]

Wewenang pelarangan publikasi ada pada Kejaksaan Agung. Dengan hukum (berdasarkan pada UU 1963), penerbit diminta untuk menyetorkan beberapa kopi tiap terbitannya kepada Kejaksaan Agung, namun ini tak pernah dilaksanakan secara sistematis. Seperti halnya media cetak, tak ada mekanisme untuk mengetahui apakah suatu naskah layak dipublikasikan, tidak juga penerbit atau penulis diperingatkan bahwa suatu teks sedang diteliti, alih-alih mereka diberi kesempatan untuk membela diri sebelum atau sesudah pembredelan.

Pengamatan itu biasanya hanya dimulai jika suatu penerbitan, setelah dipublikasikan oleh pers, menarik perhatian banyak orang. Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Direktorat Politik Kejaksaan Agung (di bawah Jaksa Muda bagian Intelejen), menyelidiki judul-judul yang menarik perhatian mereka dan menyerahkan laporannya kepada sembilan anggota "*clearing house*".[43] Jika diputuskan dilarang, suatu teks harus ditarik dari pasaran, bahkan stoknya disita atau dihancurkan polisi. Kenyataannya, stok jarang disita atau dihancurkan karena munculnya desas-desus tentang pembredelan yang bakal terjadi malahan menguntungkan penjual buku: menaikkan angka penjualan buku, dan terjadi suatu ledakan buku di pasar gelap dalam bentuk fotokopian.

Bahkan setelah insiden 27 Juli 1996, rezim meningkatkan derajat represinya meski dengan sisa-sisa kekuasaannya yang terakhir. Larangan terhadap penerbitan buku jadi tak menentu. Contohnya, sebuah buku kecil karangan pemimpin sosialis, Soebadio Sastrosatomo, dilarang terbit pada Maret 1997. Tapi, sebuah naskah

Dapat dipastikan bahwa banyaknya simbol asing dalam Lupus dipengaruhi oleh cara pemasaran penerbit untuk membuat produk Indonesia tampak seperti barang dagangan luar negeri yang lebih populer.

yang mirip, termasuk sebuah pidato kontroversial oleh pemimpin PDI Perjuangan yang disingkirkan dari sistem, Megawati Soekarnoputri, serta sebuah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang peristiwa 27 Juli, disebar tanpa halangan di kereta api Jakarta-Bogor padahal kala itu Megawati sedang diinterograsi.

Jika suatu penerbitan dilarang secara resmi, tindakan tegas kadang-kadang (meski jarang) diambil untuk menghukum pengedarnya. Pada 1989, tiga aktivis Yogya didakwa melanggar hukum antisubversi karena menjual satu dari novel-novel Pramoedya yang dilarang; mereka menerima sanksi delapan tahun penjara.[44] Hasta Mitra, penerbit karya-karya Pramoedya dan juga miliknya, dengan daftar judul buku yang dibredel terpanjang, meski tidak tutup, hampir mengalami kebangkrutan karena hasil terbitan yang ditarik kembali dari pasaran oleh pemerintah tanpa diganti. Karena larangan ini, perdagangan buku gelap semakin aktif. Buku-buku seperti karya Pramoedya daerah sirkulasinya meluas. Novel-novel Pramoedya bahkan bisa dipesan melalui pos dan *e-mail* dari sebuah penerbitan alternatif di Malaysia, di mana novel-novelnya menjadi bahan bacaan di universitas.

DANY/ UKM SENIRUPA UGM

Bagaimanapun, yang lebih penting, seperti yang akan kami kemukakan dalam bagian berikutnya, politik kebudayaan Orba gagal dalam arti yang lebih umum. Definisi tentang bagaimanakah kesusastraan Indonesia yang "bagus" tak termuat dalam "politik kebudayaan resmi". Demikian pula, penghancuran dan penyensoran yang dilakukan pemerintah itu tak dapat menghapus, dari sejarah dan memori kita, semua praktik kesusastraan yang dulu diperbuat oleh sayap Kiri.

6. Kesusastraan

Telah dikatakan pada bagian awal, kesusastraan—seperti didefinisikan dalam wacana kalangan intelektual Indonesia—tak berperan penting dalam ekonomi-politik dunia penerbitan di Indonesia. Bagaimanapun, tak mungkin dihindari bahwa di Indonesia, seperti juga di negara-negara modern lainnya, sastra merupakan pusat definisi suatu kebudayaan nasional, sebagai suatu penampungan ide dan sejarah kecerdasan suatu bangsa yang ditranser dari generasi ke generasi. Kita akan mendiskusikan perjalanan karier dua orang penulis Indonesia, sebagai gejala dalam praktik

kebudayaan yang menentang ukuran-ukuran politik dan ekonomi yang diterapkan oleh negara Orba.

6.1. Pramoedya Ananta Toer

Pengkajian kesusastraan Indonesia sejak tahun 1960-an tak akan lengkap tanpa merujuk pada Pramoedya Ananta Toer. Novel-novel dan cerpen-cerpen karya Pramoedya diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Bagi banyak orang non-Indonesia, ini merupakan titik titik awal untuk memasuki kesusastraan Indonesia dan, tentulah, juga Indonesia. Dipenjara oleh setiap rezim politik di Indonesia—penjajahan Belanda, pemerintahan nasionalis Soekarno, lalu Orba—Pramoedya merupakan ikon perlawanan kesusastraan terhadap batas-batas yang dibuat oleh pemerintah. Dalam banyak wacana tentang dia sekira tahun 1990-an, kita dapat menggali perdebatan politis tentang kesusastraaan sejak periode pra-1965 hingga tren terbaru yang membuat semua ketegangan itu aktual lagi kini.[45]

Lahir di Jawa Tengah pada 1925, Pramoedya termasuk seorang elit dalam kelompok penulis terkemuka selama perang kemerdekaan (1945—1949), yang dijuluki sebagai Angkatan '45. Karya-karya awalnya diselundupkan keluar dari penjara Bukit Duri, Jakarta. Di sana dia ditahan oleh Belanda karena ikut dalam perlawanan antikolonial. Kemudian dia menghabiskan satu tahun dalam penahanan selama Soekarno berkuasa karena tulisannya yang menunjukkkan simpati terhadap orang Cina-Indonesia.[46] Karena bekerja di sebuah organisasi kebudayaan sayap Kiri, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang dilarang oleh Orba karena dianggap salah satu barisan komunis, dia ditangkap dalam operasi penangkapan massal pada Oktober 1965, dan selama 14 tahun dipenjara tanpa melalui proses pengadilan oleh pemerintahan Orba, termasuk selama 10 tahun di Pulau Buru. Setelah dibebaskan pada Desember 1979, dia menerbitkan tetralogi novel sejarah yang ditulisnya selama penahanan.

Keempat seri novelnya, yaitu *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*, mengungkap kebangkitan nasionalisme Indonesia pada dekade awal abad ke-20. Cerita ini dituturkannya secara lisan kepada teman-teman sepenahanan di Buru karena, kala itu, para tahanan belum diizinkan menulis suatu karangan. Setelah protes internasional terhadap perlakuan yang diterimanya, Pramoedya akhirnya diizinkan untuk mengarang dengan mesin ketik bekas milik tentara, asalkan kopian karbonnya disetorkan kepada penguasa penjara. Setelah diterbitkan oleh Hasta Mitra, buku-buku ini lantas diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tapi dilarang beredar di Indonesia. Karya-karya Pram dianggap mengandung ajaran-ajaran Marxis-Leninis yang terlarang. Namun, perdagangan gelap karya-karyanya tetap berlangsung, walaupun tiga aktivis di Yogya telah ditahan akibat mengedarkannya.

Pramoedya memenangkan "Fredom to Write Award" pada 1988 dari PEN's American Center, juga deretan penghargaan internasional lainnya. Desas-desus tentang namanya yang masuk dalam nominasi Nobel Kesusastraan menambah reputasinya. Pada Agustus 1996, Dewan Eksekutif UNESCO memberi penghargaan "The Madanjeet Singh Prize" kepada Pramoedya atas kepeduliannya pada isu-isu antikekerasan dan toleransi.[47] Pramoedya-lah satu-satunya penulis Indonesia yang karya-karya fiksinya banyak diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit internasional yang besar. Di seluruh dunia, perlakuan tak adil yang diterimanya dari pemerintahan Soeharto menghasilkan perhatian dan simpati.

Pada pesta ulang tahunnya yang ke-70, 6 Feberuari 1995, yang dihadiri oleh pers luar negeri dan kalangan sastrawan Jakarta, Pramoedya meluncurkan karyanya yang paling keras sampai saat ini: buku hariannya selama di penjara, berjudul *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (Jakarta: Lentera, 1995). Tak ada penerbit yang berani menerbitkannya sehingga dia terbitkan sendiri, menggunakan nama "Lentera", judul suplemen sastra di koran Kiri era 1960-an, *Bintang Timur*. Media-media umum tak berani melaporkan peristiwa itu, atau bahkan tentang bukunya. Sebuah stasiun TV swasta diperintahkan untuk membatalkan penyiaran berita itu pada program buletin berita sore, beberapa menit sebelum siaran yang telah dijadwalkan. Majalah semibawah-tanah *Independen* membandingkan bukunya dengan *Gulag Archipelago* karya Solzhenitsyn.

Pengumuman di Manila pada 19 Juli 1995 bahwa Pramoedya Ananta Toer menerima Anugerah Ramon Magsaysay 1995, suatu penghargaan paling bergensi di Asia untuk bidang-bidang jurnalisme, kesusastraan, dan kesenian, memicu perdebatan yang sangat tajam dan penuh gairah selama dua bulan di antara para cendekiawan di Jakarta. "Belum pernah, sejak tahun 1960-an, reaksi terhadap suatu peristiwa sastra berlangsung dengan intensitas setinggi itu. ...Sampai awal September 1995 tidak kurang dari 70 artikel, berita, transkrip wawancara radio, dan surat pernyataan yang beredar."[48]

Polemik Magsaysay itu menghidupkan kembali suasana ketegangan era 1960-an, ketika para penulis Indonesia dan pekerja-pekerja kebudayaan lainnya terpecah menjadi dua kubu: prokomunis-Lekra dan

oposisi sayap Kanan yang beragam. Dua puluh enam penulis dan intelektual, semuanya berumur di atas 50 tahun, menandatangani pernyataan yang menolak penganugerahan itu untuk Pramoedya. Seorang yang juga peraih Anugerah Magsaysay, wartawan dan sastrawan senior Mochtar Lubis, menyatakan akan mengembalikan anugerah itu sebagai tanda protesnya. Pada tanggal 9 September, seminar sehari bertema "Refleksi Kebudayaan" diselenggarakan di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) oleh Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jaringan Kerja Budaya (JKB), dan Jurnal Kebudayaan *Kalam*.[49] Semangat anti-Kiri yang dikobarkan lagi oleh generasi tua ditandingi dengan pembelaan yang bersemangat dari para intelektual yang lebih muda, sebagian dari luar Jakarta. Seorang kolumnis muda berkomentar di *Kompas*, 14 Agustus 1995, "Mereka yang terlahir setelah tahun 1965 dikejutkan oleh 'pernyataan para intelektual yang menolak Pramoedya dianugerahi Magsaysay'."

Sejak penerbitan *Bumi Manusia* pada 1980, Pramoedya telah menyedot kekaguman tersendiri bagi generasi terpelajar yang tumbuh dewasa setelah tahun 1965. Dengan momentum polemik Magsaysay ini, dukungan kian meluas dan terbuka, serta mengindikasikan suatu pemisahan yang jelas antara mereka yang membaca Pramoedya dalam kaca mata Perang Dingin yang ideologis dan kuna, dan mereka yang membanggakannya sebagai novelis Indonesia yang berkaliber dunia. Sebanyak 154 orang, terdiri atas mahasiswa (31, kelompok terbanyak), peneliti dan akademisi, wartawan, seniman, dan kalangan lain, menyebarkan statemen yang mendukung Pramoedya: "KAMI MENDUKUNG SEPENUHNYA penganugerahan Magsaysay untuk Pramoedya, sebuah penghargaan untuk seorang penulis, karya sastranya, dan masyarakatnya".

6.2. Wiji Thukul

Ada banyak lagi penulis-penulis yang, bahkan lebih muda, yang—seperti halnya Pramoedya—bekerja melawan kekangan rezim Orde Baru, di luar publikasi penerbit-penerbit nasional dan dengan tingkat integrasi kepada kultur ekonomi global yang masing-masingnya berbeda. Satu yang dikenal baik dari kelompok ini adalah penyair dan aktivis politik Wiji Thukul, seorang penandatangan pernyataan pro-Pramoedya di atas.

Dilahirkan di Solo pada tahun 1963, anak seorang tukang becak, Wiji Thukul memulai kariernya sebagai pengamen. Dia mendirikan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker) yang beraliansi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai terlarang yang dibredel oleh Orba setelah insiden 27 Juli 1996. Dia telah ditangkap, disiksa, dan menghabiskan waktu yang lama dalam persembunyian tatkala menghindari penangkapan oleh tentara.

Wiji Thukul telah menerbitkan puisi-puisisnya dalam berbagai koran regional, tapi tak pernah berhasil meraih ambisi awalnya agar puisi-puisinya diterbitkan *Horison*, majalah sastra terkemuka di Indonesia pasca-1966.[50] Kedua antologi puisinya yang pertama diterbitkan oleh Taman Budaya Surakarta, satu dari pusat-pusat kebudayaan yang dibiayai negara dan berdiri di ibukota provinsi dan kota-kota besar sejak tahun 1970-an. Antologinya yang ketiga, *Mencari Tanah Lapang*, diterbitkan di Belanda pada 1994 oleh Manus Amici, penerbit yang didirikan oleh para emigran Kiri untuk menerbitkan karya-karya Pramoedya. Pada tahun 1991, Wiji Thukul menerima the Wertheim Encouragement Award (mengambil nama pemimpin kelompok radikal Belanda, intelektual W.F. Wertheim). Dan pada 1994, tak lama setelah penerbitan *Mencari Tanah Lapang*, ia berkeliling ke berbagai kota di Australia, tampil dalam acara-acara pembacaan puisi di sejumlah universitas.

Buntut kerusuhan 27 Juli 1996, pemerintah Indonesia menyebarkan dugaan bahwa PRD, dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengannya seperti Jaker, adalah mirip dengan PKI dan ormas-ormasnya seperti Lekra. Persamaan ini sebenarnya tak patut dianalisis sebagai suatu konspirasi, seperti pandangan pemerintah, tapi seharusnya dimengerti dalam konteks kesusastraan dan perpolitikan. Ketika Wiji Thukul mulai menulis puisi pada 1980-an, ia beralih ke Sutardji Calzoum Bachri, sesepuh para penyair zaman Orde Baru, sebagai model, tapi lantas menolak puisi-puisi Sutardji karena dianggapnya terlalu esoteris.[51]

Ke manakah arah aliran politik dan model-model puisi Wiji Thukul kemudian? Apakah gaya, irama, struktur, diksi, dan imaji—bukan cuma muatan politik—puisi-puisinya mengangkat kembali tradisi lama yang ditindas sejak 1965? Penelitian untuk ini masih harus dilakukan. Tapi, tak ada keraguan bahwa karya-karya klasik oleh penulis-penulis Kiri Indonesia kembali ke ruang publik pada akhir 1980-an, setelah 30 tahun ditindas, dan mungkin telah menyediakan suatu alternatif baru bagi kesusastraan, yang telah secara luas terdepolitisasi selama Orba berkuasa.[52]

Setahun menjelang mundurnya Soeharto, sebuah buletin radikal di internet (3 April 1997) mengutip sebuah puisi yang amat masyhur, "Matinya Seorang Petani" (1995), karya Agam Wispi, penyair Kiri paling terkenal pra-1965 di Indonesia:[53]

> Mereka yang berkuasa
> tapi menindas rakyat
> harus turun dari tahta...
> Sebelum dipaksa!

Rupanya, sudah menjadi gejala umum dalam hubungan-hubungan literer antara kesusastraan radikal era 1960-an dengan era 1990-an yang sering dikutip oleh Wiji Thukul, pekik perjuangan PRD, mengikuti banyak karya yang lebih tua:[54]

> Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
> suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
> dituduh subversif dan mengganggu keamanan
> maka hanya ada satu kata: lawan!

Hubungan antara Wiji dan Pramoedya, antara Lekra dan Jaker, mungkin terpusat pada pemahaman kita tentang kesusastraan Indonesia sejak 1980-an. Namun, hubungan itu tak dapat dijelaskan secara gampang dengan apapun teori konspirasi yang simplistis, tidak juga dibatasi pada kemiripan antara lembaga-lembaga politik dan ekonomi tempat Wiji dan Pramoedya eksis dalam penerbitan di Indonesia dan luar negeri. Itu semua harus dilihat dalam hubungan antara tradisi kesusastraan Indonesia modern, yang telah mengalami penindasan politik selama lebih dari seperempat abad, dan dimunculkan kembali pada 1990-an oleh generasi baru yang tak puas dengan politik maupun puisi selama Orba.

Sejak awal penerbitan buku di Indonesia, usaha-usaha untuk meredam muatan etika, estetika, dan politik dalam karya-karya sastra yang disponsori oleh negara sama kuatnya dengan perlawanan terhadapnya.

7. Penutup

Kita telah membicarakan Lupus dan Wiji Thukul sebagai dua contoh kesusastraan yang dilahirkan Orba. Lupus adalah jenis sastra komersial-populer terbitan penerbit-penerbit komersial, yang lekat dengan transformasi ekonomi yang diraih selama Orde Baru. Wiji Thukul juga populer, dalam rasa yang berbeda, pada kelompok oposisi politik akar-rumput yang terbentuk akibat penindasan Orde Baru. Keduanya, bagaimanapun, menjadi mungkin dengan artikulasi kehidupan kultural masyarakat Indonesia dalam wacana-wacana yang terglobalisasi.

Teks *Lupus*, sebagaimana telah kami kesankan, tak dapat dipahami tanpa bekal pemahaman ikon-ikon global sebelumnya. Kita akan menyeberangi banyak teks yang mirip dalam media-media lain di Indonesia, yang telah menyesuaikan diri dengan penanda-penanda global untuk menawar wacana-wacana baru yang, secara lokal dan temporal, menunjuk secara spesifik pada Orba. Karya-karya Wiji, tak diragukan lagi, berakar dalam perjuangan lokal. Pada saat yang sama, kemampuannya, juga pada banyak orang lain yang melawan Orba, untuk melanjutkan perjuangan bergantung pada berbagai dukungan jaringan internasional.

Kesadaran politik yang kritis dalam karya-karya Wiji Thukul menandingi hiburan apolitis *Lupus* dan sejenisnya yang dangkal. Namun, sangat mungkin untuk menimbang bahwa banyak teks komersial telah dan sedang melakukan pelintasan batas politik dan kultural nasional yang coba dimapankan oleh Orba. Pada akhir masa rezim Orde Baru berkuasa, "sikap hidup komersial" tak perlu sejajar dengan "ketundukan politik".

Dalam era ketakteraturan pasca-Soeharto, ukuran-ukuran yang lain bagi kita untuk membedakan antara penerbitan "bawah-tanah oposisional" dan "populer-komersial" dapat saja muncul. Pajangan buku di toko buku Gramedia di Yogya, tampaknya, berubah setelah
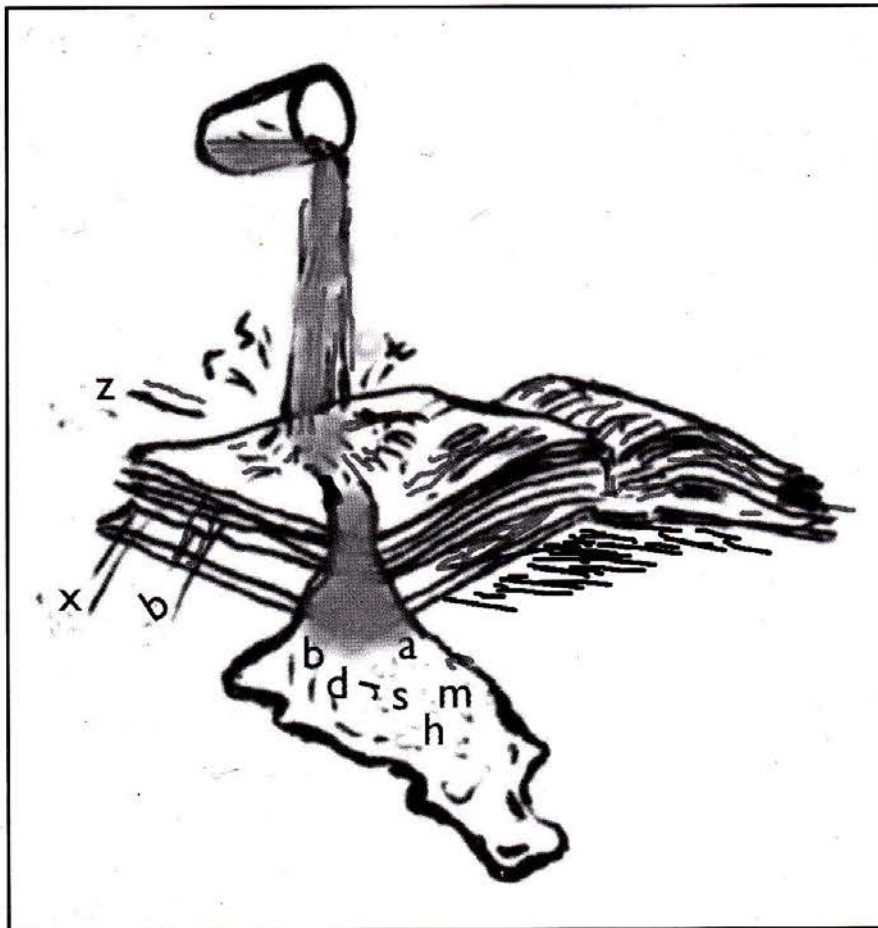
MENCUCI BUKU. LAIS ABID

tiga bulan usai mundurnya Soeharto. Sepanjang rak, buku-buku terjemahan yang mengkilap terbitan Gramedia, dan karya-karya cerdas para penulis Indonesia terbitan Pustaka Pelajar dan yang lain, beredar dalam volume-volume tipis yang beragam dan harga cetakannya murah, berjudul misalnya *Kekayaan Keluarga Soeharto* dan *Skandal dalam Rumah tangga Soeharto*. Pada segi distribusinya, batas jalur antara "yang bawah-tanah" dan "yang komersial" terkikis.❐

Catatan Akhir:

* Diterjemahkan (seizin penulisnya) dari Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia*, Bab I "*Books: Translations and Transgressions*" (Melbourne: Oxford University Press, 2000), hal. 21—50, oleh Jatu Arum Sari, Dwi Fachriani, Imam Karyadi, dan Hs. Bachtiar (penyunting). Disampaikan terima kasih kepada kedua penulis atas hadiah buku tersebut untuk BALAIRUNG, 3 Juni 2000, juga kepada Gerry van Klinken dan David Hill yang mau memeriksa hasil akhir terjemahan ini.

[1] Antara lain, B. Budjono, dkk. (ed.), *Mengapa Kami Menggugat* (Jakarta: Yayasan Alumni TEMPO, 1995), dengan kata pengantar Goenawan Mohammad dan esai-esai Ashadi Siregar dan T. Mulya Lubis.

[2] Contohnya, buku berjudul *The Pro-Democracy Movement Clobbered*, laporan 100 halaman yang mengungkap insiden 27 Juli 1996, diterbitkan bukan oleh penerbit Indonesia tapi dua lembaga sponsor dari AS, yaitu the Robert F. Kennedy Memorial Center of Human Rights dan Human Rights Watch/Asia.

[3] George Quinn memperkirakan sedikitnya ada 500 ribu pembaca kesusastraan Jawa modern. Lihat G. Quinn, "*The case of the invisible literature: Power, scholarship and contemporary Javanese writing*", *Indonesia*, 35, April 1983, hal. 1—36.

[4] Publikasi berbahasa regional terutama teks-teks pembelajaran bahasa di sekolah, cetakan-cetakan ulang atau studi-studi akademis atas dokumen-dokumen dan teks-teks klasik, juga traktat keagamaan (Kristen) dan terjemahan Injil. Dalam daftar sirkulasi buku-buku IKAPI selama kurun 1995, misalnya, buku-buku yang berbahasa daerah hanyalah selusin buku dalam bahasa Sunda.

[5] H.M.J. Maier, "*From heteroglossia to polyglossia: The creation of Malay and Dutch in the Indies*", *Indonesia*, 56, Oktober 1993, hal. 57.

[6] Tentang Balai Pustaka (dan suatu survei historis tentang kesusastraan Indonesia yang lebih umum) lihat A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1967 dan 1979), Vol. 1 dan 2. Paul Tickell, dalam "*Good books, bad books, and banned books: Literature, politics and the pre-war Indonesia novel*" (Australia: Monash University, 1982—tesis M.A. tak diterbitkan), menguji dan membandingkan novel-novel Balai Pustaka dengan terbitan penerbit-penerbit swasta komersial.

[7] Untuk suatu tinjauan historis hingga 1970-an, lihat Eduard J.J.M.

Kimman, *Indonesian Publishing: Economic Organizations in a Langganan Society* (Belanda: Hollandia Baarn, 1981).

[8] Ariel Heryanto, "Masihkah Politik Jadi Panglima? Politik Kesusastraan Indonesia Mutakhir", *Prisma* 8, 1988, hal. 3–16.

[9] George Miller, "Current issues facing the Indonesian book publishing industry", *Southeast Asian Research Materials Group Newsletter*, 36, Juni 1989, hal. 12.

[10] Indonesia memproduksi hanya 6.303 judul selama 1992. Angka tersebut jika dibandingkan dengan Korea (27.889) dan Thailand (7.626) jelas kalah, meski secara keseluruhan melebihi Malaysia (3.748 pada 1994), Sri Lanka (2.535 pada 1991), Bangladesh (1.209 pada 1988), dan Filipina (825 pada 1991), yang kesemuanya berpenduduk lebih sedikit. Lihat *Statistical Yearbook 1993* (New York: UN, 1995).

[11] Misalnya, Biro Pusat Statistik, *Statistik Sosial Budaya Hasil Susenas 1991* (Jakarta: BPS, 1992), hal. 25–30.

[12] Insan Budi Maulana, direktur Yayasan Studi Hak Milik Intelektual Indonesia (FIPSI), mencemaskan sedikitnya jumlah pelanggaran hak cipta yang berhasil diajukan ke pengadilan, dibanding angka pelanggaran itu yang sesungguhnya. Lihat "Pembajakan Hak Cipta Diselesaikan di Pengadilan", *Kompas*, 13 November 1996, hal. 10.

[13] Statistik penerbit didasarkan pada tabel 510 anggota IKAPI dan 87 nonanggota: "Perkembangan Jumlah Penerbit Anggota IKAPI dan Nonanggota IKAPI Tahun 1995", dokumen dari Pusat Informasi *Kompas*, 17 Mei 1996, hal. 10.

[14] Misalnya, Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Teori Sastra: Metode, Kritik, dan Penerapannya* (1995); dan Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme* (1994), dan *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi* (1995). Keduanya dosen Universitas Gadjah Mada.

[15] Misalnya, Syamsul Rijal Hamid dan Esti Rahayu (ed.), *Daftar Buku 1996* (Jakarta: IKAPI, 1996).

[16] "Peringkat 200 Konglomerat berdasarkan Volume Penjualan pada 1995", *Warta Ekonomi*, No. 27/VIII, 25 November 1996, hal. 36–37. Tentang kerajaan bisnis Kelompok Kompas-Gramedia, lihat David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 83–86.

[17] Pada 1975 novel itu sukses difilmkan, lantas mengalami cetak ulang yang ke-14 pada 1995, dan Marga berhasil menjual total 780.000 kopi untuk sekira 40 novelnya.

[18] Teddy Surianto, *et al.*, *Kompas Gramedia Group Indonesia* (buklet promosi 64 halaman untuk Hanover Fair, 1995), hal. 3–17.

[19] Selama Februari 1995, Elex Media Komputindo telah menerbitkan 1995 judul, terdiri atas 760 cerita anak dan komik dan 447 judul perkomputeran.

[20] Lihat <http://bermuda.pacific.net.id/~gramedia>, 7 Januari 1999.

[21] Kimman, *Indonesian Publishing*, hal. 39–45.

[22] Sepuluh dari 102 penerbit tercatat pada Daftar Penerbit Buku IKAPI 1996.

[23] Kimman, *op. cit.*, hal. 44.

[24] Lihat Laporan Khusus "Banjir Bacaan Untung Siapa?", *Prisma*, Mei 1987, hal. 82–96.

[25] Untuk studi tentang internasionalisasi komik-komik Jepang dengan kasus Indonesia, lihat Saya S. Shiraishi, *"Japan's soft power: Doraemon goes overseas"* (hal. 234–272), dalam Peter J. Katzenstein dan Takashi Shiraishi (ed.), *Network Power: Japan and Asia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1997).

[26] Ishak Rafick Sujatmaka dan Hartono, "Masa Keemasan Buku Praktis, Manajemen, Agama, dan Anak-Anak", *SWA Online,* Agustus 1995, juga di <http://www.swa.co.id/95/08/SIGI02.AGS.html>.

[27] "A comical situation", *Asiaweek*, 5 January 1996, di <http://pathfinder.com/@@mjIASQYA*ZOGNy7s/Asiaweek/96/0105/feat2.html>.

[28] Banyak informasi umum tentang perkomikan Jepang tergambar dari Jose Manuel Tesoro, *"Asia says Japan is top of the pops"*, *Asiaweek,* 5 Januari 1996, di <http://pathfinder.com/@mjIAQYSA*ZOGNy7s/Asiaweek/0105/feat1.html>; Cesar Bacani dan Murakami Matsuko, *"A Japanee toymaker invades cyberspaces"*, *Asiaweek*, 19 April 1996, di <http://pathfinder.com/@@mjIASQYA*ZOGNy7s/Asiaweek/96/0419/biz1.html>.

[29] Dikutip dalam Tesoro, *ibid*.

[30] Perbandingannya antara Akira Toriyama, *Dragon Ball,* Seri 1, versi Indonesia (Jakarta: Elex Media Komputindo, cet. V, Juli 1996) dengan versi asli Jepang (Tokyo: Bird Studio, 1985).

[31] Dikutip dalam Tesoro, *op. cit.*

[32] Lihat *Katalog Komik* EMK 1995–1996.

[33] Noor Cholis, "Tentang Komik: Yang Menggemaskan, Yang Cerdas", *Kalam* 7, 1996, hal. 41–51.

[34] Kami melukiskan sebagian kesan berdasar wawancara panjang (tahun 1981 di Jakarta) dengan Ganes T.H., sesepuh pengarang komik Indonesia pada era 1970-an. Sang penulis terlibat pada hampir semua tahap produksi dan distribusi komik-komiknya. Meski sukses besar, termasuk beberapa film yang didasarkan pada komiknya, hasil penjualan komiknya sendiri tetap kecil.

[35] Tim Lindsey, *"Captain Marvel meets Prince Rama: 'Pop' and the Ramayana in Javanese culture"*, *Prisma* 3, March 1987, hal. 38–52.

[36] Data dari Syamsul Rijal Hamid dan Estu Rahayu (ed.), *Daftar Buku*, hal. 160–163.

[37] Hilman, *Lupus: Interview with the Nyamuk!* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1996, cet. III), terbit pertama 1995. Angka penjualannya sebesar 1.421.000 adalah total penjualan seri Lupus karya Hilman, bukan cuma judul tunggal ini.

[38] *Anak Baru Gede* (ABG) secara harafiah berarti "seorang anak yang baru–tumbuh–dewasa." Bagaimanapun, fenomena ABG eksklusif pada anak muda kota dari kelas menengah-atas. *Gede* berarti juga "besar" atau "penting", seperti dalam "orang *gede*" (seorang yang penting–sebagai lawannya "orang kecil" atau "orang yang tak penting").

[39] Benedict Anderson, *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990), hal. 162 dan 192.

[40] Stanley, "Orde Baru 31 Tahun, 2.000 Judul Buku Dibreidel", makalah yang dipresentasikan dalam Seminar "Ekspresi dan Kemerdekaan", Yayasan Lontar, 2–4 September 1996, di Ciloto, Jawa Barat, tercantum di <http://tempo.co.id/29/n_kolom3.htm> edisi 29/01, dan terkirim dalam *mailing list* <indonesia-1@igc.apc.org>, 15 September 1996. Banyak informasi dalam paragraf berikut yang ditarik dari pemikiran detail ini.

[41] Untuk informasi latar belakang persoalan ini, lihat Tri Agung Kristanto, "Di Seputar Masalah Pelarangan Buku", *Kompas,* 18 September 1996, hal. 26. Banyak informasi pada paragaraf berikutnya yang ditarik dari sini.

[42] Sebagai contoh, Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen and Unwin, 1986); Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1978–terj. Indonesia: Pustaka Sinar Harapan, 1988); Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia* (Singapura: OUP, 1988); atau Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah,* tentang masa awal organisasi politik Sarekat Islam di Semarang. Artikel "Buku-Buku Terlarang Tahun 1991–1995", *Kompas Online*, 16 Januari 1996, terkirim dalam *mailing list* <apakabar@acces.digex.net>, menyajikan tinjauan yang bagus tentang pelbagai pembredelan buku waktu itu.

[43] Susunan *clearing-house* dicantumkan dalam SK Jaksa Agung No. Kep-114/JA/10/1989 tertanggal 28 Oktober 1989 (dalam Tri Agung Kristanto, *op. cit.*).

[44] Untuk analisis detail tentang kasus-kasus ini, lihat Ariel Heryanto, *"Discourse and state terrorism: A case study of political trials in New Order Indonesia 1989-1990"* (Melbourne: Monash University, 1993–disertasi Ph.D., tidak dipublikasikan).

[45] Daftar lengkap karya dan uraian detail kehidupan Pramoedya dapat ditemukan di situs Pramoedya, <http://www.access.digex.net/~bardsley/prampage.html>.

[46] Buku Pramoedya yang berjudul *Hoakiau di Indonesia* diterbitkan ulang oleh Garba Budaya, Jakarta, tiga bulan setelah Soeharto jatuh.

[47] "Sastrawan Indonesia Peroleh Penghargaan", *Kompas,*11 November 1996, hal. 10.

[48] Daniel Dhakidae, "Kesustraan, Kekuasaan, dan Kebudayaan Suatu Bangsa", *Kalam* 6, 1995, hal. 74–102.

[49] Makalah-makalah dan komentar-komentar dalam seminar ini, ditambah ulasan media massa, terkumpulkan dalam buku *Reflesi Kebudayaan* (Jakarta: Panitia Dialog Terbuka Refleksi Kebudayaan, 1996).

[50] Untuk detailnya lihat David T. Hill, *"The two leading institutions:* Taman Ismail Marzuki *and* Horison", dalam Virginia Matheson Hooker (ed.), *Culture and Society in New Order Indonesia* (Kuala Lumpur: OUP, 1993), hal. 245–262.

[51] Arief Budiman, "Wiji Thukul: Penyair Kampung", dalam Wiji Thukul, *Mencari Tanah Lapang* (Amsterdam: Manus Amici, 1994), hal. vii–xvi.

[52] David T. Hill, *"Who's Left? Indonesian Literature in the Early 1980s"*, Kertas Kerja No. 33 (Melbourne: Centre of South-East Asian Studies, Monash University, 1984).

[53] Terjemahan lengkapnya dalam Keith Foulcher, *"Social Commitment in Literature and Arts: The Indonesian 'Institute of People's Culture 1950-1965"*, Kertas Kerja No. 15 (Melbourne: Centre of South-East Asian Studies, Monash University, 1986), hal. 68–69.

[54] Wiji Thukul, *"Warning"*, dalam *The Struggle for Democracy in Indonesia* (Sydney: Action for Solidarity with Indonesia and East Timor–ASIET, 1996), hal. 22–23 (diterjemahkan oleh James Balowski, Helen Jarvis, Max Lane, dan Venessa Tanaja). Versi asli Indonesia, "Peringatan", dalam Wiji Thukul, *op. cit.*

E-Book Pertama di Indonesia

Penerbit Mizan, adalah penrbit pertama yang meluncurkan edisi online. Mereka meluncurkan Mizan On-line Pada Mei 1996. Mizan Online menawarkan fasilitas pembelian buku secara online dengan menggunakan kartu kredit pada September 1999. hal itu juga membuktikan Mizan adalah penerbit pertama di Indonesia yang masuk ke dunia e-commerce.

Tak hanya itu saja, penerbit Mizan adalah penerbit pertama di Indonesia yang menerbitkan e-book. E- Book tersebut diluncurkan 9 Februari 2001. Bertajuk *Wasiat Sufi Imam Khomeini kepada Putranya, Ahmad Khomeini,* buku yang disunting oleh Yamani, berisis wasiat Imam Khomeini, puisi-puisi Imam Khomeini, dan kenangan orang-orang terdekatnya.

E-Book ini merupakan antologi tulisan Khomaini kecuali bagian wasiatnya yang berasal dari buku *Imam Khomeini's Will to His Son.* Secara keseluruhan, buku ini terdiri atas 200 halaman.

Aksi brilian Mizan on-line juga didukung oleh toko buku sanur, yang telah dirintis sejak 1997. Alamat website, http://www.sanur.co.id.

Kebudayaan Baca-Tulis

Cerita Tentang Kekuasaan (?)

BASKORO

Gagasan mengenai modernisme itu,
a ringkas, menyebar ke lima benua
an risalah Gutenberg, ide, gampan
es kemana-mana. Mengalir sampai k
kesadaran setiap benak masyarakat
n buku, perayaan penemuan-penemuan
an-kemajuan bisa dinikmati, secara
n. Kata lain itu semua: kebudayaan
bangun, terbentuk, dan berkembang
n-tirisan huruf yang disatukan dan
dicetak masal.

Monika Eviandaru

Mahasiswi Fak. Psikologi UGM, mantan Pemimpin Umum Majalah BALAIRUNG (1999-2000), juga aktif di Lembaga Studi Realino Yogyakarta. Pernah pula bergiat di Forum Kajian Sosial Humaniora (FKSH), dan ikut membidani lahirnya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia (FKPMI) di Mataram, Lombok, 2000.

Pengaruh bacaan pada manusia memang besar,
tetapi tidak patut dibesar-besarkan juga.
—Ruth Havelaar—

Cuplikan di atas diambil dari sebuah novel biografis seorang perempuan Belanda, istri seorang mantan tahanan politik Indonesia.[1] Menurut perempuan Belanda yang jadi tokoh "aku" dalam cerita ini, dibanding bacaan, pengalamanlah yang lebih berdaya mempengaruhi tindak-tanduk seseorang. Sepanjang jantung berdetak, selama itu pula pengalaman merasuk. Pertanyaannya, bagaimana bila "membaca" itu sendiri dinilai dan dimaknai sebagai "pengalaman"?

Perdebatan seberapa besar pengaruh bacaan, tentu saja tak akan dapat disudahi dengan satu jawaban. Pendapat tokoh "aku" di atas, misalnya, akan sangat bertolak belakang dengan mereka yang menghidupi slogan "*You are what you read*". Bagi mereka, bacaan bahkan dinilai sebagai sesuatu yang turut mengkonstruksi identitas.

Perbincangan mengenai pengalaman membaca adalah juga perbincangan tentang "tulisan" atau "bacaan". Seperti sekeping mata uang, apabila satu sisinya adalah "pengaruh membaca", maka di sisi yang lain adalah "kekuatan tulisan". Maka, menulis dan membaca jadi aktivitas yang akan selalu beriringan. Peran kebudayaan baca-tulis dalam sejarah peradaban manusia sangat dihitung. Melalui artikelnya, "*The Power of Writing*", Joel Swerdlow bahkan menulis:

> *"Handmaiden to history, chronicler of the mind and the heart, writing is humandkind's most far reaching creation, its form, and design endless...From its beginning as recordkeeper to its transformation into one of humaniy most potent forms of artistic and political expression, writing reveals the power of innovation"*[2]

Melihat satu pengalaman yang menginspirasikan artikelnya, Swerdlow memang pantas berpendapat demikian. Dalam artikel itu, untuk membuktikan gagasannya tentang kekuatan tulisan, Swerdlow mengangkat kisah Wei Jingsheng, seorang tahanan politik di Cina yang dipenjara selama delapan belas tahun karena tulisannya tentang demokrasi. Dan (secara tak langsung), berkat tulisan itu pula Jingsheng dapat terbebas dari penjara. Berbekal sebuah pena selundupan dan lembaran tisu toilet, Jingsheng mengambarkan perlakuan sangat buruk yang dialaminya selama di penjara. Sampai suatu hari, catatan ini diterbitkan di Amerika Serikat. Buku yang berjudul *The Courage to Stand Alone* inilah yang akhirnya membuka ruang solidaritas lebih luas bagi Jingsheng dan tekanan internasional bagi penguasa Cina.

Kisah Jingsheng, tentu saja, bukan satu-satunya contoh bagaimana sebuah tulisan dapat menentukan "hidup" atau "mati" seseorang ataupun sebuah kekuasaan. Catatan harian Anne Frank mampu membuat banyak orang di berbagai sudut dunia turut merasa nyeri atas kekejaman Nazi. Di Indonesia sendiri (di masa Soeharto berkuasa) tercatat nama Pramudya Ananta Toer. Larangan terhadap karya tulisnya bukan saja harus dibayar mahal oleh Pram sendiri, tapi juga oleh mereka yang membaca karya-karyanya.

Namun tak selamanya "tulisan" menggerakkan kekuatan progresif. Demikian pula membaca sebagai aktivitas yang mengiringinya. Tak ada jaminan membaca akan selalu mengantarkan seseorang pada fase pengalaman yang oleh pihak-pihak tertentu biasa dinamai dengan istilah "pencerahan". Sebuah cerita pendek berjudul "*The Book Learner*" karya Chatcharin Chaiwat[3], kiranya menggambarkan ekstrem lain dari pengalaman seseorang akan bacaan.

Dalam cerpen ini, dikisahkan pengalaman perjumpaan seorang gadis bernama Si dengan bacaan. Si adalah sepupu dari anak laki-laki yang jadi tokoh "aku". Ayah anak laki-laki atau paman Si merupakan generasi pertama dalam garis keturunan keluarga besarnya yang tak jadi petani. Ia bekerja sebagai juru tulis di kelurahan. Generasi pertama yang tak bekerja dengan mengandalkan kekuatan *okol*.

Atas kemampuannya memutus rantai "nasib

warisan" ini, paman Si berkesimpulan, membaca dan menulislah kunci lompatan sejarah yang mengubah nasib hidupnya. Maka, ketika dengan penuh rasa hormat dari desa Si diserahkan ayahnya untuk *ngenger* pada keluarga tersebut—demi sebuah lompatan sejarah hidup—, pamannya segera memutuskan, membaca dan menulis harus jadi kemampuan pertama yang dikuasai Si.

"Bacalah bukumu…ingat-ingatlah selalu hal ini…bacalah sebanyak kamu bisa…kunci kesuksesan ayahmu datang karena membaca!" demikian sang *priyayi* pemula itu selalu berpesan pada anak laki-laki dan keponakan perempuannya[4]. Dari hari ke hari Si makin pandai membaca. Bahkan Si mulai rajin mengikuti kisah roman picisan bersambung berjudul *Puing-Puing Cinta*. Kisah roman kegemarannya didapat dari sebuah majalah populer langganan keluarga tersebut.

Suatu hari Si mengajak sepupunya—yang kini jadi siswa sekolah menengah atas di ibukota dan selalu dianggapnya lebih pandai itu—memperbincangkan kisah roman kesukaannya. Ternyata sang sepupu mengabaikan ajakannya. Ia merasa tak penting membicarakan roman itu.

Tiba-tiba Si dikabarkan tewas. Anak laki-laki Sang Paman tentu saja kaget. Dari ibunya ia ketahui, malapetaka ini berawal ketika Si berkenalan dengan seorang laki-laki, pekerja urban, yang sering lewat di depan rumah. Kesaksian beberapa orang menyebutkan, Si terlihat pergi dengan laki-laki itu, sampai akhirnya ditemukan bunuh diri.

Demi mengumpulkan kenangan tentang Si, anak laki-laki ini mengunci diri dalam kamar Si. Sampai suatu saat ia temukan salah satu edisi majalah populer yang memuat kisah roman berjudul *Puing-Puing Cinta*. Betapa terpukul hatinya ketika membaca kisah roman itu. Ia seolah membaca kisah percintaan sepupunya sendiri. Bahkan, susunan kata dan kalimat surat perpisahan yang ditulis tokoh perempuan dalam roman itu, sama persis dengan yang ditulis Si dalam surat perpisahannya.

Anak laki-laki ini tercenung. Ia teringat saat mengabaikan ajakan Si untuk memperbincangkan roman itu. Dan tiba-tiba mantra ayahnya, "Bacalah bukumu…ingat-ingatlah selalu hal ini…bacalah sebanyak kamu bisa…kunci kesuksesan ayahmu datang karena membaca!" untuk pertama kalinya terdengar dalam nada asing.

Merujuk pada kisah fiksi di atas, tak gampang menuding apakah yang menjadi awal dari peristiwa bunuh diri tersebut. Apakah bunuh diri jadi pilihan Si seandainya ia tak pernah membaca roman picisan itu? Atau, lebih jauh lagi, akankah Si bunuh diri jika ia tak pernah membaca? Sebuah pertanyaan yang sulit.

Diinspirasikan kisah fiksi itu, maka tulisan ini mencoba mengaji ulang pengalaman "menjadi bisa membaca dan menulis". Memperbincangkan pengalaman dan pemaknaan menjadi "*melek* huruf" yang tak pernah tunggal dan searah. Seperti juga sejarah dan dinamikanya yang selalu berkembang karena persinggungan dan keterkaitannya dengan ruang pengalaman lain di luar aktivitas baca-tulis itu sendiri.

Ibu dari tulisan adalah kebutuhan manusia untuk mencatat hal-hal dari praktik hidup sehari-hari. Mulai dari lengkung-lengkung kaligrafi yang rumit, huruf-huruf mencolok dalam gambar iklan, hingga titik-titik huruf digital dalam *e-mail*. Semua itu dapat ditelusuri jejaknya dalam lempengan tanah liat yang jadi awal dari tulisan.

Ditemukan di Iran, lempengan tanah liat ini diperkirakan hadir sejak 4000 SM. Menggunakan buluh alang-alang, guratan-guratan tertentu dibuat di atas lempung basah guna pencatatan dan administrasi perdagangan. Selanjutnya, fungsinya meluas hingga pencatatan sejarah dan kesusastraan. Sebuah lempengan dari 2350 tahun SM yang ditemukan di Irak misalnya, berguratkan gambar tentang kewajiban istri untuk mempersembahkan kurban bakaran [ternak] pada Tuhan.

Sampai sekira1000 tahun SM, *Phoenicians*—termasuk salah satu di antaranya bangsa Mesir—mengkreasi ratusan simbol, dan tiga puluh simbol diantaranya mewakili satu jenis suara atau pelafalan tertentu. Dari sinilah mulai digunakan satu simbol tertentu untuk menandai satu suara tertentu pula, seperti abjad di masa kini. Sekitar enam abad SM, simbol tulis Yunani pun mengembangkan bentuk tipikalnya seiring penemuan konsep abjad. Abjad Yunani—melalui tangan Romawi dengan jaring kekuasaan di zaman itu—dikembangkan dan disebarluaskan sebagai bentuk atau simbol baca-tulis Latin sebagaimana yang dikenal dan digunakan hingga saat ini[5].

Sampai kemudian di tahun 1450, ketika Gutenberg—yang kebetulan adalah orang Inggris dan berbaca-tulis dalam abjad Latin—menciptakan mesin cetak yang memungkinkan produksi massal karya tulis. Sejak itulah sejarah penjelajahan serta penguasaan berpilin dengan abjad Latin. Dan, rangkaian makna serta pesan yang disimbolkannya tersebarkan dan [barangkali terpaksa] diterima oleh makin banyak orang di belahan dunia. Mengutip Levi-Strauss, seorang antropolog strukturalis Perancis, kebudayaan baca-tulis secara lebih massif dimanfaatkan. Bukan saja untuk pencatatan praktik hidup sehari-hari, namun dapat pula direkayasa oleh pihak tertentu demi memperkuat, membenarkan diri sendiri, atau meminggirkan pihak lain.[6]

Pun dalam rentang sejarah kebudayaan baca-tulis Nusantara. Siapa dapat menjamin bahwa surat-surat kuno Nusantara—kalau boleh dianggap sebagai bentuk awal kebudayaan baca-tulis di negeri ini—menemukan bentuknya dan terbaca bukan karena petualangan, perjumpaan, atau barangkali juga penguasaan oleh atau terhadap yang lain?

Rentang 1000 tahun awal Nusantara[7], kebutuhan akan pencatatan dituangkan dalam pahatan batu seperti yang ditemui di dinding-dinding candi. Hal ini diawali ketika sejarah kekuasaan mencatat penaklukan Sriwijaya atas Mataram kuno. Toleransi antar umat beragama jadi bagian dari praktik hidup sehari-hari karena perjumpaan Hindu dan Budha. Saat itulah muncul naskah *Arjuna Wiwaha* (Perkawinan Arjuna) karya Mpu Kanwa di tahun 1030 M. Seperti dikisahkan buku-buku pelajaran sejarah masa kini, naskah kuno ini ditulis dengan huruf Pallawa yang tipografi hurufnya segera mengingatkan kita pada huruf-huruf dalam tulisan India, Thailand, atau Jawa masa kini.

Menyusul *Arjuna Wiwaha*, tahun 1125, Mpu Panuluh menulis *Hariwangsa* dan *Gatotkacasraya*, sementara Mpu Harmaja menggubah *Smaradhahana*. Lalu, tahun 1150, untuk melegalkan aneksasinya atas Jenggala, Jayabaya yang berkuasa atas Kediri memerintahkan Mpu Sedah menggubah *Bharatayudha*.

Berikutnya muncul naskah *Nagarakertagama* tulisan Mpu Prapanca di tahun 1365, masa di mana Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Dua tahun kemudian menyusul Mpu Tantular yang menggubah *Arjunawijaya*. Tantular pulalah yang menyelesaikan *Sutasoma* di tahun 1389, tahun yang sama dengan tahun kematian raja besar Majapahit, Hayam Wuruk.

Sampai kemudian, di awal abad 16, tercatat kebudayaan baca-tulis Latin masuk bersama armada perang Portugis di belahan timur Nusantara. Secara berbarengan di belahan barat, kebudayaan baca-tulis dikenal seiring masuknya ekspedisi Belanda. Di rentang abad yang sama, ketika sejarah Jawa diwarnai dengan keruntuhan Majapahit, pengaruh Islam mulai merasuk. Kehadiran Kotagede sebagai cikal bakal Mataram baru –Mataram Islam—memulai sebuah babak baru bentuk kebudayaan baca-tulis Nusantara.

Tahun 1615, koran *Memorie der Nouvelles* (cikal bakal koran di Nusantara yang masih ditulis tangan) terbit di Batavia atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.P. Coen. Tahun-tahun berikutnya, lembaga bernama sekolah hadir mewarnai praktik hidup di Nusantara. Lembaga ini menawarkan persentuhan langsung dengan pengalaman akan baca-tulis Latin. Empat puluh dua tahun setelah sekolah pertama bagi warga Eropa berdiri di Batavia, sebuah bentuk baru kebudayaan baca-tulis diperkenalkan Eropa pada Nusantara: buku. *Tijtboek* (semacam almanak) karya Kornelis Pijl di tahun 1659 jadi buku pertama yang dicetak di Batavia.

Tahun 1668, atau sembilan tahun kemudian, industri percetakan mulai berkembang di Jawa. Sejak itu berturut-turut terbit surat kabar *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementes* di tahun 1744. Disusul kemudian koran *Bataviasche Koloniale Courant* (cikal bakal koran modern di Hindia Belanda) di tahun 1810. Sementara di lain pihak, sejarah kemudian mencatat makin banyak sekolah didirikan di Hindia Belanda.

Ini makin membuat Bumiputra mendapat ruang untuk bersentuhan dengan pengalaman baca-tulis Latin, baca-tulis yang

Ibu dari tulisan adalah kebutuhan manusia untuk mencatat hal-hal dari praktik hidup sehari-hari. Mulai dari lengkung-lengkung kaligrafi yang rumit, huruf-huruf mencolok dalam gambar iklan, hingga titik-titik huruf digital dalam e-*mail*.
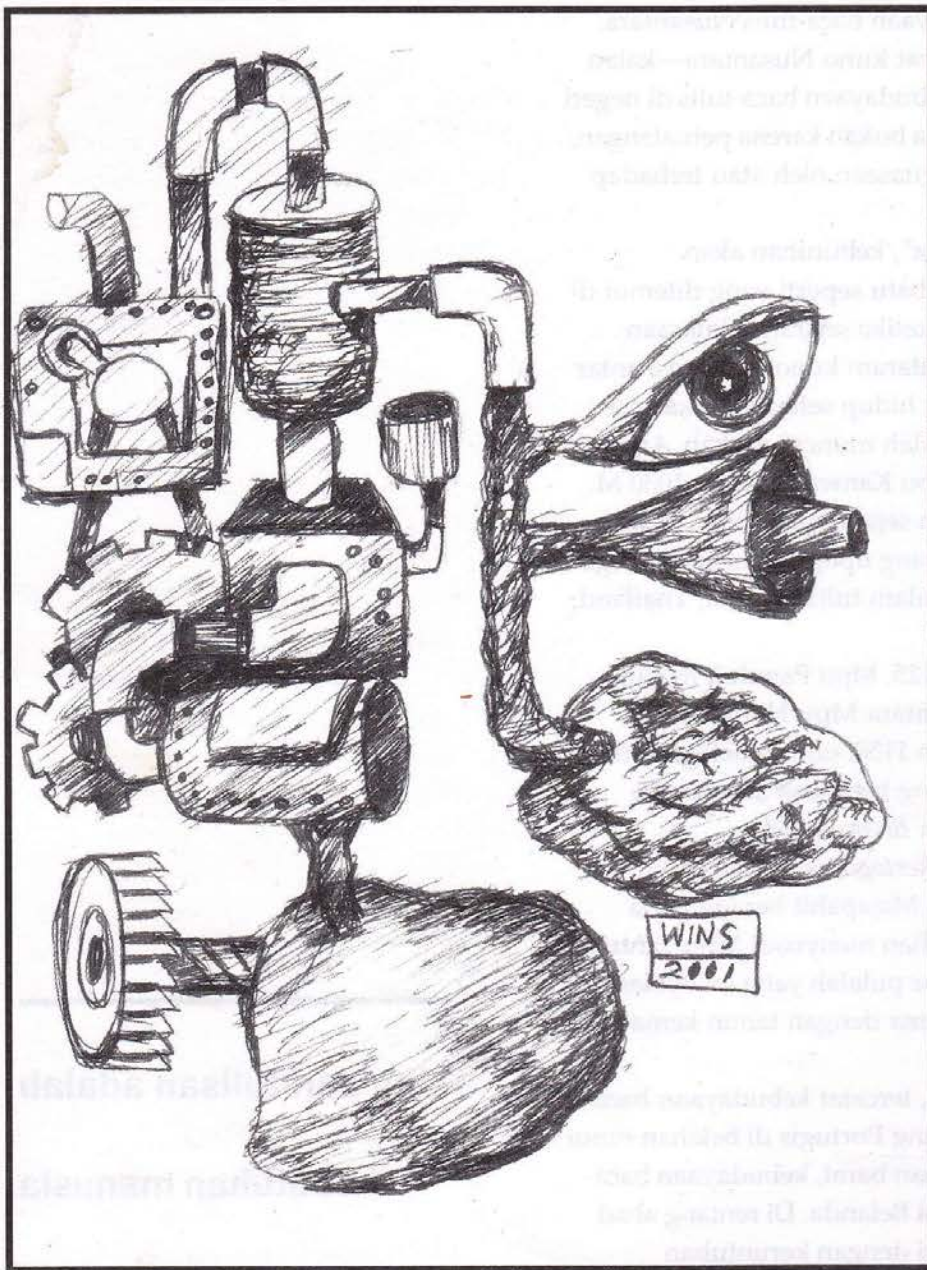
WINDU

digunakan sang Tuan Besar. Dimulai munculnya percetakan swasta sejak tahun 1823, berikutnya tercatat kemunculan surat kabar Bumiputra pertama di tahun 1907. Koran ini merupakan koran dagang berbahasa Melayu dari pemodal Bumiputra.

Paparan di atas adalah catatan perubahan bentuk, bahan, dan simbol yang digunakan untuk menuangkan kebudayaan baca tulis Nusantara. Memang, ia tak berkata apapun tentang pengaruh kebudayaan "baca-tulis". Namun bagaimana ketika catatan itu diletakkan di antara sistem lain yang bekerja atau terhubung satu sama lain bersama perubahan bentuk, bahan, dan simbol kebudayaan baca-tulis?

Tulisan Nancy Florida, *Reading The Unread in Traditional Javanese Literature*[8], sangat menarik untuk ditengok dalam rangka membaca ulang kebudayaan baca-tulis Nusantara. Meskipun hanya Jawa, apa yang ditulis oleh Florida tetap saja penting dan relevan. Bagi sebagian besar orang Jawa di zaman ini, literatur Jawa tradisional lebih merupakan sesuatu yang dibayangkan daripada dibaca. Melalui tulisannya, Florida mengulas bahwa sikap kebanyakan orang Jawa ini terjadi bukan karena persoalan "dulu dan sekarang". Lebih dari itu, temuannya membuktikan sejak literatur-literatur itu ditulis, kebanyakan orang Jawa telah menunjukkan sikap yang sama.

Bagi kebanyakan orang Jawa, literatur tradisional (manuskrip) mempunyai citra "klasik", sebuah simbol tak bernoda dari kebudayaan "tinggi". Sebuah goresan berharga yang misterius warisan masa lampau. Status keagungan inilah yang membuktikan literatur klasik Jawa bukanlah untuk dibaca. Keklasikannya membawa konsekuensi logis dengan munculnya kesan kesempurnaan: "*an image of ideal illegibility*".

Pada kalangan non-akademik Jawa modern, telah terbangun dua citra populer yang saling bertolak belakang dan menutup kemungkinan literatur Jawa sebagai materi untuk dibaca. Pertama, citra literatur Jawa tradisional sebagai kepustakaan kerajaan yang memalukan. Sebuah bentuk kegemaran dungu dari sedikit elit konservatif. Label yang dilekatkan oleh pandangan pertama ini adalah feodal!

Kedua, sekaligus yang lebih dominan, citra literatur Jawa tradisional sebagai sesuatu yang adiluhung. Mitos adiluhung inilah yang mengukuhkan literatur Jawa sebagai simbol kebudayaan tinggi. Dan apakah citra ini sesuatu yang tercipta dengan sendirinya? Ataukah seperti dikatakan Strauss, citra ini lebih merupakan hasil dari sebuah rekayasa politis demi pembenaran pihak tertentu dan peminggiran yang lain?

Menguji argumentasinya, Florida mencatat beberapa komentar umum orang Jawa tentang literatur Jawa tradisional. Salah satu komentar yang sering dikemukakan, bahasa literatur Jawa sangatlah agung hingga tak setiap orang mampu memahaminya. Pengetahuan dalam naskah itu pun seolah tak akan dapat terbaca, apalagi dikaji oleh sembarang orang.

Citra tersebut membuat pertanyaan mengapa literatur ini tak terbaca dirasa telah cukup terjelaskan. Literatur ini kemudian lebih disikapi sebagai monumen kedalaman misteri hidup. Ia dibiarkan tetap menjadi misteri

Bagaimana dan untuk apa citra ini terbangun, dijawab dengan tajam melalui ulasan terhadap sosok pujangga Jawa, Ronggowarsito beserta karya-karyanya. Raden Ngabei Ronggowarsito, secara umum, dikenal sebagai penulis besar literatur Jawa tradisional. Citra "kebesaran" yang melekatinya jadi bumerang baginya. Dalam kilau "kebesarannya" ini, tulisan-tulisannya justru tak tersentuh. Hasil karyanya yang dikerjakan bertahun-tahun dinilai terlalu "halus" atau adiluhung untuk dibaca.

Demikian pula dengan kata pujangga yang selalu disematkan di depan namanya. Label ini biasanya diasosiasikan dengan citra seorang sosok yang menguasai bahasa dan memiliki "p*rophetic pen*". Maka, tulisan Ronggowarsito dikenal bukan saja dalam imajinasi akan kehalusannya, tapi juga dibayangkan memiliki kekuatan material: mampu mempengaruhi—atau terwujud dalam—realita.

Citra adiluhung dan kepujanggaan inilah yang makin mengokohkan citra literatur Jawa tradisional sebagai sesuatu yang tak terjangkau. Kepujanggaan tak akan teraih melalui proses belajar. Sama mustahilnya, bahkan untuk sekadar membaca makna dari kata-kata seorang pujangga.

Karya fenomenal Ronggowarsito adalah *Serat Jayengbaya*. Syair ini merupakan sebuah potret tentang "pamrih" Jawa di abad 19. Ego imajinasi dalam teks tersebut bernama Jayengbaya. Jayengbaya dan kisah perjalanannya untuk "menjadi sesuatu" berpindah dalam serangkaian fantasi yang barangkali dalam kosakata mutakhir disebut dengan istilah karir. Dalam tiap seri fantasinya, perjalanan Jayengbaya selalu diwarnai pengalaman akan puncak kesenangan yang berakhir dengan keruntuhan dan malapetaka.

Salah satu contohnya, Jayengbaya membayangkan dirinya sebagai pedagang kuda. Jayengbaya menikmati kesenangan hidup setelah membunuh seorang pembeli yang kaya-raya. Tak lama kemudian, Jayengbaya tewas karena sebuah kecelakaan ketika sedang membawa salah seekor kudanya. Selain itu, juga difantasikan seekor anjing yang berubah jadi orang yang terberkati dan akhirnya tewas tersambar petir. Sebenarnya, melalui penggambaran ini, tokoh Jayengbaya berhasil mengaburkan perbedaan antara pinggiran dan pusat. Sebuah kritik yang menusuk bagi Surakarta waktu itu, apalagi dalam diksi dan gayanya yang sinis-jenaka.

Jayengbaya ditulis sekira tahun 1830, saat Keraton Surakarta mulai jatuh miskin dan kehilangan kekuatan politisnya. Hipokrisi dan pengkhianatan terjadi di mana-mana. Dalam salah satu petikan dituliskan, tersentuh kibasan selendang seorang pelacur sama menyenangkannya dengan mendapat promosi jabatan di Istana. Petikan lain yang lebih mengejutkan adalah keberuntungan para *kaum* (pemimpin doa) ketika diminta memimpin doa dalam upacara pemakaman seorang priyayi. Menurut buku itu, dalam acara seperti itu, *kaum* pendapat kesempatan untuk memasukkan beberapa cangkir dan cawan ke bawah pakaian.

Mencermati isinya, S*erat Jayengbaya* sebenarnya adalah pembalikan citra literatur Jawa tradisional. *Serat* ini mematahkan *image* feodal karena teksnya yang begitu sinis dan satir. Dengan bahasa yang humoris dan mudah dimengerti, *Jayengbaya* menjungkirkan citra adiluhung yang dikenakan pada *serat* Jawa umumnya. Tapi, tentu saja tak akan ada ruang untuk karya macam ini. Karena, barangkali, membuat Surakarta kehilangan kekuasaan politisnya serta legitimasi sebagai pusat kebudayaan [tinggi], maka dihujanilah Ronggowarsito dengan segala predikat adiluhung. Dan, kritik tajam dalam karyanya pun tenggelam tak terbaca.

Kebudayaan baca tulis pun terhenti di tangan segelintir elit. Bukan saja karena secara material belum memungkinkan untuk dimassalkan, tapi juga demi maksud-maksud tertentu yang disembunyikan. Rahasia pun tetap hanya diketahui mereka yang "ditakdirkan" memiliki kemampuan menguasai bahasa dan "*prophetic pen*". Maka, di mana akan diletakkan pernyataan bahwa tradisi lisan jauh lebih kuat dan barangkali lebih otentik daripada kultur baca-tulis?

Selanjutnya, apa yang terjadi ketika kedatangan mereka dari belahan lain memperkenalkan mesin cetak, alat yang mampu menghadirkan buku dan

koran, ratusan bahkan ribuan sekaligus dengan cepat? Hadirnya sekolah yang memungkinkan lebih banyak orang untuk bersentuhan langsung dengan huruf dan pena dalam satu tingkatan bahasa saja? Dari yang terbatas dan adiluhung menuju yang massal dan populer?

> "Ilmu pengetahuan yang kudapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dalam hidup, telah membikin pribadiku jadi agak berbeda dari sebangsaku pada umumnya. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak aku pun tak tahu. Dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa berilmu-pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat-catat. Suatu kali akan berguna..."[9]

Adalah Minke, tokoh dalam tetralogi legendaris Pramoedya Ananta Toer yang menuliskan kutipan di atas. Agaknya, mengulas tokoh ini jadi cara yang cukup pas untuk menengok kembali bagaimana kebudayaan baca-tulis di awal abad 20 dialami dan dimaknai.

Kolonisasi Belanda telah mencabut lingkaran kekuasaan dari tangan raja-raja Nusantara. Keraton tak lagi dapat mengklaim diri sebagai pusat kebudayaan tinggi. Rahasia sebagai yang "*linuwih*" (Jawa: yang lebih) itu kini berada di tangan para tuan berkulit pucat. [10]

Bukan lagi "darah" yang mampu mengantarkan seseorang meraih rahasia misteri hidup, melainkan membaca dan menulis. Pengetahuanlah yang memungkinkan seseorang belajar dari yang kemarin, mengubah di hari ini, dan berharap esok segala sesuatunya telah tergenapi. Tiap orang boleh dan mampu meraih rahasia ini asal dia membaca dan menulis. Bahkan seorang Sanikem, gundik tuan Belanda yang sebelumnya "hanyalah" perempuan Jawa yang bukan ningrat dan tak pernah gosok gigi.[11]

Baca-tulis jadi pintu pengetahuan yang akhirnya mampu membayar dendam seorang perempuan atas masa lalunya. Sanikem berhasil memulihkan harga dirinya setelah dijual ayahnya untuk digundik seorang *Meneer* Belanda. Kategori sosial untuk mengkastakan manusia pun bertambah: m*elek* huruf dan buta huruf. Barangkali sebelum kebudayaan baca-tulis "Latin" ini masuk, hidup yang dijalani dirasa telah cukup memenuhi kualitas kemanusiaannya.

Tapi, dengan kebudayaan baca-tulis ini, sebuah dimensi baru kemanusiawian dibukakan. Tak bisa membaca dan menulis adalah "kelumpuhan". Kelumpuhan yang memenjarakan untuk mengalami dan memaknai lebih banyak hal. Buta huruf jadi sama dengan patologi masyarakat lainnya yang harus diberantas.

Baca tulis jadi mantra baru. Mirip dengan "zesam buka pintu", maka rahasia kehidupan dibukakan, kunci menuju pada banyak keajaiban. Dan keajaiban semacam apa yang dijanjikannya? Ulasan terhadap novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam tampaknya akan menjawab pertanyaan ini.

Menyitir Dhaniel Dhakidae, sebagai dokumen berharga sekaligus monumen penting dalam perjalanan kehidupan bersama sebagai masyarakat, interaksi antartokoh dalam novel ini dan apa yang dilahirkan dari padanya, perubahan apa yang dihasilkannya, dan kelanggengan macam mana yang dipertahankan menjadi sesuatu yang pantas untuk diamati. [12]

Para Priyayi adalah novel yang bercerita tentang pernik kehidupan sebuah keluarga berstatus priyayi di tahun 1910 sampai 1967. [13] Apabila diurut berdasar kepemulaan tokoh, maka nama pertama yang patut disebut adalah Sastrodarsono, anak petani yang sukses dalam bersekolah dan menerima *beslit* (surat keputusan) untuk jadi guru bantu. Meskipun ayahnya petani, ia adalah anak petani yang keluar dari "cangkangnya".

Satrodarsono dilahirkan dari keluarga petani yang memimpikan dan mengarahkan anaknya untuk menghentikan "selera warisan" sebagai petani. Bahkan sejak dari kakeknya yang seorang mandor tebu, telah diimpikan agar suatu kali garis keturunannya akan ada yang jadi priyayi. Dan, Soedarsonolah sang pemula itu. Ia merangkak dari seorang guru bantu, guru, dan sampai akhirnya kepala sekolah. Namanya pun berubah menjadi Sastrodarsono.

Soedarsono kini seorang priyayi. Maka, sangat pantas jika ia kemudian mempersunting perempuan priyayi pula untuk melahirkan priyayi tulen. Keluaga besar pun terbangun. Sampai suatu hari, perjalanan hidup kepriyayiannya membawa Sastrodarsono berjumpa dengan seorang bocah bernama Lantip.

Lantip adalah nama baru dari Wage. Nama *ndeso* itu diberikan ibunya, Ngadiyem, seorang penjual tempe keliling langganan *ndoro* Guru Sastrodarsono. Seperti mengulang kepemulaannya, Sastrodarsono memutuskan untuk mengambil Wage sebagai bagian dari keluarganya. Nama Lantip pun dilekatkan. Dan dengan nama barunya,Wage segera memulai sejarah kepriyayiannya.

Melalui dua tokoh ini, akan coba ditelusuri bagaimana pengalaman akan "baca-tulis" dan penguasaan terhadap "pengetahuan" jadi bagian dari kunci menuju sejarah hidup "yang lain". Kisah ini berlatar belakang sejarah saat sebuah ruang bernama sekolah—tempat rahasia "pengetahuan" disembunyikan—hanya jadi milik para tuan dan puan berkulit pucat atau segelintir pribumi yang terpilih.

Maka, perbincangan tentang baca-tulis dan

pengetahuan adalah perbincangan tentang sebuah kelas tertentu dalam masyarakat. Tentang sebuah jarak sosial antara yang mengetahui dan menguasai dengan mereka yang hanya bisa melihat dan merasai. Pengalaman Ngadiyem, Ibu Si Lantip, kiranya menggambarkan hal itu.

> Mula-mula *embok* saya diam tak segera menjawab. Kemudian saya lihat mukanya memerah, lalu saya lihat air matanya mulai berlelehan keluar. "Waduh, *Ndoro* Guru *kakung, Ndoro* Guru Putri. Ini adalah anugerah yang luar biasa buat orang desa seperti kami. *Matur nuwun sanget.* Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf *nggih, Ndoro,* kalau saya sampai menangis begini. Saya dan *tole* Wage tak mengira akan datangnya anugerah yang tiba-tiba ini..." [14]

Bukan lagi "darah" yang mampu mengantarkan seseorang meraih rahasia misteri hidup, melainkan membaca dan menulis.

Luapan perasaan ini terjadi waktu Ngadiyem menerima pemberitahuan dari *Ndoro* Guru Sastrodarsono bahwa Wage akan disekolahkannya. Wage akan belajar membaca dan menulis. Wage yang hanya anak seorang pedagang tempe keliling itu boleh mengintip rahasia pengetahuan dan penguasaan. Ini adalah "anugerah yang tak terhingga". Anugerah yang semula berada pada jarak yang sangat jauh di luar sana.[15]

Inilah mengapa Ben Anderson menulis,[16] kedudukan golongan cerdik-cendikia sangat istimewa di mata massa rakyat tradisional. Mereka bukan sekadar golongan yang beruntung dapat menerima pendidikan yang lebih baik, tapi juga orang-orang pilihan yang "bernasib baik" mampu menembus, menguasai, dan memanfaatkan pengetahuan rahasia.

Mereka mempunyai kemampuan baca tulis (dengan segala teori, program, dan strateginya) yang punya nilai khusus di tengah rakyat. Hal ini disebabkan karena keilmuan tersebut dapat disebarluaskan secara cepat dan menakjubkan. Inilah yang juga ditegaskan ayah Sastrodarsono di masa awal "karir" kepriyayiannya:

> "Jadi Priyayi itu jadi orang terpandang di masyarakat, bukan jadi orang kaya. Priyayi itu terpandang kedudukannya karena kepinterannya.Kalau mau jadi kaya ya jadi saudagar, jadi *bakul* saja..."[17]

Lebih misterius lagi, saat massa rakyat juga melihat kenyataan bahwa selama ini golongan cendikiawan (berbaca-tulis) ini suka tampil dalam ikatan-ikatan ekslusif: dengan segala macam simbol status istimewa sebagaimana layaknya sebuah kelas sosial. Misalnya, mereka bermain kartu Cina sambil bergunjing berbagai hal yang terjadi di Wanagalih, desa mereka. Atau, di Karesidenan Madiun. Hal ini tak hanya jadi kebiasaan semata, namun sudah jadi semacam ritual ekslusif bagi Sastrodarsono dan para priyayi lain untuk merayakan (mengingat-ingatkan) status sosial dan privilesenya.

Dalam rangka menjadi lebih manusiawi, bukan saja dalam tata pergaulan, priyayi harus terus diingatkan status sosial dan hak istimewa, namun (terlebih-lebih) dalam praktik hidup sehari-hari. Keluarga Sastrodarsono misalnya, mulai menghilangkan menu pepes *sembukan* dari meja makan. Makanan yang dibuat dari daun *sembukan* dengan rasa dan bau yang khas dan menyengat ini hanya boleh untuk dikenang sebagai bagian dari masa lalu kepetaniannya.

Menu ini hanya pantas dihidangkan dalam suasana desa yang khas. Satu hal yang kelak juga dialami oleh salah seorang anaknya yang bergaji seratus sepuluh gulden. Tahu, tempe, pecel lele sudah tak lagi jadi daftar menu. Tempatnya telah tergantikan oleh *biefstuk, boter* dan *boterham.* Pun dengan pelekatan nama Sastro di depan nama kecilnya,
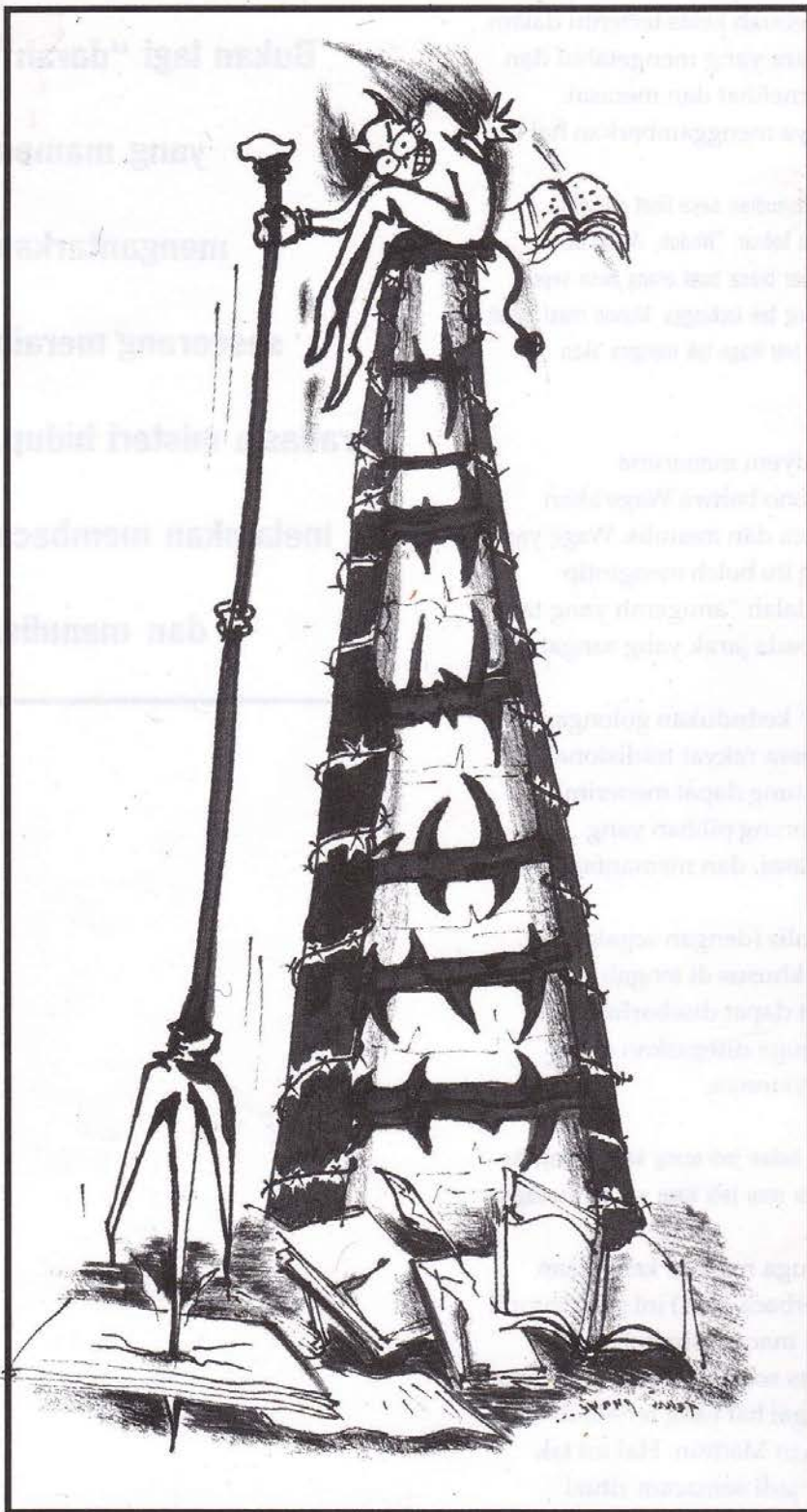
RETMINIAR
RETMINIAR/ UKM SENIRUPA UGM

Soedarsono.[18] Kepriyayian itu juga ditunjukkan dengan kamar-kamar pribadi dalam tata ruang bangunan rumahnya. Dan, alangkah terheran-herannya sang ibu yang petani melihat gaya hidup anak laki-lakinya yang priyayi ini.

"Kok kayak rumah *Londo* saja, kamarnya banyak!" [19]

Kembali menyitir Dhakidae,[20] inilah kekuasaan priyayi yang teraih bukan karena jadi tempat produksi modal. Kalaupun ada modal di sana, maka sifatnya lebih *dependent capital*—yang terutama ditandai oleh tingkat konsumsi daripada investasi. Keterpandangannya teraih karena "nasib baik" mengajarinya berbaca-tulis, berbudi bahasa. Pengetahuan yang membukakan rahasia penguasaan baginya, menjadikannya manusia "setengah dewa". Maka, akan mengherankan bila Sastrodarsono bersedia datang melayat jenasah seorang penjual tempe keliling, apalagi duduk mengobrol dengan orang desa yang bukan priyayi.

"Yang mengharukan bagi saya, *Ndoro* Guru *Kakung* kok ya masih mau duduk-duduk di situ mengobrol dengan orang-orang Desa Wanawalas. Bukankah dia itu priyayi yang terpandang? Dan dukuh kami itu tak ada seorang priyayi…"[21]

Simaklah percakapan antara Sastrodarsono dengan penduduk desa Wanawalas, ketika suatu hari ia berkeinginan mendirikan sekolah di desa yang terpencil dan hampir mati itu. Pertanyaan-pertanyaan diajukannya untuk menjajaki seberapa sadar dan kuat kemauan penduduk desa untuk mempunyai sekolah. Untuk mengalami dan mampu berbaca-tulis.

"Pak Dukuh, *sedulur-sedulur* semua saja."
"Inggih."
"Apa betul *Sampeyan* semua mau ada sekolah di sini?"
"Betuul, *Ndoro* Mantrii. Mauu."
"Lha, kalau sudah ada sekolah terus mau dibuat apa?"
Orang-orang desa itu tak menjawab serempak lagi. Kebanyakan malah saling berpandangan. Kemudian suara-suara kedengaran sendiri-sendiri.
"Buat belajar nulis, *Ndoro*."
"Buat belajar berhitung."
"Lha, kalau sudah bisa belajar menulis dan berhitung?"

Mereka berpandang-pandangan lagi. Kemudian ada yang menyeletuk.
"Kerja di kantor Kabupaten, *Ndoro*." [22]

Demikianlah pengalaman akan baca-tulis itu ditangkap dan dimaknai. Baca-tulis menjanjikan sebuah mobilitas sosial. Pengalaman yang mengubah Soedarsono—yang anak petani—jadi Sastrodarsono, sang *Ndoro* Guru. Hal yang sama pula yang mengubah Wage, si anak penjual tempe keliling, jadi Lantip, pegawai negeri dengan titel doktorandus.

Maka, percakapan tentang kebudayaan baca-tulis adalah juga perbincangan tentang akses. Tentang hak untuk jadi tahu, menafsir, dan untuk mempertanyakan ulang. Sesuatu yang tak menyenangkan bagi mereka yang karena telah terlebih dahulu "tahu" mampu melakukan penguasaan atas yang "tidak tahu" Maka, ketika di antara jaring kekuasaan kolonisasi, Sastrodarsono mecoba mencari celah untuk mendirikan sekolah bagi para penduduk desa, ia harus berhadapan dengan kemarahan Tuan *School Opziener* (Pengawas Sekolah).

"Tutuplah sekolahmu itu. Dan saya tidak akan mengutak-utik, apalagi melaporkan ke atasan tentang sekolahmu. Dan lagi, Mantri, kalau sekolahmu itu dilanjutkan, sesudah orang-orang dan anak-anak itu tahu baca, tulis, dan hitung, terus mau dipakai apa pengetahuan itu. Mereka *tokh* tidak bisa kemana-mana *saking* melaratnya." [23]

Meskipun Sastrodarsono tertunduk karena kejengkelan dan kesedihannya, namun sisi lain hatinya membenarkan kemarahan pengawas sekolah itu. Diam-diam, ia sering diserang kekhawatiran saat membayangkan bahwa baca-tulis yang dipelajari oleh orang-orang desa itu belum tentu berguna bagi mereka.

Seberapa berguna pengalaman dan kemampuan berbaca-tulis bagi penduduk desa itu nantinya sebenarnya bukanlah isu utama dalam penggalan ini. Persoalan sebenarnya adalah pembangkangan. Mendidik mereka sama artinya dengan menyerahkan sebagian dari kunci rahasia sebuah kekuasaan yang selama ini disembunyikan. Dan itu berarti menanam benih perlawanan. Maka, tak mengherankan bila partai politik yang pernah menjadi sangat besar dan berkuasa, Partai Komunis Indonesia (PKI), sangat menghitung penting program pemberantasan buta huruf dalam strategi aksinya.

Ketika kemudian partai ini dinyatakan terlarang, betapa mengejutkan hasil temuan dalam dukumen-dokumen mereka. Salah seorang akademisi yang ditugaskan untuk meneliti dokumen partai ini terkejut, betapa canggihnya laporan hasil *survey* yang diberikan oleh para kader PKI. Terlihat jelas dari tampilannya bahwa laporan itu ditulis oleh "hanya" seorang petani dengan sedikit kemampuan baca-tulis. Laporan mereka pun ditulis hanya dengan pensil dalam potongan kertas kotor. Namun tak bisa disangkal, dokumen itu menunjukkan adanya kemampuan analisis.[24]

Sekali lagi, temuan akademisi di atas membuktikan bahwa pernyataan keraguan akan "kegunaan" baca-tulis bagi mereka yang miskin jadi patut dipertanyakan. Walaupun tentu saja kaitan antara baca-tulis dan semangat mempertanyakan ulang tak selalu serta- merta terjadi, seseorang bisa saja berhenti dan telah merasa cukup dengan membaca. Mereka membunyikan simbol-simbol itu, tapi tidak untuk menafsirnya—apalagi mempertanyakan ulang.

Maka Sanikem, Nyai Tuan Belanda itu pun harus menegaskan pada Minke, menantunya: "Seluruh dunia kekuasaan memuji-muji yang kolonial. Yang tidak kolonial dianggap tak punya hak hidup, termasuk mamamu ini. Berjuta-juta umat manusia menderitakan tingkahnya dengan diam-diam seperti batu kali itu juga. Kau, Nak, paling sedikit harus bisa berteriak. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari..."[25] ❐

Catatan Akhir:

1 Ruth Havelaar, *Selamat Tinggal Indonesia: Kisah Seorang Perempuan Belanda*, Jakarta: Lentera, 1995.
2 *National Geographic*, Vol.196, No. 2, Agustus 1999.
3 Chaiwat Chatcharin dalam Benedict R. O'G Anderson, *In The Mirror: Literature and Politics in Siam in the American Era* (Bangkok: DK Book House, 1985).
4 *Ibid.*, hal. 197.
5 *Ibid.*, hal. 114—115.
6 Budi Susanto, "Spanduk Masih Orde Baru", dalam *Basis*, No. 05-06, tahun ke-49, Mei-Juni 2000.
7 Sumber dari 1.000 tahun sejarah kebudayaan baca-tulis Nusantara ini adalah Suplemen *Kompas,"* Menuju Millenium III", 1 Januari 2000.
8 Nancy K. Florida, "*Reading The Unread In Traditional Javanese Literature*", *Indonesia*,Vol. 44 , Oktober 1987.
9 Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia* (Jakarta: Hasta Mitra, 1981), hal. 2.
10 Minke menulis, "Berita-berita dari Eropa dan Amerika banyak mewartakan penemuan-penemuan terbaru. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa nenek moyangku dalam cerita wayang. Kereta api-kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau—belasan tahun telah disaksikan sebangsaku. Dan masih juga ada keheranan dalam hati sampai sekarang. Betawi-Surabaya telah dapat ditempuh dalam tiga hari. Dunia rasanya tiada berjarak lagi—telah dihilangkan oleh kawat. Kekuatan bukan lagi jadi monopoli gajah dan badak. Mereka telah digantikan oleh benda-benda kecil buatan manusia:

digantikan oleh benda-benda kecil buatan manusia: torak, sekrup dan mur...Orang malah sudah merancang akan terbang seperti Gatotkaca", *ibid.*, hal. 2–3.

[11] Karena membaca pulalah, Sanikem merasa dirinya jadi "lain". Itu terlihat dari apa yang ia katakan pada putrinya. "Ann, hampir setiap bulan datang kiriman buku dan majalah dari Nederland. Tuan suka membaca...aku pun suka membaca. Tak sebuah pun dari bacaannya berbahasa Melayu. Apalagi Jawa. Ya, Ann, Sanikem yang lama makin lama makin lenyap. Mama tumbuh jadi pribadi baru dengan penglihatan dan pandangan baru. Rasanya aku bukan budak yang dijual di Tulangan beberapa tahun yang lalu. Rasanya aku tak punya masa lalu lagi. Kadang aku bertanya pada diri sendiri: adakah aku sudah jadi wanita Belanda berkulit coklat? Aku tak berani menjawab, sekalipun dapat kulihat betapa terbelakangnya Pribumi sekeliling...Pernah aku tanyakan padanya, apa wanita Eropa diajar sebagaimana aku diajar sekarang ini? Tahu kau jawabannya? "Kau lebih mampu daripada rata-rata mereka, apalagi yang peranakan" Ah, betapa bahagia dengannya...", *ibid.*, hal. 84.

[12] Daniel Dhakidae dalam Aprinus Salam, *Umar Kayam dan Jaring Semiotik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 6–7.

[13] Kuntowijoyo, *ibid.*, hal. 19.

[14] Umar Kayam, *Para Priyayi: Sebuah Novel* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 20.

[15] Takut "jarak" itu akan menelan anaknya hingga ia—yang hanya penjual tempe—tak lagi dapat menyentuhnya. Ngadiyem pun berpesan, "Tahu dirilah kamu *Le*," pesan Embok itu. "Kamu itu tetap anak *bakul* tempe...meski namamu sekarang Lantip dan tinggal di Setenan". Pesan ini serupa dengan pesan yang diterima Sastrodarsono dari ayahnya di masa awal "karir" kepriyayiannya. "Kau tahu, *Le*. Ini langkah yang sangat penting dalam hidupmu. Kau mulai masuk dalam kalangan priyayi. Kau bukan petani lagi. Diingat-ingat itu, *Le*. Duniamu mulai sekarang akan lain. Tahulah membawa diri dalam duniamu yang baru itu...Jalan menuju dunia priyayi sekarang ada didepanmu, *Le*.", *ibid.*, hal. 38.

[16] Ben Anderson dalam "Cerdik-Cendekia di Indonesia: Nasib atau Kecerdasan", dalam *Berita Lembaga Studi Realino*, No. 7, Juli 1994.

[17] Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hal. 48.

[18] Dalam tradisi Jawa, nama Sastro hanya boleh disandang oleh mereka yang berprofesi sebagai guru, juru tulis, atau pekerja-pekerja yang menuntut "kehalusan" lainnya.

[19] Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hal. 59.

[20] *Op. cit.* 10, hal. 8.

[21] *Op. cit.* 11, hal.27–28.

[22] *Ibid.*, hal. 104.

[23] *Ibid.*, hal. 109.

[24] Ruth McVey, "*Teaching Modernity: The PKI As An Educational Institution*", dalam *Indonesia*, 1990.

[25] Pramoedya Ananta Toer, *Anak Semua Bangsa* (Jakarta: Hasta Mitra, 1981), hal. 75.

ALAT CETAK

Orang menganggap Johannes Gutenberg dari Mainz, Jerman, adalah manusia pertama yang menemukan mesin cetak. Tepatnya tahun 1440. Tak banyak yang tahu bahwa teknik telah lama digunakan di Asia, terutama Cina dan Korea. Diperkirakan teknik cetak sudah ditemukan sejak tahun 105 Masehi di Asia.

Mesin cetak pertama di Cina teknik operasinya sederhana. Mula-mula teks yang terdiri dari gambar dan tulisan diukir pada stempel—bisa berupa kepingan papan, logam, atau tanah liat. Selanjutnya, stempel itu dilapisi tinta, ditumpangi selembar kertas lalu ditekan rata sehingga tinta berpindah dari stempel ke kertas.

Sementara itu, mesin Gutenberg lebih "modern". Teknologi bawaan penganut Kristen taat itu menggunakan huruf tunggal yang bisa disusun jadi kata dan kalimat. Huruf itu dapat dipakai untuk mencetak ulang. Mesin ini dibuat berdasar alat pemeras buah-buahan. Pembawa huruf atau gambar yang disebut acuan cetak itu lebih menonjol dari bagian yang tak tercetak. Mirip cara kerja mesin ketik. Untuk mendapat hasil cetakan, tulisan atau gambar diberi tinta dengan tampon—sekarang rol tinta. Lalu, lembaran kertas diletakkan di atasnya dan ditekan rata.

Mesin cetak Gutenberg disempurnakan Friederich Koning , pada tahun 1812. Ia menciptakan mesin cetak kecepatan tinggi. Kemampuan mesin ini bisa mencetak 12 buku dalam waktu 12 jam.

MARI BERPIKIR SEDERHANA.

Hidup sehari-sehari saja sudah rumit.

Apalagi kalau harus ikut mikirin negara.
Jika kita membaca media mahasiswa:
masalah sederhana jadi kelihatan lebih rumit dari aslinya.

Nah, sekarang saatnya mencari bacaan alternatif.
Bacaan yang bikin kita berpikir positif.
Bacaan yang memetakan masalah secara sederhana,
tak bakal bikin pecah batok kepala.
Ya, karena selalu ada pernik unik di balik hal-hal pelik...

Sekarang, sudah tahu jawabannya 'kan?

PERINGATAN PENERBIT:
KALAUPUN SESEKALI ANDA PERLU **MEMBUKA KAMUS**, PERCAYALAH: INI DALAM RANGKA **PENGAYAAN KOSA KATA.**

KINOY GAULABIS

SKETSA PENERBIT DAN PERCETAKAN PERGURUAN TINGGI[1] DI INDONESIA

Luqman Hakim Arifin

Alumni Pondok Modern "Darussalam" Gontor, Ponorogo (1996). Pernah menjadi Ketua Presidium Forum Perhimpunan Santri Pesantren Mahasiswa Yogyakarta (1997/1998), pernah menjabat Pemimpin Redaksi BALAIRUNG (1999/200), aktif di berbagai kelompok studi dan gerakan mahasiswa. Saat ini tengah menyelesaikan studi sarjananya di Fak. Filsafat UGM.

Sejak awal kemunculannya di akhir 1960-an, Penerbit dan Percetakan Perguruan Tinggi (P3T), hingga sekarang dapat dikatakan belum mampu memanfaatkan kesempatan dan posisinya dengan lebih optimal. Dalam banyak hal, baik sebagai *lembaga bisnis* yang berorientasi profit, maupun sebagai *lembaga pendidikan* yang berorientasi pengembangan ilmu pengetahuan, P3T kiranya harus banyak berbenah diri dan melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai penerbit dan percetakan umum.

Hal ini tentunya patut disayangkan. Karena, posisi P3T sangatlah strategis. Lembaga penerbitan universitas berpeluang besar menjadi pelopor perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di Indonesia. Pun, dalam rangka mengikis pesimisme masyarakat—terhadap dunia Perguruan Tinggi, dalam tugasnya melahirkan intelektual yang manusiawi yang mampu berpikir sekaligus bekerja—yang sudah telanjur melumut.

Barangkali banyak orang tak bisa menerima kenyataan di atas. Bolehlah. Tapi bagaimanapun, hal ini memang harus penulis tandaskan di awal. *Booming* penerbitan buku akhir-akhir ini, yang melahirkan persaingan bisnis yang lebih liberal dan kompetitif, mau tidak mau memaksa siapapun yang peduli untuk segera membangungkan P3T dari "tidur panjang"-nya.

Tulisan ini pada dasarnya adalah langkah awal yang diharap dapat merangsang munculnya penelitian-penelitian sejenis di tanah air. Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang secara khusus memotret kondisi P3T belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian tentang dunia penerbitan dan percetakan Indonesia yang pernah dilakukan masih bersifat umum. Salah satunya dilakukan Eduard Kimman (1981) melalui buku berjudul, *Indonesia Publishing: Economic Organization in a langganan society*.

Hal ini memunculkan beberapa kesulitan dalam penyusunan tulisan ini—karena itu, penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam tulisan ini. Kesulitan paling besar adalah melacak keseluruhan (proses) sejarah dan keberadaan P3T di Indonesia. Lemahnya sistem informasi (*recording* dan *reporting*) yang kita miliki benar-benar menjadikan penyusunan tulisan ini tidak gampang.

Ini memang ironis. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) misalnya, sebagai institusi yang seharusnya *concern* terhadap masalah ini, ternyata tak dapat berbuat banyak atas problem informasi ini. Lebih menyedihkan lagi, penerbit-penerbit universitas sendiri dihantui oleh domkumentasi yang buruk. Kesulitan lain adalah sulitnya mendapatkan "rahasia-rahasia dapur" setiap P3T karena beberapa alasan.

Maka, karena khawatir terjebak pada generalisasi yang tidak tepat, dalam penyusunannya, tulisan ini benar-benar bertitik tolak pada *sedikit* data yang didapat dari observasi sederhana terhadap tiga P3T dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan (selanjutnya disingkat empat P3T). Lima penerbit-penerbit universitas itu yaitu: (1) Airlangga University Press (AUP), Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, (2) Gadjah Mada University Press (Gama Press), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, (3) IKIP Semarang Press, Universitas Negeri Semarang (Unes), Semarang, dan (4) UPT Penerbitan Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Itulah objek material tulisan ini, yang selanjutnya coba diinterpretasikan dengan bantuan beberapa literatur terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pegiat-pegiat P3T tersebut. Lebih lanjut, tulisan ini akan membahas tentang sekilas sejarah kemunculan P3T di Indonesia, agenda utama, pemetaan problematika, dan sedikit tatapan masa depannya.

Selintas Sejarah P3T di Indonesia

Kemunculan P3T bisa dibilang agak terlambat dibanding induk semangnya, perguruan-perguruan tinggi Indonesia. Penerbit universitas biasanya baru muncul setelah 25 sampai 35 tahun berdirinya perguruan tinggi yang menaunginya.Misalnya Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Perguruan tinggi pertama di Indonesia yang didirikan tahun 1945 ini, baru mempunyai P3T bernama UII Press tahun 1992. Itu artinya, UII harus menunggu 47 tahun. Begitu pula UGM. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Indonesia[2] ini baru memiliki P3T tahun 1971. Atau, 22 tahun setelah UGM didirikan tahun 1949.

Sebaliknya, Universitas Indonesia (UI), yang berdiri tahun 1950, justru menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang punya P3T. UI mendirikan Universitas Indonesia Press (UIP) tahun 1969, berbarengan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Jika kelahiran UIP disokong dana dari *Ford Foundation*, maka kemunculan Penerbit IPB didukung Kenctucky University. Sayangnya, beberapa kalangan menilai, baik UIP maupun Penerbit IPB tak cukup berhasil pada proses awal pengembangannya.[3]

Generasi kedua adalah P3T yang didirikan serentak di lima perguruan tinggi negeri yaitu, 1) Gadjah Mada University Press (Gama Press) UGM, 2) Airlangga University Press (AUP) Unair, 3) Penerbit ITB Bandung, 4) Lembaga Penerbitan Hasanuddin (LPH) Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, dan 5) IKIP Semarang Press Universitas Negeri Semarang (Unes). Kelima P3T yang serentak didirikan tahun 1971 tersebut didanai sepenuhnya oleh pemerintah Belanda.[4] Setelah itu, menyusul

Univeritas Syah Kuala Aceh, IKIP Padang, Universitas Andalas Padang, Universitas Sumatra Utara, Universitas Sebelas Maret Solo, Universitas Brawijaya Malang, atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya.[5]

Pembagian secara kronologis ini diakui tidak sepenuhnya tepat guna menggambarkan keseluruhan fakta historis tentang P3T. Sebab, selain di PTN-PTN, P3T juga berkembang di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Apalagi akhir-akhir ini, P3T seperti Penerbit STIE YKPN Yogyakarta, untuk menyebut sebuah nama, adalah salah satu P3T dari PTS yang mampu memberi warna tersendiri bagi dunia P3T Indonesia. Data yang lebih lengkap tentang jumlah P3T di Indonesia, baik dari PTN maupun PTS, kiranya perlu dikembangkan lagi.

Meski P3T di Indonesia (khususnya dari PTN-PTN itu) baru muncul akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, tapi sebenarnya fungsi penerbitan dan percetakan sudah ada sejak sebuah Perguruan Tinggi berdiri. Penerbitan dan percetakan biasanya diatur di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum (BAU). Contohnya adalah UPT Penerbitan ITS, atau Gama Press sebelum tahun 1971. Tak heran, jika sampai sekarang, 18 dari 41 karyawan Gama Press adalah Pengawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, dulunya mereka adalah staf BAU yang dipindahtugaskan ke Gama Press pada awal pendiriannya. Sampai sekarang, masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum memiliki P3T sendiri. Tapi, fungsi penerbitan dan percetakannya tetap ada di bawah BAU.

Kembali kepada sejarah kemunculan P3T di Indonesia. Apa yang mendorong berdirinya P3T generasi pertama dan kedua dapat ditegaskan pada dua hal. Yaitu, di satu sisi, keresahan yang muncul terhadap kondisi sosial-pendidikan Indonesia pada waktu itu, dan terhadap dunia perbukuan dan penerbitan Indonesia di sisi lain.

Mulai dari masyarakat yang masih berpendidikan rendah, masalah tingginya angka buta huruf, sampai pada minimnya buku yang beredar—sebab jumlah penerbit dan percetakan yang sedikit, semua bercampur dalam satu keinginan: meletakkan Perguruan Tinggi jadi institusi yang mandiri dan mampu mempercepat perubahan. Dari situlah, ide untuk memiliki penerbit dan percetakan sendiri menjadi makin kuat.

Mengapa Pemerintah Belanda memberi bantuan berupa mesin cetak? Tampaknya hal ini tak lepas dari pertimbangan jangka panjang. Berpijak pada filosofi "lebih baik memberi kail daripada selalu memberi ikan", pilihan membelikan mesin cetak, bagi Pemerintah Belanda, jelas lebih berguna dibanding dengan memberi buku atau mengucurkan uang bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh sumbangan Pemerintah Belanda yang tidak hanya berhenti pada pembelian mesin cetak. Para pegiat P3T generasi kedua juga mendapatkan pelatihan di Pusat Grafika Indonesia di Jakarta. Sedangkan, para calon direkturnya diberi kursus *Printing* dan *Publishing Management* di Belanda.[6]

Permasalahan P3T dan Agenda Utamanya

Membandingkan kondisi P3T di Indonesia dengan P3T di Barat (Baca: *University Press* Eropa dan Amerika Serikat), dalam kerangka "mana yang lebih baik dan lebih buruk", tentu saja kurang tepat—selain juga sangat keterlaluan! Sebab, jangankan membandingkan P3T di Barat dengan P3T di Indonesia, dengan penerbit dan percetakan swasta yang paling besar di Indonesia sekalipun, niscaya dunia penerbitan dan percetakan kita belum ada apa-apanya.

Ada fakta historis yang harus kita terima dan kita akui di sini. Kondisi P3T yang tak cukup menggembirakan itu tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mendukungnya. Mulai dari masalah jarak waktu kemunculan, kultur masyarakat, kemajuan teknologi, sampai kualitas SDM yang ada. Semua seyogianya dilihat sebagai garis lingkaran yang tak terpisahkan dalam memahami kemajuan yang dicapai Barat. Di situlah perbedaan itu makin nyata, dan upaya membanding-bandingkan itu, jika tidak diletakkan pada tempatnya, kiranya hanya memunculkan perasaan inferior belaka.

Namun demikian, bukan berarti upaya membandingkan-bandingkan tak ada manfaatnya. Dari proses komparasi tersebut, kita sebenarnya bisa tahu, misalnya, letak kelemahan, kekuatan dan peluang P3T di tengah percaturan dunia penerbitan dan percetakan dunia. Pun, kita juga sebenarnya dapat merumuskan agenda-agenda penting yang harus dilakukan P3T untuk bisa berdiri sejajar dengan, paling tidak, penerbit umum—yang dalam beberapa segi, selangkah lebih maju.

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut tentang jarak waktu antara dunia penerbitan dan percetakan kita dengan Barat. Lebih menarik lagi, jika penelusuran ini dilakukan sembari membaca buku *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid III)* karya Denys Lombard (Jakarta: Gramedia, 1990).

Tahun 1534, kurang lebih satu abad setelah mesin cetak pertama kali dibuat Johann Gutenberg tahun 1430-an,[7] penerbit dan percetakan universitas tertua di dunia, Cambridge University Press, didirikan. Sementara itu, jauh di seberang, pada saat yang bersamaan, bangsa kita ternyata masih bergulat dengan kemelut horisontal antaragama, perang kerajaan, dengan titik fokus pada peralihan kekuasaan Majapahit yang Hindu ke Demak yang

Islam (Abad XV—XVI). Pada saat itu, jangankan menemukan buku yang tercetak, sementara teknologi kertas mungkin belum ditemukan, tepatnya belum masuk. Tulisan masih ditera pada lontar yang tentunya tidak dijilid, tapi dirangkai. Atau, paling mujur ditulis di lembaran kulit yang dihaluskan. Selebihnya, bahkan ditulis secara litograf (digurat pada batu atau logam).

Juga, saat Cornell University Press, P3T tertua di Amerika Serikat didirikan tahun 1869, bangsa Indonesia ternyata belum memiliki satu pun penerbit dan percetakan yang dikelola oleh Bumiputra—meski menurut Johannes Nieuhoff, seseorang yang hidup di Batavia antara tahun 1667—1670, mesin cetak sudah datang di Indonesia tahun 1659.[8] Mesin cetak pertama yang dimiliki pribumi—bagi yang masih peduli dengan istilah "asing" dan "bumiputra"—baru dicatat pada tahun 1912. Institusi yang memilikinya adalah *NV. Javaansche Boekhandel en Drukkerijen handel in schrijfbehoeften* "Medan Prijaji", yang didirikan oleh Tirtoadhisoerjo bekerja sama dengan H.M. Arsad dan Pangeran Oesman untuk menerbitkan surat kabar *Medan Prijaji.*[9]

Sementara, penerbit (suratkabar, dan bukan penerbit buku!) pertama bumiputra baru ada tahun 1903 saat Tirtoadhisoerjo mendirikan *Soenda Berita.*[10] Sebelum itu, baik dunia percetakan maupun penerbitan, keduanya masih dikuasai orang-orang Belanda, Indo, atau Tionghoa.

TITIK

Agar tulisan ini tidak semakin melebar, apa yang ingin penulis tegaskan di sini sebenarnya adalah kebutuhan mendesak kita untuk segera membuat semacam pemetaan masalah yang komprehensif terhadap dunia P3T di Indonesia, perencanaan strategis (*strategic planning*) sekaligus alternatif solusinya. Inilah langkah awal sekaligus agenda utama untuk memperbaiki dan memajukembangkan dunia P3T.

Dari sini, diharapkan muncul pandangan yang lebih holistik mengenai proses artikulasi visi-misi P3T sebagai lembaga keilmuan sekaligus lembaga bisnis, serta berbagai perkembangan teknologi yang melingkupinya, dapat dijalankan lebih efisien. Penjelasan lebih lanjut hal ini akan dijelaskan di akhir tulisan.

Sekarang, kita akan bertamasya ke empat P3T (Airlangga University Press, IKIP Semarang Press, UPT Penerbitan ITS, dan Gama Press) yang menjadi objek penelitian tulisan ini. Seperti dijelaskan di awal, empat P3T tersebut akan digunakan untuk mencoba menggambarkan kondisi terakhir dunia P3T di Indonesia, serta problem-problem pokok yang melingkupinya.

A. Airlangga University Press (AUP)

Terletak di kampus C Unair, P3T yang berdiri tahun 1971 ini memiliki kantor yang lumayan besar: dua lantai dengan halaman depan yang luas. Tapi sayangnya, prestasi AUP ternyata tidak semegah kantornya. Paling tidak untuk saat ini, berbagai masalah yang melingkupinya seakan menujukkan bahwa AUP sedang "tidak sehat".

Ada tiga pokok persoalan yang dihadapi AUP. Pertama, buruknya sistem manajemen AUP, khususnya pada bidang *recording* dan *reporting*-nya. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya data yang ada. Mulai dari laporan jumlah buku yang diterbitkan, daftar judul (sebelum tahun 1999), jumlah buku yang terjual, daerah distribusi, sampai sejarah AUP sendiri.

Ketidakjelasan ini dalam pandangan Dr. Arifzan Razak, drg., MSc., Direktur AUP, tidak bisa dilepaskan dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di AUP. Dengan jumlah karyawan sebanyak 42 orang, persoalan seperti keterlambatan datang kerja atau sikap bermalas-malasan dalam bekerja ternyata masih menjadi masalah besar di AUP. Tentu saja, seharusnya AUP telah bebas dari masalah-masalah tersebut. Tapi, itulah persoalan kedua AUP.

Bagi Arifzan, masalah produktivitas AUP akan lebih mudah ditingkatkan jika persoalan manajemen dan SDM beres. Saat ini, sejak tahun 1999, produktivtas AUP masih sangat rendah. Tahun 1999, AUP hanya berhasil menerbitkan 18 judul buku termasuk yang cetak ulang. Sedang pada tahun 2000, AUP berhasil menerbitkan 27 judul.

Persoalan ketiga adalah masalah finansial. Hal inilah yang sebenarnya paling penting dan akut, karena berkait langsung dengan modal untuk mengembangkan AUP. Dengan bentuknya saat ini (yayasan), AUP sebenarnya memiliki peluang besar untuk maju. Hanya yang perlu diingat Arifzan, atau siapapun nantinya yang menjadi direktur AUP, bahwa ia tidak bisa terus-terusan ber-*one man show*. Ia dan AUP harus memiliki tim yang solid dan agresif.

Kondisi P3T yang tak cukup menggembirakan itu tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mendukungnya. Mulai dari masalah jarak waktu kemunculan, kultur masyarakat, kemajuan teknologi, sampai kualitas SDM yang ada.

B. IKIP Semarang Press

Entah mengapa namanya belum diubah, sedang nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang sendiri saat ini sudah diganti menjadi Universitas Negeri Semarang (Unes). Perubahan yang terjadi justru pada bentuk kelembagaannya. IKIP Semarang Press saat ini sudah berbadan hukum menjadi CV. Dengan bentuk ini, gerak IKIP Semarang Press diharapkan dapat lebih mudah dan lincah dalam berbisnis.

Didirikan sejak tahun 1971, dengan Prof. Dr. Umar Syahman sebagai direktur pertamanya, persoalan IKIP Semarang Press saat ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan AUP: produktivitas rendah atau modal tipis. Setiap tahunnya, IKIP Semarang Press rata-rata hanya berhasil menerbitkan 10 sampai 20 judul buku.

Menyikapi hal ini, IKIP Semarang Press sering "keluar" untuk mencari order percetakan. Hal ini tanpa sungkan-sungkan diakui Drs. H. Noerhadi Achmad, sang direktur yang diangkat sejak tahun 1997. Bahkan, pernah suatu kali Noerhadi bertemu dalam satu kantor pemerintah dengan penerbit swasta yang juga mencari order. Namun demikian, buru-buru juga ditegaskan Noerhadi, prioritas IKIP Semarang Press tetap 65% untuk kepentingan Unes, sisanya baru untuk luar.

Anehnya, upaya berburu order ke luar tersebut tidak dipraktekkan dalam upaya "berburu naskah" guna meningkatkan jumlah buku yang diterbitkan. Sikap "menunggu bola" inilah salah satu persoalan akut yang melanda kebanyakan P3T Indonesia, termasuk IKIP Semarang

Press.

C. Gadjah Mada Univeristy Press (Gama Press)

Dibandingkan dua P3T dan UPT Penerbitan sebelumnya, Gama Press dapat dikatakan paling produktif dan mapan. Bahkan menurut Arifzan, Direktur AUP, Gama Press juga dapat disebut sebagai P3T paling besar dibanding P3T lainnya di Indonesia.

Benar tidaknya pendapat Arifzan memang masih bisa diperdebatkan. Namun demikian, Drs. M. Munandar, Direktur Gama Press saat ini, punya cerita tersendiri mengapa ia mengiyakan anggapan tersebut. Saat ada proyek penerjemahan dari Bank Dunia tahun 1995, di antara P3T yang ikut dalam proyek itu, Gama Press-lah yang menerima jatah paling banyak: 40 buku dari 90 buku yang ditawarkan. Jumlah itu membengkak ketika Gama Press dapat tambahan 12 buku lagi.

Sebaliknya, IKIP Semarang Press, misalnya, hanya mendapatkan kira-kira 2 buku saja, sedangkan P3T lainnya kurang lebih hanya mendapatkan 4 sampai 6 buku. Bagi Munandar, kepercayaan Bank Dunia tersebut adalah salah satu bukti bahwa Gama Press (dianggap) besar.

Lumayan menggembirakan memang. Didirikan tahun 1971, dengan direktur pertamanya HJ. Kusumanto (1971-1987), dalam kaca mata Munandar, Gama Press saat ini tak memiliki persoalan yang berarti seperti dihadapi banyak P3T lainnya. Tapi benarkah demikian?

Sebelumnya, menarik untuk mencermati sikap Gama Press dalam menjalankan usahanya. Bagi Gama Press, dalam berbisnis tidak sekadar mengejar keuntungan semata-mata. Ini ditunjukan oleh Gama Press dari ideologi penerbitannya. Buku-buku seperti *Kamus Basa Kawi*—yang secara keilmuan dianggap penting dan perlu dilestarikan, meski tidak *profitable*, tetap diterbitkan. Gama Press, dalam hal ini mencoba untuk konsisten dengan ideologi awal pendiriannya, yakni mengembangkan dan melestarikan setiap cabang ilmu pengetahuan yang ada di UGM. Ditempuhnya subsidi silang menjadikan "proyek idealis" ini dapat teratasi.

Lalu apa persoalan Gama Press saat ini? Jika diperhatikan lebih dalam, Gama Press sebenarnya menghadapi persoalan yang tak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi AUP atau IKIP Semarang Press. Terbit rata-rata 50-60 buku setiap tahunnya, tentu merupakan jumlah yang masih kecil, paling tidak jika dibanding dengan dunia penerbitan swasta.

Yang agak aneh, mengapa penulis-penulis produktif dari UGM, seperti Kuntowijoyo, Ashadi Siregar, Faruk, dan masih banyak lainnnya, tidak masuk daftar penulis yang bukunya diterbikan Gama Press? Apakah kecilnya royalti yang diberikan kepada penulis menjadi hambatan? Padahal, jika dibandingkan dengan royalti penerbit umum yang hanya 7% sampai 12%, royalti di Gama Press lebih besar: mencapai 15%.

Bisa jadi, di sinilah letak persoalan Gama Press selanjutnya. Ia kalah agresif dengan penerbitan umum dalam memburu naskah. Jika di sini masalahnya, Gama Press harus lebih lincah, agar bisa bersaing dengan penerbitan umum yang memang sedang marak. Persoalan lain adalah mutu tata letak dan cover buku-buku Gama Press yang dinilai kaku dan konvensional.

D. UPT Penerbitan ITS

Dibandingkan dengan kantor AUP atau Gama Press, kantor UPT Penerbitan ITS barangkali paling sederhana. Ia hanya terdiri dua ruang, satu untuk mesin sekaligus ruang kerja, satu lagi untuk digunakan sebagai kantor administrasi. Kondisi selain itu, bahkan lebih "sederhana" lagi. Dibandingkan tiga P3T di atas, dalam banyak segi, UPT Penerbitan ITS jelas jauh tertinggal.

Sejak didirikan tahun 1984, dengan nama UPT Percetakan, lalu diganti menjadi UPT Penerbitan tahun 1989 hingga sekarang, UPT Penerbitan ITS belum pernah sekalipun menerbitkan buku dalam arti yang sesungguhnya. Di sinilah anehnya. UPT Penerbitan ITS lebih berfungsi sebagai UPT Percetakan, meski namanya UPT Penerbitan ITS. Dalam beberapa hal, UPT Penerbitan ITS bahkan tak ubahnya "bemper" pihak rektorat untuk mencetak segala sesuatu dalam waktu cepat dan tepat. Parahnya kondisi UPT Penerbitan ITS bisa juga dilihat dari karyawannya yang minim: cuma 8 orang!

Untungnya hal ini disadari sepenuhnya oleh Ir. Bambang Adhi Marsono, Direktur UPT Penerbitan ITS, yang diangkat sejak tahun 1996. Ada beberapa sebab mengapa kondisi sedemikian rupa. Tapi yang paling mendasar tampaknya adalah tak adanya keseriusan civitas akademika ITS sendiri, khususnya pihak rektorat ITS.

Jika masalah ini teratasi, UPT Penerbit ITS besar kemungkinan dapat setara dengan keberadaan P3T lain yang telah mandiri dan otonom. Sebab, sampai saat ini UPT Penerbitan ITS—seperti dapat dibaca dari namanya—masih di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum (BAU). Persoalan lain yang juga menghambat adalah kepemimpinan (direktur) lembaga yang sering berganti seiring dengan pergantian jabatan rektor.

Begitulah. Tentu saja masih banyak yang belum terungkap. Oleh karena itu, selanjutnya penulis ingin bercerita tentang dua peristiwa sepele

yang semoga dapat memberikan gambaran lebih jauh betapa pada hal yang paling sederhana sekalipun, dunia P3T di Indonesia sebenarnya didera persoalan serius.

Peristiwa pertama terjadi setelah selesai wawancara. Seorang direktur P3T, berusia sekitar 60-an tahun, memberikan kartu namanya. Tapi, karena melihat kekurangan pada kartu namanya tersebut, sebelum undur diri, penulis sempatkan bertanya kepada direktur yang ramah tersebut. "Pak, *e-mail*-nya mana?" tanya penulis sambil mengira-ngira kemungkinan *e-mail*-nya lupa dicantumkan atau tidak tercetak di kartu namanya.

Tapi dugaan penulis ternyata meleset. "Wah, saya *nggak* punya, Mas," jawabnya mengakui kalau ia memang tidak memiliki *e-mail*. Mendengar itu penulis terdiam. Dalam hati, penulis hanya bisa berkomentar, "Tidakkah sebelumnya kita telah berbincang panjang lebar tentang visi-misi P3T, distribusi, *well-communication*, dsb. Tapi mengapa hanya *e-mail*—sesuatu yang sangat sederhana untuk zaman kita saat ini—seorang direktur P3T tidak memilikinya?"

Peristiwa kedua, juga saat wawancara dengan seorang direktur yang uzur, tapi semangatnya luar biasa. Mulanya, wawancara berjalan lancar, berbagai pertanyaan dijawabnya dengan tangkas. Tetapi, di bagian akhir, tiba-tiba yang terjadi jusru sebaliknya. Penulis yang—kebetulan bersama seorang teman—justru balik diwawancarai perihal penerbitan di Yogyakarta. Mulai dari ongkos penerjemahan, sistem kontrak dengan penulis, sampai persoalan distribusi di toko-toko buku terkenal di Yogyakarta.

Penulis tidak menangkap wajah menguji di sana. Wajah itu benar-benar ingin tahu tentang perubahan paling akhir dunia penerbitan yang begitu cepat, khususnya di Yogyakarta. Dan sekali lagi penulis terdiam. Bagaimana mungkin seorang direktur P3T tidak mengetahui perubahan tentang hal-hal semacam itu? Sungguh ironis dan mengkhawatirkan.

Dari paparan panjang di atas, secara umum dapat disimpulkan, ada tiga pokok persoalan yang dihadapi dunia P3T Indonesia saat ini. Pertama, tentang buruknya sistem manajemen yang diterapkan. Ini bisa berupa direktur yang bekerja *one man show*, sistem penyimpanan data yang tidak lengkap dan kurang tertata rapi, sampai pada persoalan kecenderungan pergantian direktur lembaga ikut pergantian rektor. Juga, kegiatan-kegiatan non-penerbitan yang jarang dilakukan yang seharusnya mendukung produktivitas P3T. Mulai dari pengadaan *workshop*, bedah buku, lomba resensi atau menulis artikel, atau sekadar promosi hasil produksi melalui media massa. Semuanya jarang dilakukan.

Persoalan kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas P3T. Seringkali masalah minimnya modal, sedikitnya royalti, sampai masalah rendahnya kuantitas dan kualitas SDM, dijadikan "kambing hitam" kondisi ini. Padahal, kuantitas karyawan tak selalu berkorelasi positif dengan produktivitas lembaga. Beberapa penerbit umum, seperti Bentang Budaya Yogyakarta, meski hanya dengan 17 karyawan, mampu menerbitkan 30-40 buku pertahunnya.

Jadi, persoalannya sebenarnya lebih terletak pada tingkat keseriusan dan totalitas penggarapan P3T sebagai lembaga bisnis. Peningkatan produktivitas penerbitan, dengan berburu naskah dari penulis misalnya, harus diakui jarang dilakukan oleh kebanyakan P3T. Demikian pula upaya-upaya kerja sama dalam rangka meningkat produktivitas penerbitan, misalnya dengan LSM atau dengan donatur luar negeri.

Persoalan ketiga bersifat lebih abstrak, yaitu visi-misi P3T sebagai lembaga bisnis yang muncul dari dunia kampus sering tidak jelas. Beberapa tampak mencoba untuk konsisten dengan kekhasannya, mencoba untuk bertarik ulur dengan kepentingan bisnis dan kepentingan ilmiah. Tapi, iklim itu tak cukup tertular pada sebagian P3T yang lain.

Tatapan Masa Depan

Stewart Alsop, kolumnis tetap majalah bisnis terkenal *Fortune*, dalam artikelnya berjudul "Alsop to Publishers: Wake Up!" (*Fortune*, 29 September 1991), mengritik dengan keras keberadaan penerbit dunia. Menurutnya, para penerbit seperti siput yang lamban, yang terlalu terpaku pada persoalan-persoalan "katak dalam tempurung"—konsolidasi perusahaan, berubahnya saluran distribusi, merosotnya penjualan, dsb. Padahal, "di luar tempurung", terhampar peluang besar dengan memanfaatkan dunia internet untuk membentuk cara interaksi baru antara pengarah, penerbit dan pembaca. Amazon.com atau Bookwire.com adalah beberapa contoh dari mereka mampu memanfaatkan penjualan buku lewat Internet.[11]

Kritik dan himbauan Alsop ini tentu tak main-main. Lebih umum lagi adalah Dick Brass, Wakil Direktur Pengembangan Teknologi Microsoft. Ia mengatakan, "Kita sedang di tepian perubahan yang fundamental," tegasnya tentang perubahan drastis dunia penerbitan buku.[12]

Sangat provokatif dan menakjubkan memang, jika uraian seperti ini dilanjutkan. Sebuah buku, saat ini dan nanti, kiranya tak lagi hanya didefinisikan sebagai kumpulan kertas tercetak dengan cover terjilid. Dunia elektronik telah membuktikan, sebuah buku juga merupakan rekaman gagasan di atas pita-pita kaset (buku *audio*) yang dapat didengarkan kapan dan dimana saja.
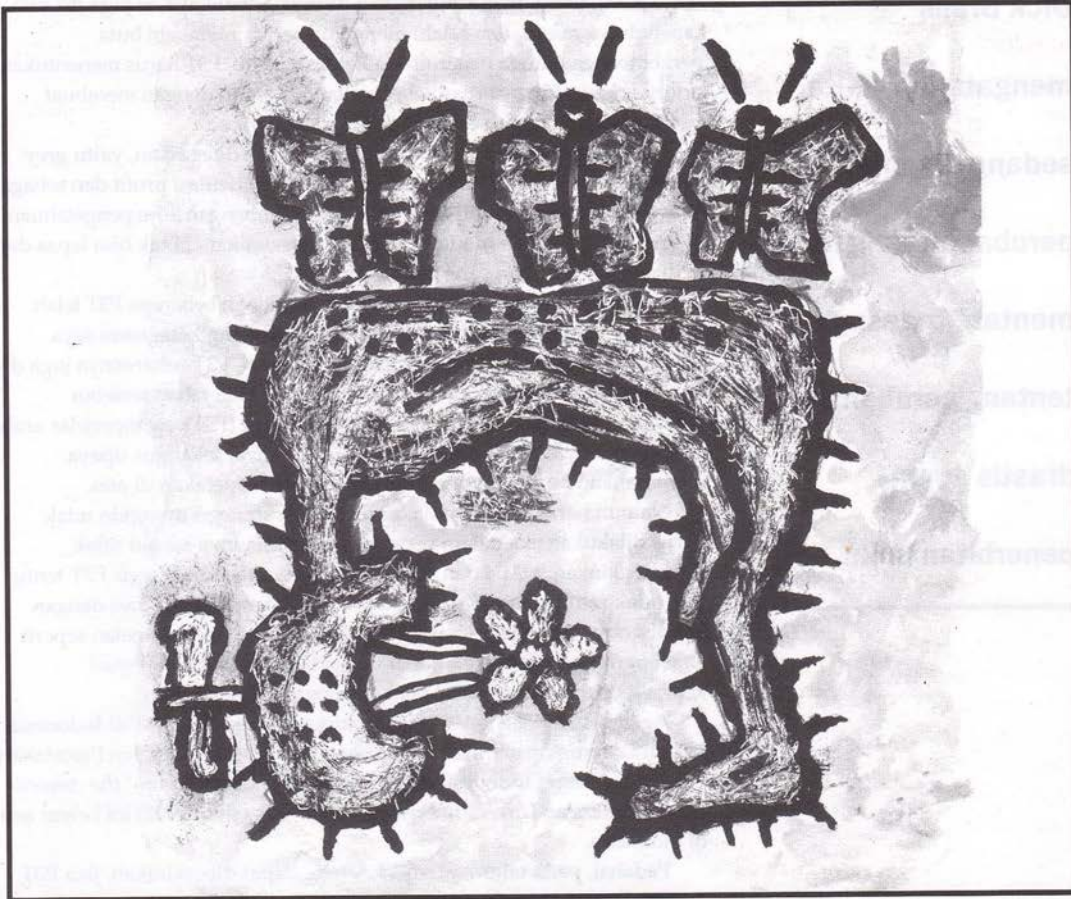
KATAMORGANA. TITIK

Pun dunia mayantara, telah menunjukkan bahwa sebuah buku juga merupakan tayangan tulisan di layar-layar komputer—yang didigitalkan, dengan bentuk yang senyaman membaca buku biasa (buku *audible* atau buku *elektronik*). Lihatlah buku-buku elektrnonik (buku *e*) generasi baru yang beredar saat ini: *Rocker e-Book* buatan Nuvo Media, *Soft Book* buatan Soft Book Press, *Everybook*, atau *Microsoft Reader* keluaran Microsoft.

Akibatnya, pro dan kontra pun tak terelakkan. Sven Birkerts misalnya, terpaksa harus menulis buku *The Gutenberg Elegies, The Fate of Reading in an Eletronic Age* (1994) sebagai ungkapan kemasygulannya. Menurutnya, dalam semangat menggebu merengkuh keajaiban era elektronik, kita ternyata telah mengorbankan budaya membaca manusia, terutama membaca buku sastra. Bahasa jadi tergusur. Kompleksitas, parodi, ironi, ambiguitas, kekayaan, dan kelembutan bahasa dengan sendirinya akan hilang dan digantikan bahasa-bahasa robotik, teknis, langsung, dan tergesa-gesa. Perspektif sejarah orang pun jadi semakin dangkal. Intinya, Birkerts berusaha mengingatkan kita terhadap bahaya yang mengancam dari proses perubahan yang sedang terjadi ini.[13]

Dalam menyoal masa depan P3T di Indonesia, fenomena di atas tentu saja tak bisa dinafikan. P3T jelas tidak mungkin menerapkan prinsip, *"Alon-alon waton kelakon"* (pelan-pelan asal

Dick Brass mengatakan, "Kita sedang di tepian perubahan yang fundamental," tegasnya tentang perubahan drastis dunia penerbitan buku.

terlaksana), untuk mengembangkan dirinya. Sebaliknya, ia juga tak bisa sepenuhnya masuk dan selalu mengikuti secara membabi buta perkembangan dunia penerbitan. Oleh karena itu, P3T harus menentukan prioritas kerja dan prioritas keberhasilannya, yaitu dengan membuat perencanaan strategis sebagai agenda utamanya.

Persoalan ketiga P3T misalnya, seperti telah ditegaskan, yaitu *grey zone* antara ia sebagai lembaga bisnis yang berorientasi profit dan sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pengembangan ilmu pengetahuan, tentu bukan masalah mudah yang bisa diselesaikan. Ia tak bisa lepas dari berbagai keterbatasan yang melingkupinya.

Tanpa bermaksud mengabaikan kemungkinan beberapa P3T telah membuat *perencanaan strategis* (meski terus terang keraguaan saya sangat besar), pada tahap yang paling teknis ini, P3T seharusnya juga di-*back-up* dengan *perencanaan jangka panjang.* Dua tahap tersebut bertujuan, tentu saja, untuk mendisiplinkan diri (P3T), memperjelas arah masa depannya, mempertegas prioritas kerjanya, sekaligus upaya memecahkan persoalan-persoalan P3T seperti dipetakan di atas.

Namun harus diingat pula, *perencanaan strategis* mungkin tidak harus dilakukan jika dalam pengimplementasiannya sangat tidak memungkinkan.[14] Apa dan bagaimana *perencanaan strategis* P3T tentu saja tidak sama antara P3T, dan tentu juga harus disesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing P3T. Beberapa pokok persoalan seperti tersebut di atas barangkali dapat menjadi acuan untuk menyoal kemungkinan-kemungkinan pengembangan P3T lebih jauh.

Agenda lain yang juga perlu dipikirkan oleh semua P3T di Indonesia adalah kemungkinan untuk mendirikan "Asosiasi Penebit dan Percetakan Perguruan Tinggi Indonesia"(AP3TI). Organisasi semacam *"the Association of American Unversity Presses"* (didirikan tahun 1902) ini belum ada di Indonesia.

Padahal, pada tahun-tahun ke depan, dapat diperkirakan, jika P3T digarap secara serius dan optimal, sangat mungkin ia akan menjadi "gurita bisnis penerbitan" di Indonesia. Kelebihannya sebagai lembaga bisnis yang muncul dari komunitas intelektual, jika dapat dipoles dengan baik tentu saja merupakan modal besar yang patut diandalkan.

Pertimbangan lainnya adalah kebutuhan P3T untuk saling menukar informasi. AP3TI kiranya dapat menjadi pusat informasi P3T dan upaya-upaya pengembangannya. Selama ini, harus diakui, hubungan antara P3T bisa dibilang sangat eksklusif. Kalau tidak saling tahu, biasanya hubungan antar P3T terjalin antar P3T dari PTN, atau dari PTS. Bahkan, seperti diakui Munandar, hubungan antar-P3T (dari Unsyiah, Unand, UI, ITB, Unes, Unair dan Unhas) hanya terjadi saat pertemuan dalam rangka mencetak soal-soal UMPTN.

Terakhir, dua ungkapan ini kiranya menarik untuk direnungkan bagi keberadaan P3T masa depan."Dimana tidak ada visi, orang-orang akan binasa" (Proverbs) dan "Daripada mencemaskan tentang nasib masa depan, lebih baik kita bekerja keras untuk mewujudkannya." (Hubert H. Humprey).❐

Catatan Akhir

[1] Dalam tulisan ini, pemakaian kata "Penerbit dan Percetakan Perguruan Tinggi" (P3T) dirasa lebih tepat daripada kata *"University Press"* (UP) yang selama ini juga lazim didengar untuk menyebut Penerbit dan Percetakan di Perguruan Tinggi (PT). Pemakaian kata P3T, selain alasan lebih fleksibel atas keberadaan penerbit dan percetakan yang muncul dari institut, sekolah tinggi, atau akademi, juga merupakan upaya untuk mengedepankan pemakaian bahasa Indonesia dalam menyebut kosa

kata keseharian kita.

[2] Selanjutnya, berturut-turut adalah Universitas Indonesia (1950), Universitas Sumatara Utara (1952), Universitas Airlangga (1954), Universitas Andalas (1956), Universitas Padjajaran (1957), dan Institut Teknologi Bandung (1959). Lihat juga *Encylopedia Britanica* (William Benton Publisher, Vol. 22, 1972), hal. 764

[3] Hasil wawancara dengan Dr. Arifzan Razak, drg, MSc., Direktur Airlangga University Press, Surabaya, Januari 2001.

[4] Data dari buku *50 tahun UGM: di seputar dinamika politik bangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hal. 179, P3T IPB dimasukkan dalam generasi kedua ini. Tapi hal ini dbantah oleh Arifzan Razak, sebagai salah satu pelaku sejarah pendirian P3T generasi kedua. Menurutnya, kelahiran P3T IPB seiring dengan UI.

[5] Jumlah P3T di Indonesia sulit ditentukan. Semua pegiat P3T yang diwawancarai penulis tak satu pun dapat memberi jawaban yang lengkap dan jelas. Tapi sejauh yang dapat diketahui, kurang lebih ada 30-40 P3T di Indonesia, baik PTN ataupun PTS.

[6] Tim Penerbit buku setengah abad UGM, *50 tahun UGM: di seputar dinamika politik bangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hal. 179.

[7] Jeremy Mynott, *Introduction to Cambridge University Press*, dalam <http://uk.cambridge.org/abouts/introdtopress.htm>, 19 Maret 1999.

[8] Dalam Eduard Kimman, *Indonesia Publishing: Economic Organization in a langganan society*, 1981, hal. 69.

[9] Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 44, dalam Asep Mulyana, "Soeratkabar Boemiputra, Kaoem Journalist, dan Pergerakan Kebangsaan", *BALAIRUNG* Edisi Jurnal, Tahun XIV (1999), hal. 39.

[10] Soebagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 349.

[11] Putut Widjanarko, *Elegi Gutenberg Memposisikan Buku di Era Cyberspace* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hal. 38-39.

[12] Ibid. hal. 67.

[13] Ibid., hal. 71-73

[14] John M. Bryson, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial* terj. M. Miftahuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 15.

INDUSTRI BUKU

ANTARA PILIHAN HUMANISME DAN DETERMINISME PASAR
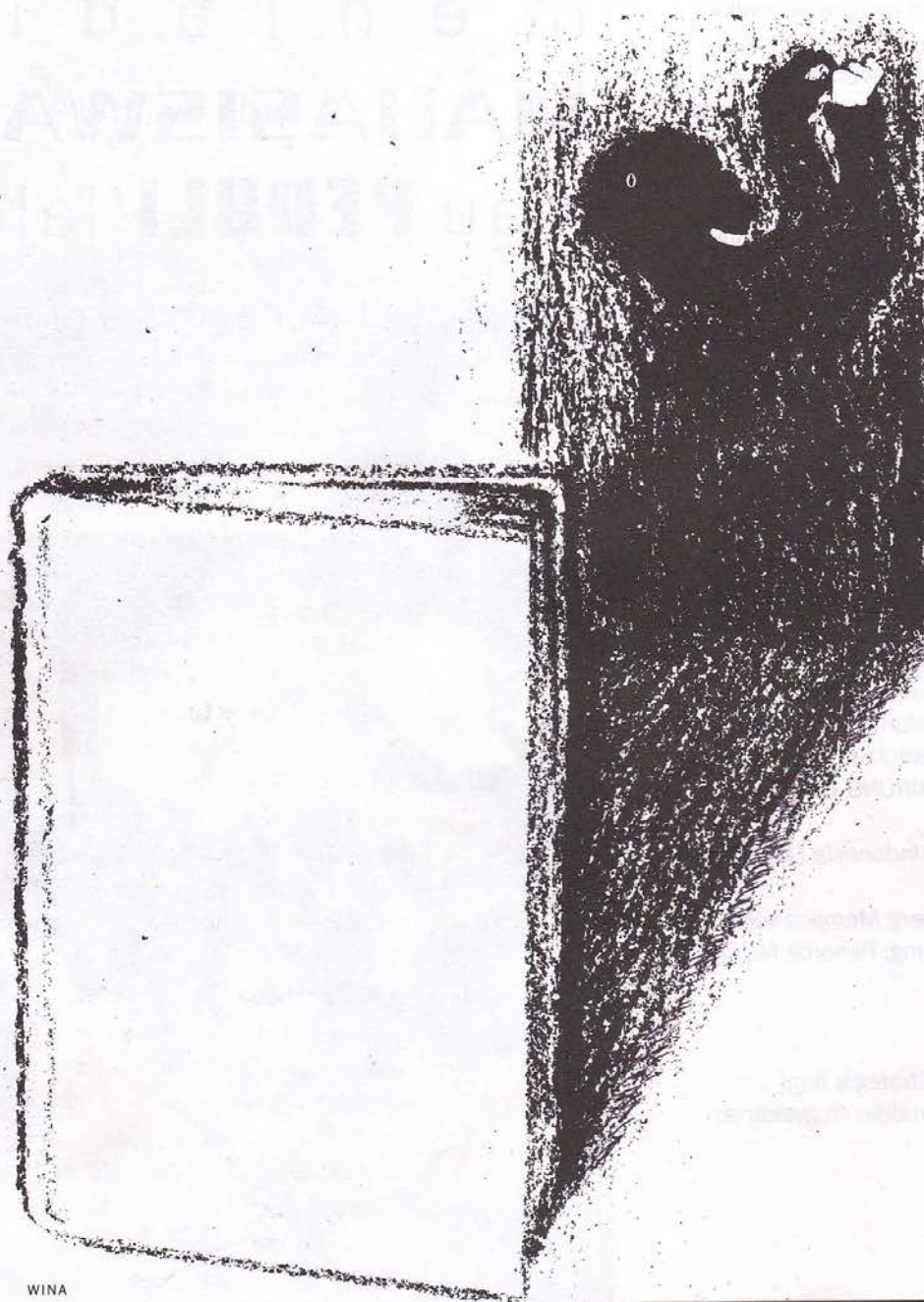
WINA

M. Adhi Ikhsanto

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, pernah menjadi pegiat LPPM *Sintesa* Fisipol UGM (1998–1999). Ia kelahiran Salatiga, 9 Februari 1977, dan kini aktif di Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Studi Sosial (LEPASS) Yogyakarta.

Pasca-kekuasaan Soeharto, Republik ini didera arus perubahan dalam lingkup kehidupan sosial politik. Salah satu pokok pergeseran yang mengalami pergerakan dalam derajat yang cukup tinggi adalah partisipasi sosial politik. Kenaikan partisipasi politik dapat terdeteksi dengan munculnya perluasan aktivitas sosial politik dalam ranah *political society*, *civil society*, maupun *economic society*.[1]

Peledakan partisipasi dalam lingkup *political society* terpetakan melalui proses Pemilu 1999 lalu. Pada ritual politik tersebut, 48 partai politik tercatat sebagai kontestan Pemilu. Secara kuantitatif, jumlah peserta Pemilu 1999 jauh melampaui beberapa kali Pemilu di Republik ini.[2]

Fenomena peledakan partisipasi semakin tak terbantahkan dengan kemunculan fakta dalam preskripsi kualitatif. Seluruh partai politik peserta Pemilu ternyata tidak cukup punya visi dan program yang cerdas. Partai-partai itu politik hanya memanfaatkan momen *political realignment* dan ikatan emosional dari pemilih. Mereka tidak mencoba melakukan pendidikan guna membangun rasionalitas politik yang mencerahkan perilaku politik masyarakat.

Secara teoritis, *civil society* dibingkai dalam pengertaian wilayah atau arena berbagai gerakan sosial serta organisasi sipil dari semua kelas yang berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga dapat mengekspresikan diri dan memajukan berbagai kepentingan.[3] Dalam penampakan nyata, *civil society* acap kali direpresentasikan oleh berbagai asosiasi politik independen seperti ormas dan LSM. *Civil society* tidak luput dari serangan perilaku partisipasi. Realitas empiris menunjukkan, persoalan partisipasi di aras *civil society* termanifestasikan melalui sejumlah kenaikan aktivitas aktor-aktor yang ada di dalamnya.

Dewasa ini, banyak LSM maupun ormas yang giat melakukan pengorganisiran masyarakat. Pengorganisiran masyarakat ini bertujuan mewujudkan kemandirian, atau bahasa mereka, pemberdayaan. Indikator yang cukup terpercaya untuk melihat peningkatan kebutuhan partisipasi ini adalah meluasnya wilayah kerja LSM dan ormas, serta semakin dalamnya mereka terlibat dalam advokasi persoalan sosial-politik.

Fenomena peledakan partisipasi di area *economic society* tidak terlepas dari orientasi aktor yang berperan di dalamnya. Secara umum, *economic society* mempunyai orientasi utama dalam lingkup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian dapat dikatakan, aktivitas *economic society* digerakkan oleh motif untuk mendatangkan surplus yang besar dalam ekonomi.

Manifestasi nyata dari tuntutan partisipasi adalah semakin terlibatnya sektor privat (swasta) dalam penyelenggaraan aktivitas publik. Ruang publik tidak lagi menjadi daerah mutlak kekuasaan negara, bahkan seiring dengan putaran waktu, negara berubah peranan menjadi sekadar fasilitator para aktor ekonomi dalam mengelola ruang publik. Otoritas negara mengalami isolasi, sebatas pada kewenangan administrasi dan regulasi.

Sejalan dengan lahirnya tuntutan partisipasi, muncul satu problem yang tidak kalah signifikan, yaitu institusionalisasi sosial politik. Sebagaimana diisyaratkan oleh Huntington, institusionalisasi sosial politik merupakan satu problem yang selalu mengikuti fenomena peledakan partisipasi. Mengingat, kenaikan derajat partisipasi pada gilirannya menuntut juga evaluasi, redefinisi, serta rekonstruksi institusi sosial politik lama. Percepatan partisipasi dan kelambanan evolusi institusi sosial politik menjadi satu perpaduan yang tak terelakkan dalam setiap fase transisi politik berbagai negara di belahan dunia.

Kebutuhan institusionalisasi dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi sosial politik lama. Serta, menurunnya kapasitas negara dalam memberi konsesi sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Percampuran kedua fenomena tersebut akhirnya melahirkan krisis legitimasi. Otoritas negara mengalami penyurutan tatkala harus berhadapan dengan tuntutan massa.[4]

Masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak dapat direspons oleh lembaga sosial politik formal. Akibatnya, mereka melakukan sejumlah tindakan yang mengabaikan tertib sosial. Institusi sosial politik tidak lagi mempunyai makna. Meski keberadaanya tetap terjaga, namun eksistensinya tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat.

Tertib sosial dan politik masyarakat telah

demikian rendah. Kehidupan sosial, politik, dan ekonomi ditandai dengan aktivitas yang imun dari eksistensi negara. Implikasi yang cukup krusial dari *setting* sosial politik itu adalah meluasnya serta meningkatnya perilaku kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan menjadi suatu keniscayaan tatkala kehidupan tidak lagi dipayungi satu institusi yang dipercaya mampu untuk menjamin proses pemerataan akses sosial, politik, dan ekonomi.

Keterbatasan akses sosial, politik, dan ekonomi kemudian menjelma dalam satu perilaku kekerasan struktural. Struktur sosial yang demikian ketat mempertahankan stratifikasi, merupakan sumber utama dari kekerasan itu. Struktur sebagai sumber kekerasan diungkapkan oleh Lewis Coser. Dalam pandangannya, kekerasan dapat menjadi isyarat dan tanda bahwa masih banyak problem dalam sistem sosial. Pada situasi eksploitatif itu, masyarakat menjadi sangat peka terhadap isu-isu ketidakadilan seperti korupsi, kolusi, manipulasi, kesenjangan, dan ketidakadilan.

Lebih lanjut, Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan struktural merupakan kekerasan yang anonim, para pelakunya tidak dapat dilihat secara gamblang.[5] Kekerasan struktural ibarat angin, tidak dapat diraba, namun sangatlah dirasa. Dalam sebuah rantai kehidupan, kekerasan struktural akan mereproduksi bentuk-bentuk kekerasan yang lain, baik dalam jangkauan wilayah privat maupun dalam wilayah publik.

Dalam situasi yang serba kusut, dapat dimaklumi jika masyarakat di Republik ini merasa memerlukan efek magis dari terminologi demokrasi, pluralisme, dan desentralisasi. Kebutuhan-kebutuhan itu direspon oleh sekelompok individu dengan melakukan penerbitan buku. Tidak dapat dipungkiri bahwa buku merupakan media yang cukup ampuh untuk melakukan pembangunan dan perluasan wacana. Namun persoalannya tidak berhenti di sini.

Secara kritis, kita harus mampu membaca kenyataan, apakah penerbitan buku digerakkan oleh kepentingan yang kekal atau tentatif. Jika bergerak dalam kepentingan yang kekal, penerbitan buku haruslah mengutamakan satu *transfer of knowledge* beserta *transfer of values* yang diarahkan pada pembangunan humanisme. Akan tetapi, bila hanya berpijak pada kebutuhan tentatif, maka penerbitan buku dengan sejumlah tema di atas sudah dipastikan didorong oleh motif mencari untung. Sembari, tentu saja, memanfaatka euforia yang menjadi kecenderungan pasar.

Tulisan ini secara umum mencoba membongkar konstruksi aktifitas penerbitan buku. Dengan demikian, kita dapat memperoleh satu gambaran bahwa penerbitan buku mempunyai potensi untuk membangun humanisme, sekaligus juga mengandung bahaya yang digerakkan oleh kekuatan pasar.

Buku: Idealisme Proyek Kemanusiaan

Keberadaan buku dalam suatu komunitas mempunyai peranan yang relatif signifikan. Buku tidak saja sebagai sebuah instrumen pemuas nafsu keingingintahuan manusia. Lebih dari itu, buku menempati fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai media pendidikan. Secara internal, media pendidikan yang berupa buku dilekati oleh perilaku subjek pembuat buku. Dalam konteks ini, persoalan buku menjadi agenda besar sebuah *habit formation* dimana manusia menyalurkan daya kreatifnya dalam cipta, rasa, dan karsa.

Bila dikaitkan dengan proses berkebudayaan, buku adalah salah satu ekspresi dari kecenderungan melakukan generalisasi pikiran. Disadari atau tidak, sebuah penerbitan buku merupakan satu usaha untuk mengafirmasi serpihan-serpihan pemikiran manusia yang tersebar. Selanjutnya, berbagai serpihan ini diorganisir menjadi satu instrumen dari sebuah proyek pendidikan—baik yang terinstitusionalisasikan secara formal maupun informal. Pada kutub ini, buku mempunyai ikatan yang kuat dengan *habit formation*. Karena, dari bukulah segenap perilaku dibentuk dalam garis pembelajaran yang utuh.

Dalam kaca mata Pierce, proyek *habit formation* mempunyai sedikitnya tiga fungsi.
Pertama, meringankan proses pembelajaran. Buku sebagai bagian dari *habit formation* jelas memiliki kesepadanan fungsi. Melalui buku, orang tidak perlu lagi mengumpulkan sejumlah respon terhadap berbagai stimulus dalam patahan waktu yang telah berlalu. Dengan demikian, untuk mendapatkan pemahaman terhadap satu persoalan, seorang manusia tidak harus melewati pembelajaran dari tahap awal. Perajutan sejumlah pengetahuan atas pengalaman telah terekam secara sistematis dalam artefak kesejarahan yang dinamakan buku. Sehingga, manusia tinggal mencari rujukan pada buku, dan dengannya proses belajar menjadi ringan.
Kedua, habit formation dilekati fungsi untuk menstabilkan manusia dengan dunia di luarnya. Buku memberikan satu kerangka acuan yang ideal-*das sollen*-dan memberikan deskripsi realitas empiris dari fenomena sosial-*das sein*. Melalui dialektika kedua hal tersebut, manusia diharapkan akan mendapat kesepahaman yang *equilibrium* dengan lingkungan di luarnya. Lebih dari itu, pengetahuan yang didapat dari sebuah buku akhirnya akan memandu manusia memberikan respon atas stimulus yang datang pada dirinya. Setiap respon mestilah mengakomodasi sejumlah potensi rasio dan

emosi yang terkandung dalam diri manusia. Dengan demikian, benturan manusia dengan dunia yang melingkupinya dapat diminimalisir. *Ketiga,* berkaitan dengan fungsi yang pertama, setelah *habit formation* meringankan beban pembelajaran manusia, maka dalam waktu yang bersamaan ruang untuk mengembangkan aktivitas belajar semakin mengalami perluasan.[6] Artinya, seorang individu yang sedang menjalani pembelajaran akan lebih mudah untuk mencerap pengetahuan dalam proses selanjutnya. Dalam ritme ini, buku selain memberi keringanan dalam urusan pedagogi, juga memberi jaminan atas kelestarian dari aktivitas pedagogi itu sendiri.

BASKORO

Namun demikian, persoalan berkebudayaan masih menyimpan dimensi problem yang lain, yaitu aksiologi atas tujuan pendidikan. Tak bisa dihindari, pembangunan budaya terkait secara kuat dengan proses pendidikan. Aksiologi di sini merupakan satu pemaknaan terhadap nilai yang menjadi tujuan pendidikan. Dalam melihat nilai secara konseptual, kita dapat memilih satu di antara empat pendekatan. *Pertama,* pendekatan yang menganggap nilai sebagai kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Manusia dapat menangkap nilai yang terkandung dalam suatu tindakan atau barang. Proses pemaknaan ini ditentukan oleh proses interaksi yang melibatkan sejumlah organ inderawi. Nilai dimaknai sebagai kualitas yang dapat ditangkap dari interaksi yang dijalankan oleh individu yang bersangkutan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, nilai sebagai kualitas empiris hanya dapat diketahui melalui pengalaman. Tetapi karena respon yang diterima manusia mempunyai karakter yang abstrak, nilai menjadi satu derajat kualitas empiris yang tidak terdefinisikan. Pendekatan ini mendapat sokongan yang relatif besar dari seorang pemikir komtemporer, G.E. Moore, melalui tulisannya dalam buku *Principa Ethica.*

Kedua, pendekatan yang mendefinisikan nilai setara dengan kepentingan. Nilai dalam hal ini diidentikkan dengan kepentingan yang melekat dalam setiap tindakan ataupun benda. Pendekatan utilitarian ini mendapat dukungan dari Perry. Secara lugas ia menyatakan bahwa setiap objek yang ada dalam kenyataan, setiap perbuatan yang dilakukan maupun yang dipikirkan, dapat memperoleh nilai, jika pada suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang mempunyai kepentingan.

Ketiga, pendekatan pragmatis. Pada lingkup pendekatan pragmatis, nilai dilihat dari proses yang mengandung karakter sebab-akibat. Nilai, selanjutnya, dipandang sebagai akibat atau *output* dari tindakan memberi penilaian. Garis pendekatan ini ditumbuhkembangkan oleh John Dewey.

Dan yang *keempat,* paradigma yang melihat nilai sebagai esensi. Keberadaan nilai merupakan konsekuensi logis dari eksistensi nilai dalam wilayah ontologi. Nilai sudah terkandung dalam setiap tindakan maupun benda. Hanya saja, untuk memperoleh

pemahaman atas nilai, manusia dituntut untuk mengumpulkan forma-forma yang mengendap dalam rasionya. Sebab, nilai bersifat apriori. Sedikit banyak pendekatan yang terakhir ini memperoleh pijakan pemikiran secara kuat dari Aristoteles.[7]

Interaksi teks aksiologi nilai atas konteks tujuan pendidikan pada tingkatan epistemologi akan mendapatkan bentuk sinkron, jika menganggap aksiologi pendidikan dalam pendekatan kepentingan. Dengan demikian, penarikan preskripsi atas tujuan pendidikan akhirnya berpijak pada kepentingan yang diemban oleh tindakan pendidikan itu sendiri. Yang perlu menjadi catatan di sini, kepentingan yang terajut dalam proses pendidikan bukanlah sebuah kepentingan yang tentatif sifatnya, melainkan satu kepentingan yang kekal dan berkelanjutan. Sehingga, pergeseran pada habitat kepentingan tidak akan membawa pergeseran pada tingkatan epistemologi, atau maksimalnya hanya terjadi perubahan di derajat pemaknaan.

Berpijak pada konsepsi di atas, aksiologi atas tujuan pendidikan adalah sebuah preskripsi yang membingkai sejauh mana pendidikan digerakkan oleh kehendak kemanusiaan atau seberapa jauh humanisme menjadi kerangka acuan dalam pendidikan. Bila ditarik dalam persoalan penerbitan buku, pertemuan orientasi akan semakin jelas. Penerbitan buku idealnya memang digerakkan oleh motif humanisme. Sebab, buku pada dasarnya merupakan satu dimensi dalam pendidikan. Jikalau pendidikan dilakukan untuk humanisasi kehidupan manusia, maka kerangaka acuan penerbitan buku juga sudah selayaknya bergerak pada kepentingan yang sama, humanisasi kehidupan manusia.

Sebagai media pendidikan, buku, disadari atau tidak harus melakukan satu proses transformasi sosial. Pada level ini, secara jujur harus diakui bahwa buku mengandung bias *social engineering*. Oleh karena itu, menjadi wajar kiranya jika buku kemudian melakukan peran-peran yang terkait dengan proses *transfer of knowledge* dan *transfer of values*. *Transfer of knowledge* terkait dengan proses pendistribusian pengetahuan. Sehingga, mampu mengendap dalam ruang-ruang pemikiran manusia dan mampu berperan sebagai pemandu setiap tindakan manusia. Sedangkan *transfer of values* cenderung lebih dekat dengan internalisasi ukuran tingkah laku. Buku, pada titik ini, mempunyai kapasitas untuk mengintegrasikan segenap ukuran yang berserak di dunia di luar manusia dengan ukuran rasio dan emosi dari manusia. Kapasitas ini pada akhirnya akan menjadi kerangka acuan dalam setiap tindakan manusia.

Eksistensi buku dalam kehidupan manusia dapat disetarakan dengan sekolah. Baik buku maupun sekolah, keduanya mempunyai kapasitas eksistensi yang kohesif dalam posisinya sebagai media pendidikan. Oleh karena itu, buku, seperti halnya sekolah, menjadi sarana untuk mendorong aksi maupun refleksi setiap manusia yang sedang melakukan pembelajaran.

Gerak dialektika yang menjadi representasi aksi dan refleksi, termanifestasikan secara konkret melalui struktur dan muatan buku, serta koherensinya dengan fenomena sosial. Melalui sebuah buku, aksi maupun refleksi dapat berjalan secara terus menerus, sehingga sedikit demi sedikit akan menyentil kesadaran manusia.

Untuk itu, sebuah buku selayaknya dapat memerankan fungsi-fungsi sebagai berikut. *Pertama*, buku harus mampu menyerap berbagai fenomena riil yang terjadi dalam masyarakat. Sebuah buku

Jika bergerak dalam kepentingan yang kekal, penerbitan buku haruslah mengutamakan satu *transfer of knowledge* beserta *transfer of values* yang diarahkan pada pembangunan humanisme.

determinisme kepentingan pasar merupakan karakter yang tak terhapuskan dari penerbitan buku. Hal ini terdeskripsikan oleh fakta-fakta yang terhimpun dalam dua level tindakan, yaitu yang terkait dengan tema-tema yang diterbitkan dan pertimbangan praktis pasar dalam merespon permintaan.

Dalam lingkup penentuan tema, kita dapat melihat bahwa tema-tema yang disodorkan kepada pembaca cenderung mengarah ke isu-isu globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good governance*, dan desentralisasi wewenang. Tidak mengherankan karena tema-tema inilah yang dapat menyokong kepentingan pasar. HAM, demokrasi, dan globalisasi merupakan isu yang dijadikan instrumen untuk melakukan hegemoni wacana. Melalui sosialisasi wacana globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good governance,* dan desentralisasi, keberadaan otoritas pasar dapat dipertahankan. Dan jikalau ada tentangan, maka tentangan ini tidak akan sampai meruntuhkan sistem ekonomi politik yang berpijak pada kepentingan pasar.

Setting sosial seperti ini oleh Gramsci disebut *setting* hegemonik. Konsepsi hegemoni secara teoritis dibingkai dalam pengertian kepatuhan masyarakat kepada sekelompok penguasa yang didasari oleh proses internalisasi nilai-nilai dari penguasa dalam diri masyarakat, sehingga mereka memberikan persetujuan terhadap subordinasi atas diri mereka sendiri.[9] Dalam terminologi yang sederhana, hegemoni sering diterjemahkan sebagai "kepemimpinan moral dan intelektual".

Konsepsi hegemoni lahir dari kritik Gramsci terhadap paradigma Marxis ortodoks yang melihat proses perubahan sebagai fungsi positif dari relasi-relasi kerja yang berlangsung pada struktur bawah. Berpunggungan dengan para penganut Marxis ortodoks, Gramsci berpendapat bahwa perubahan justru dapat dipicu dengan pergeseran yang berlangsung di struktur atas. Dengan demikian, ekspresi politik tidak lagi menjadi epifenomena dari basis ekonomi belaka.

Dalam pandangan Antonio Gramsci, suprastruktur terpilah dalam dua level struktur, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara. Masyarakat sipil merepresentasikan persetujuan, sedangkan masyarakat politik lebih mengedepankan perwakilan dari kekuatan. Kedua level ini mempunyai persinggungan erat dalam menjalankan fungsi hegemoni. Kelompok dominan dapat menangani keseluruhan masyarakat, mendominasinya langsung. Pendeknya, konsepsi Gramsci itu menyiratkan satu rumusan penguasaan negara atas masyarakat. Kekuasaan negara hanya dapat ditegakkan bila negara menggunakan hegemoni dan dominasi pada tingkat praksis.

Awalnya, konsepsi hegemoni diarahkan untuk melihat kondisi internal Italia. Namun, seiring dengan berputarnya waktu, konsepsi tersebut dikembangkan, sehingga mampu digunakan untuk membaca relasi antara negara industri dengan negara dunia ketiga. Berkaitan dengan hal ini, Gramsci menyatakan:

> *"Apakah hubungan internasional mendahului atau mengikuti hubungan sosial fundamental? Tak diragukan lagi jawabnya adalah mengikuti. Setiap inovasi organik dalam struktur sosial, melalui ekspresi teknis militernya, juga memodifikasi secara organik hubungan-hubungan absolut dan realtif dalam bidang internasional."*[10]

Berpijak pada konsepsi Gramsci, hubungan antara negara industri dengan negara dunia ketiga adalah sebuah relasi hegemonik. Negara industri dalam konteks ini mempunyai kepentingan yang harus dipertahankan secara terus menerus terhadap negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga dipandang sebagai pasar yang potensial secara ekonomi dan sumber berbagai bahan mentah untuk keperluan industri di negara industri. Pendeknya, negara industri mempunyai kepentingan untuk menstabilkan pasar di dunia ketiga. Pada *setting* sosial seperti inilah hegemoni menemui dimensi praksisnya.

Proses hegemoni negara industri maju terhadap negara-negara dunia ketiga dilakukan dengan mengendalikan wacana yang berkembang di masyarakat dunia ketiga. Sedalam mungkin, masyarakat dunia ketiga diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai dari negara industri. Sehingga, muncullah satu kesadaran semu yang secara suka rela memberi pengesahan atas subordinasi mereka. Pada garis kepentingan yang demikian, pilihan tematik dalam penerbitan buku memperoleh signifikansinya.

Pemihakan pada kepentingan pasar semakin terbongkar jika kita merunut konteks historis yang melatarbelakangi pilihan tema penerbitan buku. Isu tentang globalisasi, demokrasi, pluralisme, HAM, *good governance,* dan desentralisasi merupakan setumpuk isu yang diusung ke dunia ketiga pasca kegagalan ekonomi Keynesian. Fenomena transnasionalisasi isu tersebut dimulai pada awal periode 1970-an.

Pada rentang waktu sebelumnya, isu-isu itu tidak pernah muncul ke permukaan. Kegagalan ekonomi Keynesian menghasilkan konsep *less government* yang oleh negara industri segera diekspor ke dunia ketiga. Tatkala negara industri sudah mengembalikan pasar sebagai orientasi ekonominya, banyak negara di dunia ketiga yang

idealnya dapat memberikan satu gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dampaknya, tanpa melalui persentuhan langsung, manusia diharapkan mampu mempunyai pemahaman awal tentang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, buku harus dapat melakukan abstraksi dan simplifikasi atas *setting* sosial.

Kedua, buku haruslah memberi imajinasi yang murni tentang masyarakat yang ideal. Berbagai nilai yang negatif dan destruktif hendaknya dapat diminimalisir atau bahkan direduksi oleh buku. Melalui sebuah buku, masyarakat diajak berkontemplasi untuk merumuskan satu kehidupan yang manusiawi.

Ketiga, buku diharapkan mampu mendorong dialog-dialog yang dinamis antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Dialog yang dilakukan terus-menerus akan bermuara pada satu titik kesadaran. Pada tahap berikutnya, manusia dapat melakukan empati sosial terhadap setiap problem sosial tanpa membedakan wilayah problem itu—area publik atau privat.

Ketika ketiga fungsi di atas dapat dimainkan secara sempurna oleh sebuah buku, maka kesadaran, sebagai dasar dari segala usaha humanisasi kehidupan, semakin tersentuh oleh hasil-hasil refleksi manusia. Manusia tidak lagi terkungkung dalam kesadaran semu. Dengan pancingan buku, manusia dapat melakukan dialog-dialog, pemahaman atas habitat sosialnya secara terus menerus, hingga pada akhirnya akan muncul satu bentuk kesadaran kritis.

Kesadaran kritis inilah yang merupakan *output* dari kemampuan plastisitas manusia. Terminologi plastisitas mengacu pada kemampuan manusia untuk melakukan pemahaman atas pengalaman masa lampau, yang kemudian dijadikan acuan bagi pemecahan persoalan sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, kesadaran kritis atas signifikansi humanisme ditentukan oleh dua proses. *Pertama,* pengorganisiran dan pemahaman pengalaman. Untuk melewati proses ini secara tuntas, seorang manusia harus mampu membangun epistemologi, baik melalui pengalaman hidup secara langsung ataupun lewat teks-teks bacaan.

Proses yang *kedua,* penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini akan dijadikan landasan dalam menentukan sikap. Pada konteks ini, berbagai epistemologi, baik yang diperoleh melalui pengalaman langsung ataupun lewat bacaan, akan dijadikan pertimbangan agar setiap keputusan dapat diambil secara arif.

Akhirnya, tidak ada kepentingan atas tindakan menerbitkan buku, kecuali kepentingan humanisasi kehidupan manusia. Pilihan awal ini sangat mempengaruhi dan mempunyai kaitan erat dengan pilihan konkret yang akan dilakukan manusia. Apabila orientasi awal sudah "humanis", maka dalam fase selanjutnya, sebuah buku akan selalu menuntut manusia untuk menginternalisasikan serta mengoperasionalkan konsep-konsep humanisme dalam segenap tindakannya.

Determinisme Kepentingan Pasar dalam Penerbitan Buku

Dewasa ini, usaha penerbitan buku dilakukan di tengah *setting* masyarakat yang kapitalistik. Sebuah masyarakat yang kental karakter kapitalisnya dapat dipastikan mempunyai corak komersialisasi yang tinggi. Ross Poole melihat bahwa sebuah komunitas komersial akan ditandai dengan ciri-ciri khas sebagai berikut. *Pertama,* adanya pembagian kerja yang sedemikian rupa dalam masyarakat. Sehingga, berbagai kegiatan produktif untuk memenuhi keinginan manusia, dibagi diantara individu-individu dan kelompok individu yang berbeda-beda. Pembagian kerja ini mendasarkan diri pada pertimbangan spesialisasi. Artinya, kemampuan teknis dan profesionalisme manusia.

Kedua, adanya kerangka kerja hukum mengenai kepemilikan pribadi dan kontrak. Individu-individu mempunyai hak-hak eksklusif untuk memakai dan memindahkan hak-hak yang mereka miliki itu. Inilah pengakuan atas hak milik perseorangan. Dalam perkembangannya, pengakuan ini mendorong pemilahan antara wilayah privat yang penguasaannya berada pada otoritas individu dan wilayah publik yang penguasaannya mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Ketiga, adanya kecenderungan individual untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.[8] Logika untuk kepentingan diri sendiri menjadi dominan bila manusia dihadapkan pada situasi yang kaku dan selalu membatasi eksistensi kemanusiannya.

Ketiga ciri tersebut dapat memandu kita memahami kecenderungan perilaku masyarakat kapitalistik. Persoalannya kemudian, apakah mungkin sebuah usaha penerbitan buku dapat dilakukan dengan berorientasi pada proyek humanisme secara murni. Dan juga, apakah subek yang telah masuk ke dalam sekat-sekat pembagian kerja, kepemilikan pribadi, dan dominasi kepentingan individu mau secara suka rela melepaskan *vested interest*nya dalam aktivitas penerbitan buku. Satu lagi persoalan yang cukup krusial, apakah usaha penerbitan buku mampu mengisolasi diri, sehingga imun dari pertimbangan yang kental dengan kepentingan pasar.

Untuk menjawab sejumlah persoalan itu, perlu dilakukan pemetaan yang komprehensif terhadap motif penerbitan buku dan juga pembacaan pasar atas permintaan. Bila dirunut dengan seksama,

masih menjalankan model ekonomi Keynesian—yang mengizinkan dominasi negara atas pasar.

Menurut aras perkembangan baru ini, negara sering kali dipandang mendistorsi pasar. Dengan demikian, campur tangan negara atas pasar harus dihentikan. Peranan negara sedapat mungkin diisolasi hanya dalam kewenangan administrasi dan regulasi. Untuk itulah perlu disosialisasikan wacana tentang globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good governance,* dan desentralisasi. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mengeluarkan campur tangan negara dari pasar, dan selanjutnya mengintegrasikan masyarakat dunia ketiga ke dalam pasar global.

WAWAN

Dalam tataran empiris, visi *less government* terlihat secara telanjang melalui isu globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good govemace,* maupun desentralisasi. Isu-isu ini mempunyai satu karakter yang sama, yaitu membatasi peran-peran negara dalam wilayah publik dan menstabilkan pasar di dunia ketiga. Dengan demikian kita menjadi yakin bahwa sejak awal—saat penentuan tema—determinisme kepentingan pasar telah menyelubungi usaha-usaha penerbitan buku.

Rentang kooptasi agen kapitalis global dalam kerangka hegemoni wacana dunia ketiga, semakin transparan jika kita mencermati bantuan yang dikucurkan untuk aktivitas penerbitan buku. Sebagai contoh, aliran dana yang berasal dari Ford Foundation kepada sejumlah usaha penerbitan. Suntikan dana segar kerap kali dibarengi dengan berbagai prasyarat yang bermuara pada pembatasan tema buku. Kesejajaran tematik dengan kepentingan perluasan jaringan kapitalisme akhirnya memaksa penerbit hanya memproduksi buku "*hot topic*" seputar globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good governance,* maupun desentralisasi.[11]

Determinisme pasar semakin terkuatkan jika kita melihat konteks lokal yang menjadi pertimbangan pasar dalam merespon permintaan. Di luar *setting* global, situasi internal Republik ini secara ekonomi memang sangat kondusif untuk menerbitkan buku-buku yang menawarkan tema-tema demokrasi, pluralisme, HAM, *good governance,* dan desentralisasi. Pada periode transisi, tema-tema tersebut mempunyai daya magis luar biasa. Ia mampu menyihir masyarakat untuk membangun impiannya tentang masyarakat ideal yang selama ini hilang. Kehausan pembaca akan tema-tema seperti itu dijawab secara konkret oleh para penerbit dengan memproduksi buku-buku yang mengupas tema-tema globalisasi, demokrasi, HAM, pluralisme, *good governance,* dan desentralisasi.

Penerbit buku mampu mengeksploitasi euforia pembaca. Buktinya, terjadi kompetisi yang ketat dalam perburuan naskah asli serta pola penerbitan yang susul-menyusul dalam tema-tema tertentu. Contoh konkret dari fenomena ini tergambar dalam penerbitan buku-buku kiri. Pada saat Orde Baru berkuasa, buku kiri
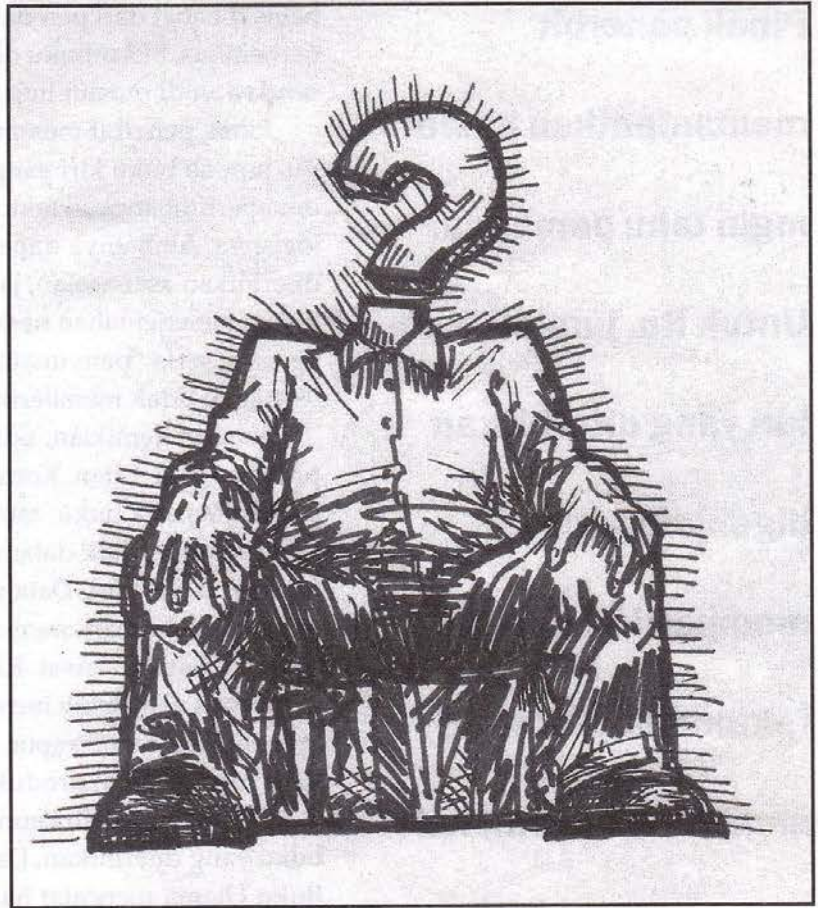
Pihak penerbit memanfaatkan hasrat ingin tahu pembaca. Untuk itu, jumlah buku kiri yang diterbitkan digenjot tanpa mempertimbangkan faktor edukatif yang menjadi konsekuensi logisnya.

habis dibabat dari peredaran. Namun setelah angin keterbukaan berhembus, buku-buku dengan tema-tema kiri bermunculan bak cendawan di musim hujan.

Pihak penerbit memanfaatkan hasrat ingin tahu pembaca. Untuk itu, jumlah buku kiri yang diterbitkan digenjot tanpa mempertimbangkan faktor edukatif yang menjadi konsekuensi logisnya. Akibatnya dapat kita duga, buku-buku kiri tersebut diterbitkan asal-asalan, jauh dari tuntutan kualitas. Hal ini terpotret dalam penerjemahan naskah yang tidak pas, pilihan diksi yang ngawur, serta "penyunatan" naskah asli—oleh penerbit— jika dianggap tidak memberikan *output* ekonomi secara cepat.

Namun demikian, tidak selamanya "*hot topic*" selalu menjadi prioritas penerbitan. Konsistensi pembangunan humanisme melalui pilihan tematik buku, tampaknya menjadi sesuatu yang masih mahal. Pergeseran tematik dalam dimensi kuantitatif, cukup menerangkan fenomena tersebut. Data yang ada di IKAPI menunjukkan bahwa buku-buku humaniora mulai ditinggalkan. Tren tema-tema politis seperti itu sudah lewat. Kini tren berganti dengan buku-buku agrobisnis yang lebih menjanjikan terobosan ekonomi bagi pembaca. Penerbit segera merespon dengan menggenjot produksi buku agrobisnis serta menurunkan produksi buku sosial humaniora.

Orientasi meraih keuntungan juga terlihat dengan rendahnya mutu buku yang diterbitkan. Dari sekian banyak buku yang beredar, Yayasan Buku Utama mencatat hanya 187 buah judul buku yang bermutu. Jika dipilah berdasarkan tema kajian, buku-buku ini terbagi menjadi 22 judul buku untuk kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, 47 judul buku untuk kajian sosial humaniora, 27 judul buku untuk kajian sastra, 75 buku anak-anak, serta 16 judul buku yang berasal dari terjemahan. Jumlah kuantitatif tersebut tentu saja mengecewakan bila kita menilik dan membandingkannya dengan keseluruhan jumlah kuantitatif produksi buku.

Penutup: Berayun di antara Dua Kutub

Realitas empiris yang kita hadapi memperlihatkan bahwa aktivitas penerbitan buku tidak diarahkan pada pembangunan dan pengembangan konsepsi humanisme. Determinisme pasar dalam penerbitan buku tidak mungkin dihilangkan.

Pada situasi seperti ini, kita seakan-akan dibawa ke kutub pesimis proyek kemanusiaan. Buku sebagai instrumen pendidikan tidak lagi dapat berperan secara murni:menegakkan aksiologi tujuan pendidikan yang bermuara pada humanisme. Dalam konteks ini, sebuah perceraian antara visi pedagogi dalam sebuah buku dengan kepentingan praksis yang ingin diraih sudah merupakan keniscayaan.

Namun demikian, masih ada celah dimana kompromi atas visi pedagogi dan kepentingan praksis dapat dipertemukan. Akan tetapi bukan pada wilayah aktivitas penerbitan, melainkan pada wilayah para pembaca. Visi pedagogi masih dapat diterjemahkan ke dalam praktik-praktik yang fleksibel. Dengan keterlibatan pembaca pada sebuah gagasan yang terurai di sebuah buku, maka kemungkinan refleksi masih terbuka. Sehingga, celah pembangunan humanisme secara samar masih menyiratkan harapan.

Pada tingkatan praksis, keperluan untuk refleksi harus melibatkan stimulus tertentu. Stimulus inilah yang akan membangkitkan kesadaran pembaca bahwa dirinya, sebagai manusia, dilekati oleh tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab moral. Tanggung

jawab intelektual menuntut adanya tindakan konkret yang menyangkut aktivitas manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan.

Bersamaan dengan itu, kepentingan untuk menyebarkan pengetahuan menjadi tidak terelakkan. Tanggung jawab moral seperti ini selalu terkait dengan kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup komunitas dimana dia hidup. Dari sini muncul satu usaha meminimalisir potensi negatif dan destruktif komunitas yang bersangkutan.

Kedua tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari proses pendidikan yang mencita-citakan humanisasi kehidupan manusia. Proses ini tentu dilalui oleh setiap manusia yang sedang melakukan pembelajaran. Sebuah proses untuk membangun satu epistemologi yang utuh dari kehidupan. Sebagaimana dinyatakan dalam uraian sebelumnya, pembangunan epistemologi ini melibatkan teks dan konteks. Dengan demikian, jika buku sebagai teks kurang dapat menjalankan fungsinya dan tidak mampu menyentil tanggung jawab intelektual dan moral manusia, maka masih ada satu pertautan manusia atas konteks. Sehingga, ia akan terbantu untuk tetap terusik dengan proyek humanisme.❒

Catatan Akhir:

[1] Pembagian atas wilayah aktivitas masyarakat ini mengacu pada konsepsi yang dirumuskan oleh Cohen dan Arato. Dalam salah satu ulasannya, mereka mendefinisikan karakteristik ketiga wilayah tersebut dengan berdasar pada orientasi yang berkembang pada masing-masing area. Lebih lanjut tentang konsepsi Cohen dan Arato dapat dilihat dalam Neera Chandoke, *State and Civil Society: Exploration in Political Theory* (New Delhi: Sage Publication, 1996), hal. 35.

[2] Semasa Orde Baru, pasca-fusi partai politik, peserta Pemilu dibatasi 3 kontestan. Dalam Pemilu 1955, tercatat 28 kontestan yang terdiri dari 27 partai politik dan 1 koalisi kontestan perorangan di bawah kepemimpinan politik R. Soedjono Prawirosedarso.

[3] Chandoke, *op. cit.*, hal. 35

[4] Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 38–40.

[5] *Ibid.*, hal. 58.

[6] Uraian lengkap mengenai pandangan Pierce dalam kaitannya dengan *habit formation* dapat dibaca dalam tulisan Ignas Kleden, *Basis*, tahun ke-45, Mei-Juni 1996, hal. 7-8.

[7] Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 333–347.

[8] Ross Poole, *Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 4–5.

[9] Lihat pemaparan Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 31.

[10] *Ibid.*, hal. 50. Dalam buku tersebut, Muhadi Sugiono mengutip tulisan Gramsci, *Selection from Prison Notebooks* (London: Lawrence and Wshart, 1971), hal. 176.

[11] Lihat *Kompas*, 10 Oktober 1999.

PENDIDIKAN DAN TRADISI MEMBACA BUKU DI INDONESIA
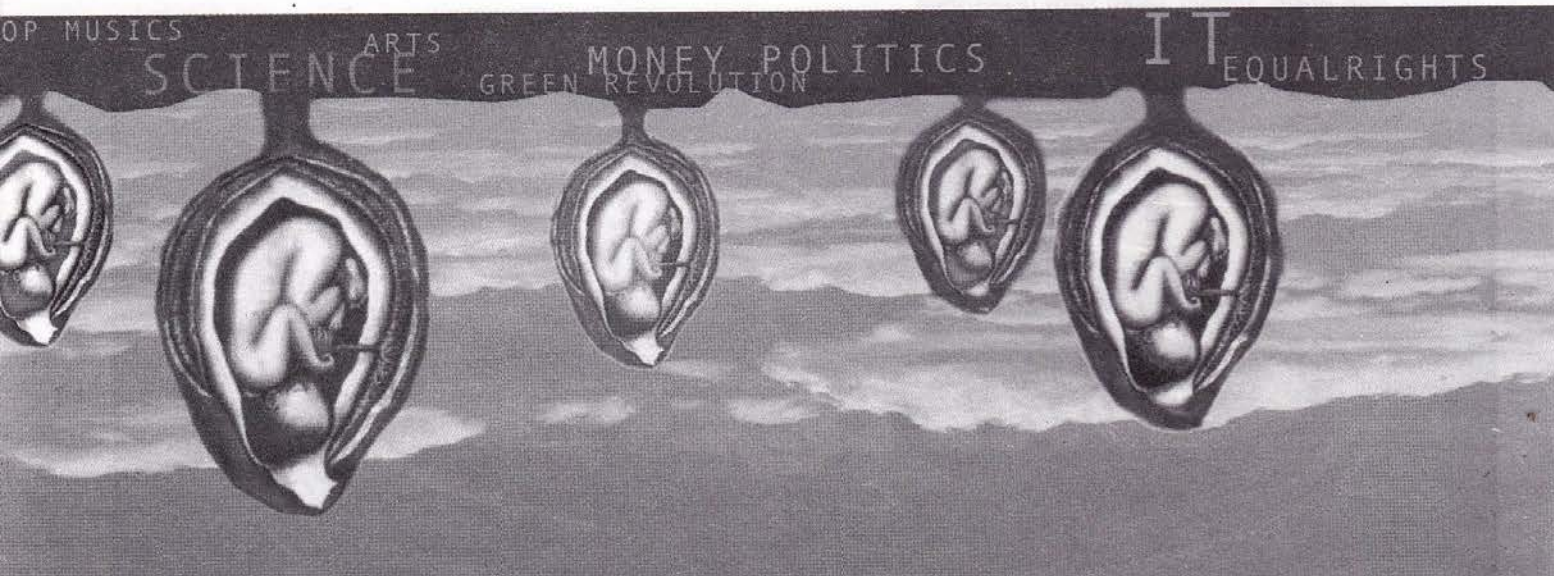
FABRIKASI.TITIK

Jauhani Muflih
Lahir di Purbalingga, kini sedang menyelesaikan studinya di Fakultas Psikologi UGM ('95). Tulisan-tulisannya dimuat di *Bernas*. Ia juga kontributor untuk buku *Menggugat Harmoni* (1999).

Joanne Kathleen Rowling, janda beranak satu, telah menyihir 60 juta orang,[1] yang sebagian besar anak-anak, dengan bukunya, *Harry Potter and the Sorcerer's Stone*. Di Amerika Serikat, ribuan orang rela antre untuk mendapatkan buku itu. Sementara di Inggris, anak-anak menanti dengan sabar untuk mendapatkannya pula.

Seorang anak yang ditemui Rowling di Inggris, dengan begitu hafalnya, menceritakan lima halaman pertama buku Harry Potter. Dan, ketika halaman habis, dia mengatakan, "Saya bisa melanjutkannya lagi."[2] Ketebalan buku Harry Potter yang sampai ratusan halaman tidak menyebabkan anak-anak bosan atau malas membacanya. Cerita yang mempesona dan membawa fantasi anak-anak ke dunia sihir yang mengagumkan menyebabkan mereka rela membaca buku Harry Potter sampai beberapa kali.

Buku dengan tokoh Harry Potter—anak yatim piatu yang mempunyai kekuatan sihir—berisi cerita mengenai olah sihir yang sebenarnya sudah sering diceritakan dalam sejumlah buku. Kemampuan penulisnya dalam mengungkapkan detail-detail cerita yang menggugah emosi dan fantasi pembaca, menjadikan buku tersebut tampil dengan warna lain dan menyajikan hal-hal yang baru. "Saya menulis untuk diri saya sendiri," demikian kata J.K. Rowling. Ucapan Rowling ini bisa jadi merupakan penyebab mengapa ia tidak menggunakan imajinasi anak-anak dalam penulisan bukunya. Hal inilah yang kemudian memunculkan dimensi baru dalam buku Harry Potter yang tidak dimiliki oleh buku anak-anak lainnya.

Apa yang telah dilakukan J.K. Rowling patut dihargai sebesar-besarnya. Di tengah budaya komsumtif anak-anak yang dikemas dalam *internalization of children's culture*, buku Harry Potter tampil memikat. Dia berhasil mengembalikan anak-anak kepada kebiasaan yang mendidik, yakni membaca buku. Hal inilah yang memberi inspirasi Ratu Elizabeth untuk memberi penghargaan *Order of the British Empire*[3] bagi J.K. Rowling. Dia pun kemudian mencatatkan diri dalam deretan penulis cerita-cerita anak kelas dunia seperti Hans Christian Andersen, Jules Vernes, Mark Twain, Enid Blyton, Roald Dahl, dll.

Mencoba membayangkan 60 juta orang telah membeli buku Harry Potter, dan tentu saja lebih banyak lagi yang membacanya, merupakan suatu keajaiban bagi dunia perbukuan. Dan lebih luas lagi, bagi upaya untuk mendidik anak agar mampu mengembangkan kebiasaan membaca buku. Hal ini pada titik tertentu bisa diartikan sebagai sebuah perlawanan yang cukup berarti atas berbagai instrumen hiburan, terutama televisi, yang lebih kerap memunculkan pemiskinan nilai-nilai pendidikan. Persoalan mendidik anak dalam sebuah keluarga agar ia mampu mengembangkan kebiasaan membaca buku, merupakan persoalan yang dihadapi oleh seluruh keluarga di dunia. Pemikiran yang sama dikemukakan oleh Ratu Elizabeth.[4] Ratu Inggris ini sungguh menghargai jasa J.K. Rowling dalam memikat anak-anak untuk membaca buku.

Kompleksitas persoalan pengembangan tradisi membaca buku dalam sebuah masyarakat atau lebih luas lagi bangsa, di setiap negara di dunia ini jelas berbeda-beda tingkatannya. Di Jerman, telah berkembang dengan baik tradisi membaca buku. Pameran buku *Frankfurt Book Fair* 2000 yang selalu disebut terbesar, tak akan sukses tanpa dukungan dari masyarakat Jerman yang telah mampu mengembangkan tradisi membaca buku. Hal ini dikuatkan oleh Peter Weidhaas, Direktur *Frankfurt Book Fair*, 1996. "Membaca memang masih menjadi kebiasaan kebanyakan orang Jerman," tuturnya, "Siapa saja yang datang ke Frankfurt bisa membuktikannya."[5]

Mencoba membandingkan dan menilai tradisi membaca buku di negeri kita, Indonesia, dengan Jerman atau sejumlah negara industri maju lainnya, adalah sebuah kesalahan. Kemajuan luar biasa yang dicapai negara-negara indusri maju yang juga didukung oleh kekuatan modal (*capital*) yang sangat besar, tentu saja amat berpengaruh besar pada kemudahan untuk mengaktualisasikan potensi orang-orang yang hidup di dalamnya. Membangun tradisi membaca buku di negeri-negeri ini tentu saja bukan permasalahan kompleks.

Namun, apabila kita melihat fenomena di negara-negara dunia ketiga yang masih belum bisa lepas dari permasalahan ekonomi yang kompleks, maka persoalan mengembangkan tradisi membaca buku tetap masih menyimpan segudang permasalahan yang kompleks. Indonesia pun tak lepas dari

persoalan ini. Jalinan sejumlah permasalahan, baik ekonomi, politik, pendidikan, SDM,dll., memunculkan kompleksitas permasalahan pengembangan tradisi membaca buku. Sejumlah faktor yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kompleksitas permasalahan ini sebenarnya dapat diidentifikasi satu persatu. Faktor-faktor inilah yang mungkin mampu menjelaskan fenomena ini secara lebih mendalam. Tulisan ini mencoba menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan permasalahan pengembangan tradisi membaca buku di Indonesia, menjadi cukup sulit.

Faktor globalisasi, atau lebih khusus lagi globalisasi neoliberal, akan dijelaskan dalam tulisan ini. Hal ini bertujuan memberi pengertian kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga dan juga Indonesia tidak terlepas dari faktor itu. Peran sekolah akan dijelaskan untuk mencari akar permasalahan lebih lanjut. Akhirnya, keluarga menjadi titik temu untuk membuat perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan saat ini.

"Epidemi Global" Bernama Globalisasi

Globalisasi telah dianggap sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan oleh seluruh negara di dunia. Tak ada yang dapat lepas dari sinaran globalisasi yang masuk dan menembus wilayah geografis dan kehidupan di seluruh dunia. Catatan seorang reporter mingguan *Aera* (Jepang) yang sedang meliput siaran transnasional di wilayah Asia Pasifik memperjelas fenomena ini. Reporter yang mingguannya ber-*holding company* pada *Asahi-Shimbun* ini, ketika sampai di sebuah dusun terpencil di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, setiap malam menyaksikan penduduk dusun itu menangkap siaran CNN. " Saya benar-benar merasa bahwa saya sungguh-sungguh berada di tengah-tengah Asia," tulis sang reporter.[6] Informasi yang diperoleh pun tidak lagi perlu menunggu waktu. Di mana pada saat yang sama, penduduk Njuwok, di Kecamatan Turen, Malang, sama-sama bisa mendapatkan informasi seperti penduduk Delaware, sebuah daerah yang tak jauh dari New York.[7]

Gambaran sekilas ini membangunkan kesadaran kita, betapa besarnya pengaruh globalisasi. Hampir setiap wilayah kehidupan, setiap individu dalam kehidupan ini bisa dikatakan tidak terlepas dari pengaruhnya. Lewat inovasi teknologi, integrasi ekonomi, dan jaringan komunikasi global (*global communication net*)— sebagai instrumen globalisasi— , pengaruh itu ditanamkan. Jadi, sikap, perilaku, dan pikiran yang akhirnya membentuk karakter dan kepribadian individu tidak terlepas juga dari pengaruhnya. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinamakan "globalisasi kognitif" (*cognitive globalization*)[8] yang didominasi Amerika Serikat sebagai sumber pembentuk *image* dan gaya hidup.

Televisi sebagai teknologi dasar, berperan besar dalam memelihara pengetahuan-pengetahuan mengenai image dan gaya hidup. Ia memandu bagaimana kehidupan yang 'baik' itu (*the good life*), ia membentuknya, tentu saja sesuai dengan profil kehidupan orang-orang di negara-negara industri maju.

Globalisasi akhirnya tidak semata-mata pencapaian ekonomi dan teknologi, tetapi juga implikasi-implikasi sikap maupun cara hidup manusia. Arus teknologi, ekonomi, dan komunikasi yang melewati diferensiasi atas bangsa, keluwesan pasar menyeberangi batas-batas antar negara, telah melahirkan semacam subkultur yang bersifat global,[9] yang sebagian besar diwakili oleh kaum muda kelas kaya dan menengah di kota-kota. Sikap dasar yang dimiliki lebih terfokus pada pragmatisme yang berpusat pada uang, barang-barang konsumsi, hiburan, karier,dan sebagainya.

Fenomena ini menghadirkan permasalahan yang kompleks bagi bangsa-bangsa yang menjadi "objek" globalisasi. Persoalan pembangunan sikap, pikiran, dan kebiasaan bermuara pada persoalan terbentuknya karakter dan kepribadian individu. Persoalan inilah yang pada gilirannya akan menentukan pengembangan sebuah potensi kemanusiaan yang konstruktif.

Tradisi membaca buku sebagai aktivitas konstruktif untuk merangsang perkembangan potensi individu, mendapatkan lawan yang sangat berat dari kebiasaan-kebiasaan yang lebih menekankan prinsip kesenangan (*pleasure principle*) yang ditawarkan oleh mesin globalisasi. Membaca memang lebih sulit dibandingkan dengan melihat atau mendengar. Membaca lebih membutuhkan kemampuan imajinasi, fantasi, refleksi, dan proses kritik. Sementara, dalam aktivitas melihat atau mendengar, "kenyataan" relatif ditampilkan secara jelas.

Sikap-sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup baru yang ditawarkan oleh globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah diterima oleh hampir sebagian besar kelas atas dan menengah perkotaan. Walaupun sikap,nilai, dan gaya hidup itu secara frontal berlawanan dengan sikap, nilai, dan gaya hidup yang diperjuangkan kelas pinggiran.[10]

Mal-mal, plaza, dan pusat-pusat perbelanjaan sudah menjadi semacam "pusat kegiatan"dan "pusat kebudayaan" kota besar menegaskan realitas ini.[11] Belanja di mal bukan hanya belanja produk, tetapi membeli simbol untuk menunjukan status dan identitas masyarakat konsumer. Belanja kosmetik yang bisa dikatakan kebal resesi, juga bisa ditambahkan di sini. "Rasanya tidak ada wanita yang

berani keluar rumah tanpa memakai bedak dan lipstik," demikian kata Ny. Martha Tilaar, pemilik kelompok usaha kosmetik PT Matina Berto.[12] Kata-kata yang sarat muatan ideologis ini sebenarnya sangat menyinggung harkat dan martabat perempuan. Karena, dimaknai bahwa kecantikan alami yang dimiliki perempuan tidak berarti sebelum dipoles dengan bedak dan lipstik. Inilah gaya hidup yang selalu dicitrakan melalui bintang-bintang sinetron ataupun iklan.

Budaya konsumen (*consumer culture*) yang dikonstruksikan secara canggih lewat budaya promosi (*promotional culture*) merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dalam masyarakat yang semakin kapitalistik ini. Kebudayaan ini merupakan hasil rekayasa sosial dengan skala yang maha luas yang didukung oleh institusi-institusi ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, teknologi, dll. Tujuannya, merangsang orang untuk lebih konsumtif terhadap produk-produk industri. Realitas ini didasarkan pada asumsi bahwa ekspansi pasar tidak akan menuai hasil bila tidak ada perubahan sosial di lingkungan konsumen. Suatu perubahan nilai budaya perlu dilakukan agar terbentuk *consumer culture. Consumer culture inilah* yang akan menguntungkan negara-negara industri.[13]

Perilaku konsumtif masyarakat ternyata juga melanda anak-anak. Perilaku konsumtif anak-anak Indonesia merupakan akibat tak terhindarkan dari merebaknya sebuah "epidemi global", yaitu *Internationalization of Children's Culture.*[14] Budaya konsumen (*consumer culture*) direkayasa agar dapat diterima oleh siapapun tanpa mengenal perbedaan budaya. Di sini, iklan menjadi instrumen yang paling efektif untuk mempromosikan " sebuah sistem nilai dan gaya hidup baru ". Sistem inilah yang akan menjadi jalan tol untuk meloloskan semua tujuan itu. Iklan di televisi dianggap paling berpengaruh dalam mendongkrak omzet penjualan dan menyuburkan perilaku konsumtif anak-anak. Hal ini terbukti dengan pembelanjaan iklan televisi yang jumlahnya paling besar di antara media lainnya (lihat Tabel)

Globalisasi akhirnya tidak semata-mata pencapaian ekonomi dan teknologi, tetapi juga implikasi-implikasi sikap maupun cara hidup manusia.

Tabel Belanja Iklan di Indonesia 1992–1996

	1992	1993	1994	1995	1996
Surat Kabar	337	484	743	1.075	1.538
Majalah	95	108	155	211	291
Radio	100	113	139	170	190
Sinema	10	10	11	9	12
Televisi	390	613	1.062	1.638	2.357
Luar Ruang	55	53	176	230	300
Total	1.072	1.381	2.286	3.335	4.682

Sumber: *Prisma*, No. 2/1997

Grafis: Fendi.Felix
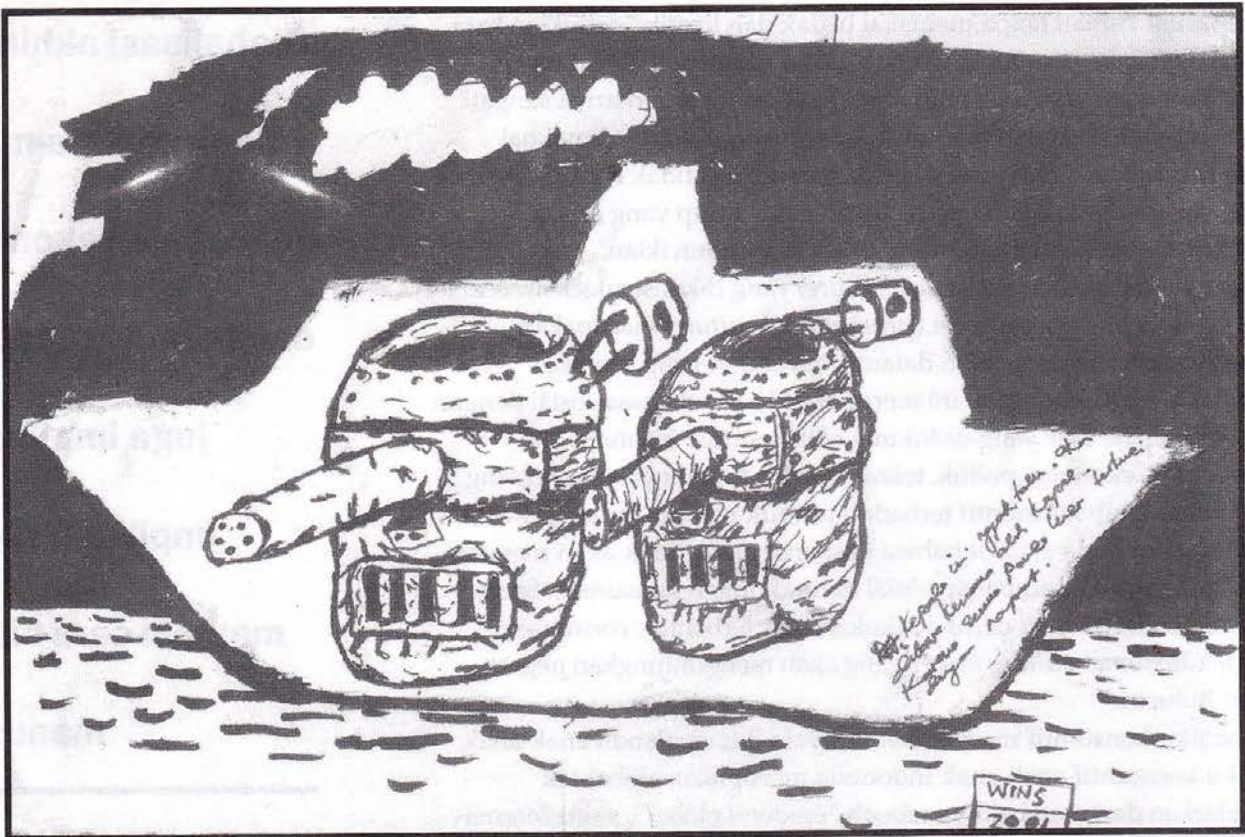
WINDU

Mengapa anak-anak dijadikan salah satu objek pasar oleh industriawan?[15] *Pertama,* rasio anak-anak belum befungsi secara maksimal. Emosi lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua,* rentang waktu kehidupan anak yang masih panjang memungkinkan kesempatan konsumsi yang cukup lama. *Ketiga,* emosi yang masih dominan memungkinkan mereka memiliki loyalitas produk yang cukup tinggi. *Keempat,* konstruksi kepribadian mereka masih lemah sehingga mudah dipengaruhi. *Kelima,* pilihan terhadap sebuah komoditi dengan merek tertentu dapat dipaksakan kepada orang tuanya.

Bisnis memang masih menjadi panglima dalam industri televisi swasta di Indonesia.[16] Kredo ini ditengarai memuluskan jalan para industriawan untuk mengontaminasi 47 juta anak Indonesia dengan "epidemi global" tersebut. Yang menjadi perhitungan setiap stasiun televisi adalah bagaimana agar penonton rela "menongkrongi" stasiunnya dan dengan begitu, peringkat tayangan (*rating*) dapat diketahui posisinya. Posisi inilah yang menentukan seberapa banyak iklan akan masuk dan, tentu saja, angka-angka rupiah yang akan diperoleh.

Harian Kompas pernah menurunkan berita *Televisi Dapat Jadi Sarana Menumbuhkan Minat Baca.*[17] Tulisan itu berisi penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan televisi untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan konstruktif bagi individu. Tetapi, ini pun belum dapat dijadikan pembelaan yang kuat. Selain itu, program-program yang disebut sebagai promosi membaca (*reading promotion*) belum ditampilkan di televisi. Padahal, berkaitan dengan upaya meningkatkan minat baca, televisi justru diharapkan kian giat membuat program promosi membaca.

Apa yang disebut sebagai *cultural imperialism hyphothesis*[18] dalam konteks ini telah menjadi realitas yang sebenarnya. Sejumlah argumen bantahan yang mencoba mengingkari kenyataan ini adalah tanda semakin akutnya absurditas diri dan alienasi diri terhadap realitas

sosial. Dari pemandangan nyata yang kita baca dan lihat sehari-hari, apa yang disebut sebagai "globalitas yang bertanggung jawab " (*responsible globality*)[19] dan "globalisasi positif"(*positive globalization*), sebagai lawan dari "globalisasi negatif" (*negative globalization*)[20] hanyalah retorika utopis yang diformulasikan dengan landasan rasional yang minim. Bagaimana kita percaya implikasi positif globalisasi ketika 85 negara ternyata berada dalam kondisi yang lebih buruk dalam banyak hal dibandingkan dengan satu dekade lalu?[21]

Kondisi Indonesia pun tidak lebih baik dari beberapa tahun lalu. Laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) 1999 menempatkan Indonesia di urutan 105 dari 174 negara di dunia. Sedangkan Singapura, di urutan 22, Brunei Darussalam 25, dan Filipina di peringkat ke 77. Laporan ini juga menyebutkan, seperlima penduduk dunia yang hidup di negara-negara berpenghasilan tinggi menguasai 86 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Selain itu, mereka juga menguasai 82 persen pasar ekspor dunia, 68 persen investasi langsung, dan 74 persen saluran telepon dunia.[22]

Realitas globalisasi ini dengan jelas dikemukakan oleh Fidel Castro Ruz[23] dalam sebuah analogi yang cukup mengena, yakni:

> Globalisasi adalah suatu realitas objektif yang bisa lebih memperjelas fakta bahwa kita sebenarnya merupakan penumpang dalam satu kapal yang sama, yakni bumi tempat kita hidup. Tapi, para penumpang kapal tersebut mengadakan perjalanannya dengan kondisi-kondisi yang sangat berbeda.Minoritas-kecil mengadakan perjalanan di kabin yang sangat mewah, dilengkapi fasilitas internet, telepon selular, dan memiliki akses ke jaringan-jaringan komunikasi global. Mereka bisa menikmati makanan yang bergizi, sehat, dan berlimpah, serta bisa mendapat pasokan air bersih. Mereka memperoleh pelayanan atau perawatan kesehatan yang canggih dan bisa menikmati kebudayaan.Sementara, mayoritas-berlimpah yang sengsara mengadakan perjalanan dalam kondisi seperti pada zaman perdagangan budak (yang mengenaskan) dari Afrika ke Amerika di zaman kolonial pada masa lalu. Sebagian besar penumpang kapal tersebut, yakni sekitar 85 %, berada dalam kabin yang penuh sesak dan kotor, kelaparan, penyakitan, dan tak ada yang menolong.

Fenomena di Indonesia dapat mempertegas kembali kenyataan ini. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1998, kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 49 juta jiwa.[24] Hal ini membawa implikasi pada anak-anak di Indonesia. Menurut catatan para pengamat, kualitas gizi anak-anak mengalami kemerosotan luar biasa. 35 persen dari 22 juta balita Indonesia mengalami kekurangan gizi, artinya satu dari dua anak Indonesia mengalami kekurangan gizi; dan sekitar12 juta jiwa dari 24 juta anak, atau 3,2 persen di antaranya mengalami kurang gizi berat.[25]

Sementara itu, kondisi pendidikan anak-anak juga tidak lebih baik. Sebelum krisis moneter, angka putus sekolah sudah mencapai 1,2 juta anak tiap tahun untuk tingkat SD dan 450 ribu anak tiap tahun untuk SLTP. Pada tahun 1997, jumlah anak SD yang putus sekolah sebanyak 833.000 anak dan tahun 1998 meningkat 10,27 persen menjadi 919.000. Sedangkan anak SLTP yang mengalami putus sekolah meningkat dari 365.000 anak pada tahun 1997 menjadi 643.000 anak pada tahun 1998.[26]

Melihat kondisi ini, maka betapa sulitnya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Buku sebagai instrumen yang paling efektif untuk merangsang pertumbuhan potensi manusia-manusia Indonesia, mendapatkan dilema besar pada *the cultural dilemma of poverty*[27] , yakni mereka yang mampu membaca, tetapi tidak mampu membeli. Mereka inilah yang menempati porsi sangat besar di Indonesia. Sementara, mereka yang mampu membeli tetapi tidak memiliki minat baca, hanya menempati porsi yang sangat kecil. Mereka inilah yang sering diupayakan untuk mampu mengembangkan minat baca. Ini merupakan dilema orang kaya dan kelas menengah—semacam *the cultural dilemma of affluence*.[28]

"Zeitgeist" Pendidikan

Menurut pemikiran sistem dunia Wallerstain, seperti dikutip Heru Nugroho[29] , Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan pinggiran. Persoalan-persoalan (ekonomi, politik, pendidikan, SDM, dll) yang dihadapi Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya merupakan implikasi yang tak terhindarkan dari globalisasi neo-liberal.[30] Permasalahan ini sungguh rumit dan bisa dikatakan tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Negara-negara industri maju yang dipimpin Amerika, jelas tidak akan rela hati mengubah kebijakannya (terutama ekonomi) demi terciptanya sebuah sistem dunia yang berkeadilan.

Namun begitu, bangsa Indonesia tetap bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya atau membuat kondisi bangsa menjadi lebih baik dari sekarang ini. Berkaitan dengan masalah pendidikan dan lebih khusus lagi tentang pengembangan tradisi membaca buku, maka ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan. Hal ini jelas

berkaitan dengan institusi pendidikan formal yang dinamakan sekolah, serta secara khusus berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan mekanisme pendidikan di Indonesia.

Sekolah sebagai institusi pendidikan sebenarnya menanggung beban dan amanat yang sangat berat, yaitu mendidik anak-anak Indonesia. Tugas mendidik sebenarnya bukan cuma tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan pemerintah tentang otonomi pendidikan sebenarnya bisa dikatakan sebagai upaya negara untuk mengelak dari tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anak Indonesia.

Apakah sekolah di Indonesia saat ini telah memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM)? Realitas menunjukkan, tidak. Apa yang dikemukakan oleh Joseph Kizerbo,[31] mantan Menteri Pendidikan Burkina Faso relevan untuk diperhatikan, yakni:

> Pendidikan di negara-negara terbelakang merupakan cermin dan sekaligus akibat dari lingkungan yang serba terbelakang, yang menampakkan kekurangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedikit demi sedikit, dan disinilah terletak ancaman bahaya yang sebenarnya, pendidikan di negara-negara terbelakang tersebut justru menjadi salah satu faktor penyebab keterbelakangan itu sendiri.

Pendidikan di Indonesia yang dijalani anak didik, yang hampir seluruhnya ditujukan untuk proses mobilitas vertikal, ternyata hanya menghasilkan harapan kosong. Ini memang ironis. Seorang buruh tani yang menyekolahkan anaknya dengan harapan, ternyata mendapatkan harapan yang sia-sia. Setelah menyelesaikan sekolah di SLTP, dan tidak melanjutkan ke SLTA karena tidak ada biaya, anaknya tetap tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. Hampir seluruh pekerjaan di sektor modern mensyaratkan kualifikasi SLTA. Meski ada juga yang SLTP, tetapi persaingannya sangat ketat, sehingga ia tersungkur dari kompetisi. Akhirnya, bisa jadi, ia pun harus menjadi buruh tani seperti orang tuanya.

Apa arti dan manfaat pendidikan apabila pendidikan itu sendiri tidak mampu membekali anak didik dengan instrumen efektif untuk bertahan hidup (*survive*) dan mampu mengembangkan potensi kemanusiaanya? Ini persoalan dilematis.

Sejumlah orang memang berupaya melakukan proses reformasi pendidikan atau menyajikan bentuk-bentuk pendidikan alternatif. Romo Y.B.Mangunwijaya merupakan salah satunya. Ia memprakarsai pendidikan dasar bagi anak miskin yang telah dipraksiskannya dalam suatu *action research* di SD Eksperimental Kanisius di Mangunan, Berbah, Sleman. Eksperimen ini dimulai sejak Agustus 1993 dan direncanakan berlangsung hingga tahun 2003.[32]

Romo Mangun melakukan praksis pendidikan itu karena sistem pendidikan nasional lewat institusinya yang bernama sekolah, belum mampu melakukan apa yang dinamakan proses pendidikan. Sekolah hanya melakukan proses pengajaran saja. Proses pendidikan melibatkan usaha untuk memperoleh pengetahuan (*the act of knowing*), sementara pengajaran lebih bersifat sebagai penyetoran pengetahuan dan kata-kata (*words deposit*) serta ditambah dengan sedikit latihan akademis (*academic exercise*). Pengajaran hanya menempatkan siswa seperti layaknya bejana kosong yang siap diisi. Jadi, guru hanya melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang kemudian diterima tanpa proses kritik dan reflektif.

Aktivitas membaca sebagai substansi dari perilaku belajar (*the act of study*) dan usaha untuk memperoleh pengetahuan (*the act of knowing*) dalam sekolah, lebih dimaknai sebagai aktivitas yang bersifat mekanis dan repetitif. Hal ini jelas membawa efek negatif dalam bentuk perasaan bosan, menjemukan, menyebalkan, malas, dll. Faktor ini yang menjadi salah satu sebab mengapa aktivitas membaca dirasakan sebagai sebuah beban dan tidak membawa perasaan menyenangkan bagi siswa. Kebutuhan akan kosakata yang dapat membantu siswa mengonstruksikan bahasa pemikirannya (*language-thought*) tidak muncul dalam aktivitas membaca di sekolah.

Parameter kualitas perilaku belajar siswa (*the act of study*) lebih ditentukan oleh nilai kuantitas, yakni seberapa banyak buku yang dibaca, hafalan yang di kuasai, dan soal-soal ujian yang dapat diselesaikan. Parameter ini telah mendistorsikan makna perilaku belajar. Padahal, menurut Paulo Freire,[33] belajar (*studying*) merupakan kegiatan yang berat dan tidak sederhana, ia membutuhkan sikap kritis-sistematik (*systematic critical attitude*), serta kemampuan intelektual untuk memahami realitas di sekelilingnya. Sikap kritis-sistematik tersebut tidak dapat dihasilkan oleh pendidikan bergaya bank (*banking education*). Siswa hanya dianggap sebagai bejana kosong yang siap diisi. Belum lagi, ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan siswa hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan.

Guru sebagai seseorang yang dianggap lebih, pada tataran realitas ternyata tidak mampu menumbuhkan benih-benih kesadaran dan kemampuan kritis siswa secara maksimal. Realitas dunia pendidikan di Indonesia yang selalu tidak terlepas dari campur tangan negara, kemungkinan besar menjadi

penyebabnya. Proses *brainwashing* dan indoktrinasi secara terus menerus yang diterima guru membawa dampak yang sangat merugikan bagi upaya pengembangan kemampuan dan kecerdasan guru. W.S. Rendra juga mengemukakan hal yang sama. Proses indokrinasi selama pemerintahan Orde Baru masih membawa implikasi negatif yang sangat sulit dihapuskan dari dunia pendidikan kita. Kemampuan minat baca yang rendah merupakan salah satu contohnya.[34]

Sebuah analisis cermat tentang hubungan guru dan siswa, mengungkapkan sebuah watak bercerita (*narrative*) yang dimiliki guru. Watak ini merupakan hasil konstruksi secara tidak langsung dari sistem pendidikan nasional yang membenarkan mitos pendidikan: guru lebih tahu dalam banyak hal dibandingkan siswanya. Hubungan ini melibatkan seorang subyek yang bercerita (guru) dan objek-objek yang patuh dan mendengarkan (siswa).[35] Proses dialogis di sini menjadi sesuatu yang "haram" untuk dilakukan. Apa yang dikemukakan dan diceritakan mengenai sebuah realitas terlihat kaku dan tidak hidup. Realitas yang diceritakan pun seolah-olah sesuatu yang tidak bergerak, statis, terpisah dari realitas lain, dan juga terpisah dari realitas kehidupan siswa. Kata-kata yang muncul dari cerita seakan-akan kosong dan tanpa makna.

Permasalahan ini bisa disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru untuk mendidik siswa dengan metode pendidikan yang benar-benar mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaan siswa. Masalah struktural bisa menjadi sebab mengapa guru mempunyai permasalahan itu. Sudah rahasia umum kalau gaji guru yang kecil tidak akan memberi kesempatan padanya untuk menambah wawasan dan kemampuannya. Buku-buku berkualitas yang dapat merangsang perkembangan pemikiran guru, sangat sulit didapatkan karena permasalahan finansial. Sebuah studi yang benar-benar ditujukan untuk meneliti dan mengembangkan potensi guru, juga sangat sulit didapat di Indonesia. Padahal, ini sangat berguna untuk melakukan proses evaluasi dan refleksi atas sejumlah kegiatan mendidik guru. Sebuah pandangan dunia (*world view*) menjadi sangat sulit tumbuh. Pandangan dunia (*world view*) inilah yang dimiliki Romo Mangun dan menggerakan hati dan pikirannya untuk membangun metode pendidikan yang benar-benar dilandasi rasa kemanusiaan dan keadilan.

Wabah politik pendidikan yang dikonstruksikan oleh negara, khususnya yang paling mengerikan pada zaman Orde Baru, telah menuai hasil pahitnya. Sebagian besar guru yang saat ini mengajar di sekolah-sekolah, tidak terlepas dari kontaminasi dokrin-dokrin Orde Baru yang menyesatkan.. Era reformasi yang saat ini sedang digulirkan dengan lambat, tetap tidak mampu menghapus doktrin-doktrin Orde Baru di dalam diri guru. Proses *brainwashing* dan indoktrinasi yang dilakukan dalam rentang waktu yang sangat lama jelas tidak mungkin dapat diobati dalam rentang waktu yang pendek. Hal ini berarti, untuk rentang waktu beberapa tahun atau bahkan sepuluh tahun ke depan jelas tidak akan dapat dihasilkan *output* pendidikan, yakni siswa yang kritis, cerdas, tinggi moralitasnya,dll.

Francis Bacon berkata, "Saya tidak pernah dapat mengerti mengapa para pendidik melakukan ini (kesalahan) dengan sangat sering, khususnya perhatian mereka terhadap buku."[36] Bisa jadi,

menurut Paulo Freire,[33] belajar (*studying*) merupakan kegiatan yang berat dan tidak sederhana, ia membutuhkan sikap kritis-sistematik (*systematic critical attitude*), serta kemampuan intelektual untuk memahami realitas di sekelilingnya.
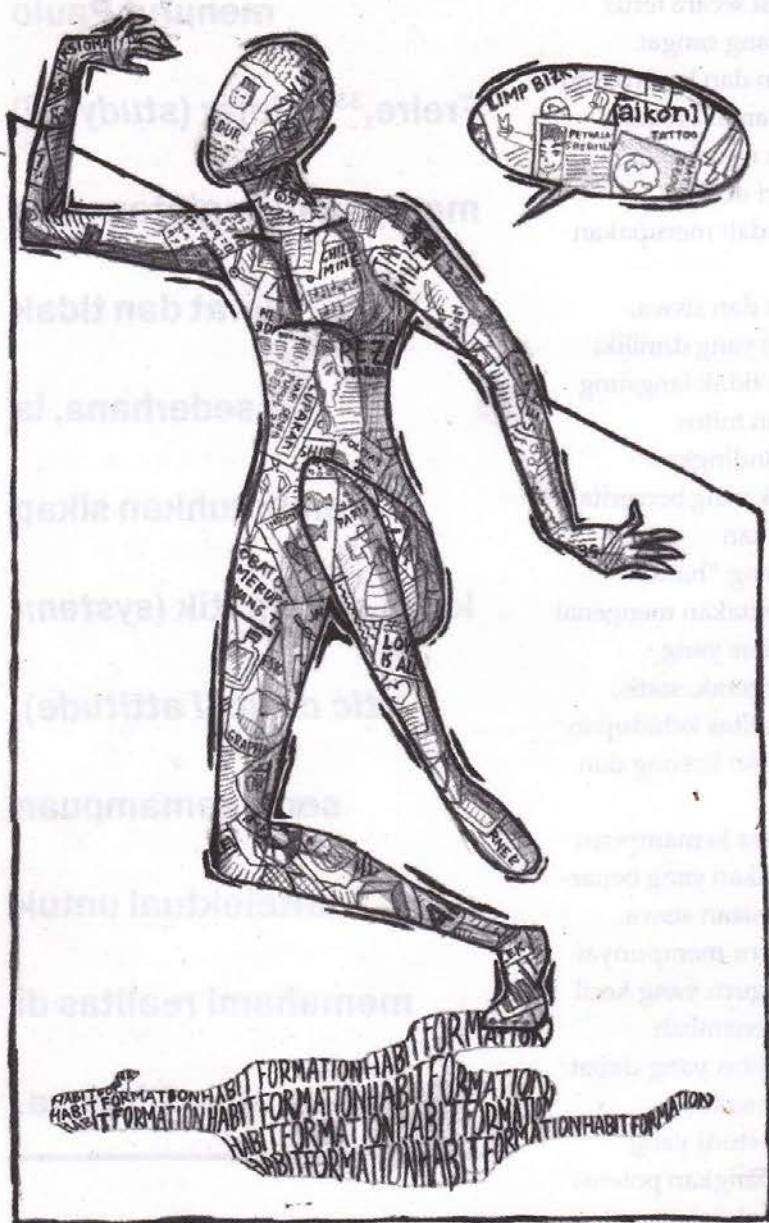
begitulah realitas guru di Indonesia. Mereka (guru) melakukan kesalahan yang sering terulang, dan pada keadaan tertentu, bahkan tidak menyadari kesalahannya. Contoh paling mudah terlihat dari aktivitas guru dalam mengajar siswanya membaca. Siswa sering dipaksa untuk membaca buku yang tidak tepat dalam waktu yang tidak tepat pula. Selain itu, memaksa mereka untuk membaca dengan cara yang salah. Aktivitas membaca direduksi hanya untuk membuat ringkasan (*summary*), mencatat tema atau *point-point* yang dianggap berarti, atau hanya untuk suatu ujian tertentu, dan kesemuanya itu harus sesuai instruksi dan petunjuk guru. Padahal, aktivitas membaca hanya ada satu cara, yakni menyenangi apa yang dibaca, tanpa instruksi dari orang lain, tanpa paksaan untuk mencatat *point-point* yang dianggap berarti, dan menciptakan komunikasi personal dengan pikiran penulisnya.[37]

GESTURE. JAKE

Perluasan kesempatan bersekolah yang ditonjolkan sistem pendidikan formal (*formal educational system*)[38] kita, merupakan faktor lain yang menyebabkan minimnya kapasitas guru untuk mendidik siswanya dengan metode pendidikan yang baik. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai kegagalan sistem pendidikan formal kita. Karena, kurang memperhitungkan kelemahan dan dampak negatifnya. Landasan pemikiran perluasan kesempatan bersekolah adalah upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup bagi kalangan penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja yang luas, memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih kemajuan, membaurkan berbagai suku dan etnis yang ada, serta mendorong terciptanya sikap-sikap positif yang serba modern. Harapan ini ternyata terlalu berlebihan dan pada tataran realitas malah bisa berlaku sebaliknya.

Kelemahan dan kekurangan sistem pendidikan yang berlaku sekarang ini, pada akhirnya, menyentuh apa yang dinamakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*).[39] Sistem pendidikan yang lebih mengacu pada upaya mendidik siswa agar dapat memenuhi sejumlah syarat dalam pasar kerja, akan mengacaukan orientasi siswa dalam menjalani proses pendidikannya. Sekolah tidak dimaknai sebagai upaya mencari ilmu, tetapi hanya ditujukan untuk memperoleh ijazah.

Sertifikasi pendidikan (*education certification*) atau ijazah ini menambah fenomena negatif dunia pendidikan kita. Mitos ijazah ini masih dianut dengan kuat oleh masyarakat Indonesia. Parameter untuk menilai kepandaian dan kemampuan seseorang ditentukan oleh seberapa banyak dan tinggi tingkatan ijazah yang diperolehnya. Seseorang yang memiliki ijazah SLTA dianggap lebih pandai dan mampu daripada orang yang hanya berijazah SD atau SLTP.

Sementara, seseorang yang telah mendapatkan ijazah di pendidikan tinggi (sarjana) dianggap lebih pandai dan mampu daripada yang hanya memperoleh ijazah SLTA. Fenomena jual-beli ijazah merupakan implikasi dari permasalahan ini.

Bagaimana sekolah mampu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan konstruktif ketika permasalahan kompleks yang dihadapi sekolah begitu menghantui? Harapan yang diberikan kepada sekolah untuk mengembangkan tradisi membaca bagi siswanya, ternyata terlalu berlebihan. Jelas sangat sulit mengawali tradisi membaca buku dari sekolah.

Memulai dari Keluarga

Leila S. Chudori,[40] wartawati budaya di sebuah majalah mingguan ibu kota, menuturkan bahwa kebiasaan membaca buku ia mulai sejak usia kanak-kanak. Ayahnya yang seorang wartawan dan ibunya yang bekerja di kedutaan mengenalkannya dengan tradisi membaca buku. Aktivitas membaca yang ia geluti sejak kanak-kanak ini, kemudian ditularkannya kepada Rain, anaknya. Rain pun akhirnya memiliki kebiasaan membaca. Keluarga Leila ternyata mampu mendidik anaknya agar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang konstruktif bagi dirinya. Sementara Leila pun mampu mengembangkan kebiasaan membacanya atas bantuan orang tuanya.

Fenomena di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya membentuk kebiasaan-kebiasaan konstruktif bagi anak. Keluarga merupakan titik awal dimulainya pendidikan bagi anak. Awal seorang anak berinteraksi dengan orang lain adalah di dalam keluarga. Awal pertumbuhan anak adalah masa yang paling krusial untuk menanamkan sejumlah kebiasaan baik. Keluarga pun tetap menjadi tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebiasaan-kebiasaan konstruktif. Meski, seorang anak telah tumbuh dewasa. Keluarga adalah tempat yang terbaik untuk melakukan proses pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertahanan terakhir bagi anak untuk bisa mengembangkan dirinya.

Namun, upaya untuk mendidik anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan yang konstruktif termasuk kebiasaan untuk membaca buku, ternyata membutuhkan sejumlah pengorbanan atau biaya yang tidak sedikit. Orang tua juga harus mempunyai keluasan wawasan. Keluarga Leila bisa dikategorikan sebagai keluarga kelas menengah yang dalam pemenuhan kebutuhan materiilnya relatif tidak mengalami kesulitan. Selain itu, Leila dan suaminya, Arief Budiman, sudah tidak diragukan lagi keluasan wawasan pengetahuannya. Hal ini tentu saja akan memudahkan mereka merencanakan dan membuat metode pendidikan yang paling tepat bagi anak mereka. Tetapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya: secara finansial, tidak ada dukungan, keluasan pikiran pun menjadi masalah?

Jelas, ini akan menghasilkan permasalahan yang jauh lebih rumit. Fenomena keluarga Leila pada tataran realitas di Indonesia cukup sulit untuk ditemukan, atau hanya sedikit jumlahnya. Pada umumnya, keluarga-keluarga di Indonesia menganggap buku (membaca) bukanlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Membeli dan membaca buku dianggap sebagai beban dan membuang-buang waktu. Buku, dalam pemikiran mereka, tidak ada relevansinya dengan arti atau makna kehidupan dan kebahagiaan yang ingin mereka peroleh. Sikap hidup ini didasari pragmatisme. Suatu sikap yang lebih mementingkan hasil daripada proses, menyukai sesuatu yang instan dan cepat, diperoleh tanpa usaha yang keras, hanya menyukai sesuatu yang terlihat secara kasat mata, malas mencari makna di belakang realitas, dan selalu menggunakan materi untuk menilai segala sesuatu.

Hal inilah yang diklaim sebagai penyebab mengapa jumlah buku yang diterbitkan di Indonesia masih minim bila dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya. Belum dianggapnya buku sebagai kebutuhan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia, menyebabkan permintaan terhadap buku tidak sebanyak permintaan produk-produk industri lainnya. Apa yang dikemukakan oleh majalah mingguan Tiras dalam sebuah iklannya yang dikutip oleh Daniel Dhakidae[41] menggambarkan realitas ini. Jumlah judul buku baru yang diterbitkan di Indonesia hanya 0,0009 persen dari total penduduknya. Artinya, 9 judul buku untuk setiap sejuta penduduk. Jauh bila dibandingkan rata-rata negara berkembang, 55 per sejuta penduduk, dan amat jauh bila dibandingkan negara maju yang 513 persejuta penduduk. Indonesia juga hanya menerbitkan 3.000 judul buku setiap tahun, sementara Malaysia, dengan penduduk hanya 20 juta jiwa atau kurang lebih sepersepuluh penduduk Indonesia, menerbitkan 8000 judul buku pertahun.[42]

Sedikitnya jumlah buku yang beredar di Indonesia menjadi permasalahan karena ini membatasi pilihan bagi para peminat buku. Persoalan kualitas buku menjadi permasalahan yang lain lagi. Yayasan Buku Utama (YBU) yang setiap tahun memberi penghargaan kepada buku bacaan anak yang bermutu, pada tahun 2000 tidak mengeluarkan penghargaan. Karena, buku yang dianggap layak masuk nominasi tidak ada.[43] Buku-buku yang beredar didominasi oleh komik, yang menurut beberapa pengamat buku, kurang mampu merangsang fungsi kognitif anak. Alasannya, pengarang hanya menekankan pesan alur cerita, bukan sejumlah alasan

rasional mengapa cerita atau isi buku dikonstruksikan. Bahasa komik juga sepotong-sepotong,sehingga kurang mampu menggambarkan detail-detail cerita secara jelas.

Fenomena Harry Potter dan Pramoedya Ananta Toer sebenarnya dapat diambil hikmahnya. Kualitas buku yang ditulis J.K. Rowling dan Pramoedya jelas tidak diragukan lagi. Penghargaan-penghargaan yang mereka peroleh dapat menjadi parameter kualitas buku mereka. Buku yang ditulis J.K.Rowling, seperti yang dijelaskan di atas, telah terjual 60 juta buah selama kurang dari tiga tahun. Di Indonesia sendiri, buku ini juga mendapat sambutan yang sangat baik. Menurut Priyo Utomo dari Bagian Pemasaran Gramedia, buku pertama Harry Potter pada minggu I bulan September 2000 dicetak 15.000 eksemplar, jumlah yang sama dicetak pada minggu III Oktober, dan pada November 2000 sebanyak 50.000 eksemplar. Melihat perkembangan pasar, buku kedua langsung dicetak 30.000 eksemplar pada minggu I November, dan minggu IV sebanyak 50.000 eksemplar.[44]

Buku yang berkualitas membawa pengaruh yang positif bagi upaya pengembangan tradisi membaca buku di Indonesia. Buku terjemahan yang cukup banyak beredar di Indonesia sekarang ini sebenarnya bukan sebuah permasalahan, selama ia membawa implikasi positif dan merangsang minat baca. Meskipun, ada sejumlah keprihatinan karena 60 persen buku yang beredar di Indonesia adalah buku terjemahan.[45]

Penutup

Persoalan membangun tradisi membaca buku di Indonesia sebenarnya jalin-menjalin dengan sejumlah permasalahan lain. Masalah ekonomi, politik, pendidikan. SDM, dll. yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan sebuah jalinan permasalahan yang saling mempengaruhi dan saling mengakibatkan. Persoalan ekonomi tidak akan selesai secara maksimal bila permasalahan politik, pendidikan, SDM, dll. tidak diselesaikan secara baik juga. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa persoalan membangun tradisi membaca hanya berkaitan atau sebagian kecil dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah ekonomi, politik, SDM juga sangat mempengaruhi persoalan membangun tradisi membaca di Indonesia.

Persoalan pengembangan tradisi membaca buku juga tersangkut dengan persoalan globalisasi, atau lebih khusus lagi globalisasi neoliberal. Negara-negara dunia ketiga masih tetap menjadi "objek" globalisasi karena minimnya kemampuan mereka untuk melawan, baik melalui perlawanan ekonomi atau budaya. Sebuah sistem dunia yang lebih adil menjadi faktor yang menentukan penyelesaian permasalahan-permasalahan kompleks di negara-negara dunia ketiga. Tetapi, jelas tidak mungkin negara-negara industri maju mau memikul sebagian beban negara-negara dunia ketiga.

Apapun yang terjadi, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini harus diselesaikan sendiri. Dan dalam konteks upaya untuk mengembangkan tradisi membaca di Indonesia, perlu keterlibatan banyak elemen bangsa untuk menyelesaikannya. Meskipun, tantangan dan halangan yang akan dihadapi begitu banyak. Kita pun tidak bisa berharap kepada negara atau pemerintah yang saat ini tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalahnya.

Maka, upaya untuk mengembangkan tradisi membaca harus dimulai dari diri kita sendiri atau di lingkungan yang paling kecil, yakni keluarga. Mengingat, lingkungan di luar keluarga, termasuk sekolah, tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan tradisi itu. Yang harus dilakukan, *pertama*, membangun kesadaran dalam diri orang tua mengenai pentingnya membaca buku bagi dirinya dan juga anak-anak mereka. *Kedua*, menempatkan buku sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. *Ketiga*, membudayakan hadiah berupa buku pada momen-momen tertentu, dan *keempat*, agar seorang anak bisa mengembangkan kebiasan membaca, maka para orang tua harus terlebih dahulu mengembangkan kebiasaan itu dalam diri mereka.

Sebuah tradisi tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, perlu waktu bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun untuk membangunnya. Membangun tradisi membaca di Indonesia juga perlu waktu yang cukup lama dan untuk saat ini, mungkin kita belum bisa melihat hasil yang kita harapkan.❐

Catatan Akhir:

[1] *Kompas*, 6 Desember 2000.
[2] *Kompas*, 16 Januari 2001.
[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*
[5] *Kompas*, 1 Maret 1997.
[6] Lihat Veven Sp. Wardhana, *Budaya Massa dan Pergeseran Masyarakat* (Yogyakarta: Bentang, 1995) hal. 50.
[7] *Ibid.*, hal. 50.
[8] Richard Falk, *Predatory Globalization: A Critique* (Cambridge: Polity Press, 1999), hal. 32.
[9] *Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke-45, Agustus 1996.
[10] *Ibid.*
[11] *Kompas*, 15 Januari 1997.
[12] *Kompas*, 1 Maret 1998.
[13] Lihat Heru Nugroho, "Anak Sebagai Target Perluasan Pasar Internasionalisasi 'Children's Culture' di Indonesia", *Prisma* No. 2, Februari 1997, hal. 33.
[14] *Ibid.*, hal.34.
[15] *Ibid.*, hal. 35.

[16] Veven Sp. Wardhana, *Kapitalisme Televisi dan Strategi Budaya Massa* (Yogyakarta: Bentang, 1997), hal. 102.
[17] *Kompas*, 21 Mei 1999.
[18] Lihat Heru Nugroho, *op. cit.*, hal. 37.
[19] *Kompas*, 30 Januari 1999.
[20] Richard Falk, *op. cit.*, hal. 69.
[21] *Kompas*, 12 Juli 1999.
[22] *Ibid.*
[23] Fidel Castro Ruz, "Globalisasi, Neoliberal, dan Dunia Ketiga", dalam Jurnal *Kiri*, Volume 3, Oktober 2000, hal. 130–131.
[24] *Kompas*, 14 September 1998.
[25] *Kompas*, 13 Oktober 1998.
[26] *Kompas*, 23 November 1998.
[27] Lihat Daniel Dhakidae, *Tahun Buku Kanisius* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 190.
[28] Daniel Dhakidae, *op. cit.*, hal. 191.
[29] Lihat Heru Nugroho, *op. cit.*, hal. 33.
[30] Lihat Fidel Castro Ruz, *op. cit.*, hal. 132.
[31] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 455.
[32] *Basis*, Nomor 03-04,Tahun ke-48, Maret–April 1999.
[33] Lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.
[34] *Kompas*, 6 Desember 1999.
[35] Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Yogyakarta: LP3ES, 1995), hal. 49.
[36] Francis Bacon, *The Private World of the Man with a Book* (New York: Henry Holt and Company Inc., 1986), hal. 85.
[37] *Ibid.*
[38] Lihat Todaro, *op. cit.*, hal. 456.
[39] *Ibid.*
[40] *Media Indonesia*,13 Februari 2000.
[41] Lihat Daniel Dhakidae, *op.cit.*, hal. 187.
[42] *Dhaniel Dhakidae, Ekonomi Politik Indistri Buku di Indonesia*, dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
[43] *Kompas*, 22 Desember 2000.
[44] *Kompas*, 16 Januari 2001.
[45] *Kompas*, 14 April 1999.

Tim Riset Redaksi

Penulis:
Mahfud Ikhwan, Ririn Tri Astuti, Nurul Aini, Maesita Maharani, Veronica Kusuma.

Reporter:
Darmanto, Anas Abd. Ghofur, Budi Baskoro, Ferdinandus Setu, Iqbal Aji, zainal Afif, Tarli, Fauzul M., Thowaf Z., Indradya S.P., Nanik Supriyati, Imam Karyadi, Riky Ferdianto, Abd. Rouf, Asriah Nurdini, Ita Mutiara Dewi, Raisnain Ali.

Wajah Perbukuan Yogyakarta

Antara Pencerahan dan Keserakahan

GRAFIS: BASKORO

Saat dunia perbukuan tanah air masih saja lesu darah, Yogyakarta tiba-tiba menyentak. Buku-buku dengan wacana alternatif dan *cover* yang khas segera saja menyesaki rak-rak toko buku. Dimulai awal dekade lalu, penerbitan Yogya mencapai titik kulminasi pada dua tahun terakhir. Apakah ini mula dari sebuah pencerahan? Atau, justru kekuatan kapitalisme tengah membayang?

Buku, konon, adalah bagian terpenting dari tradisi tulis suatu bangsa. Sementara, tradisi tulis selalu berkait erat dengan tingkat keterdidikan, intelektualitas. Saat Yogya mengemuka dengan buku-bukunya, tentu orang akan segera ingat dengan sesuatu yang sangat identik dengannya: pendidikan. Sebagaimana sebutan lain, pendidikan telah menjadi semacam nama panjang yang harus diucap lengkap tiap Yogya disebut. Ia begitu mewarnai dinamika kota ini, baik sosial, kultural, bahkan ekonomi.

Pendidikan Yogya punya sejarah panjang. Di kota ini, pada awal abad ke-20, muncul lembaga-lembaga pendidikan terkemuka seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Semangat awal abad 20 itu masih terjaga hingga kini. Terbukti, Yogya menjelma jadi kota "sejuta" sekolah. Data statistik tahun 1999 menunjukkan, wilayah sekecil Yogya (3.185,8 km^2) memiliki paling tidak 1.812 Taman Kanak-Kanak, 2.439 Sekolah Dasar, 538 setingkat SLTP, 227 SMU, 144 SMK, 48 sekolah khusus, 43 setingkat D-3, 17 universitas, 7 institut, dan 79 akademi. Sementara itu, sembilan dari 10 orang Yogya yang berusia di atas 10 tahun mengecap bangku sekolah. Tingkat keterdidikan pun tinggi, 24,78% orang Yogya lulus sarjana muda dan sarjana.

Di samping itu, pendidikan juga punya andil yang tak kecil bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Yogya, terutama sektor informal. Belum lagi kemunculan bisnis-bisnis pendidikan seperti Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK), akademi-akademi, bimbingan belajar, dan kursus-kursus. Yang juga cukup penting adalah sektor industri buku. Selain Shopping Centre (121 kios), Terban (30 kios), serta beberapa lokasi lain, Yogya telah disesaki oleh sekira 27 toko buku besar yang beberapa diantaranya bisa mengeruk laba perhari dalam hitungan juta.

Lalu, apakah pendidikan memiliki korelasi signifikan dengan bergairahnya iklim perbukuan Yogya belakangan ini? Bisa jadi. Intelektualitas sering diidentikkan dengan buku. Ada 5.208 sekolah dan 148 perguruan tinggi di propinsi kecil ini. Tak kurang 2,25 juta penduduk Yogya, plus para pendatang, adalah orang "sekolahan". Tak bisa dipungkiri, merekalah konsumen buku paling potensial. Meski di kota ini ada 166 perpustakaan (tak termasuk perpustakaan pribadi dan sekolah menengah ke bawah), jumlah itu tak cukup kuat menahan "komunitas intelektual" ini untuk tidak membeli buku.

Tapi benarkah asumsi itu? Untuk memberi gambaran lengkap dan jelas, perjalanan sejarah industri buku di daerah istimewa ini harus juga dibaca. Merunut sejarah perbukuan Yogya sama sulitnya dengan merunut sejarah perbukuan nasional. Referensi yang paling memungkinkan dari sejarah penerbitan Indonesia mungkin hanya buku *Indonesian Publishing* karya Edward Kimman. Itu pun mencakup waktu yang sangat terbatas dan melingkupi wilayah yang terlalu umum, dimana penerbitan Yogya tak cukup mendapat tempat.

Sedikit informasi yang bisa dijadikan pijakan dapat ditemukan di buku *Catalogus dari Buku-Buku jang Diterbitkan di Indonesia* susunan G. Ockeloen. Buku terbitan Gedung Buku Nasional, Bandung, tahun 1953, 1954, dan 1955 itu terdiri dari tiga jilid. Informasi yang dihimpun Ockeloen cukup memberi gambaran apa dan bagaimana buku-buku yang terbit di Indonesia pada rentang waktu 1949—1954.

Kala itu, penerbitan buku dapat dikatakan cukup merata. Di balik dominasi penerbit-penerbit Jakarta, Bandung, Medan, ataupun Surabaya, kota-kota seperti Tegal, Pekalongan, Temanggung, Cilacap, Purwokerto, Kediri, Malang, Madiun, Jember, Bangil, dan beberapa kota lain di Jawa ternyata turut unjuk gigi. Belum lagi kota-kota luar Jawa, terutama di Sumatra Utara dan Sumatra Barat

Namun di sisi lain, katalog ini menghadirkan satu keterkejutan saat didapati bahwa penerbitan Yogya masa itu termasuk deretan kedua. Yogya "hanya" memiliki 22 penerbit. Jumlah ini memang lebih banyak dari Semarang dan Solo, masing-masing dengan 13 dan 8 penerbitan. Tapi, Yogya sangat jauh bila dibandingkan dengan Jakarta (124 penerbit), Bandung (32 penerbit), Medan (38 penerbit), atau Surabaya (30 penerbit).

Dari 22 penerbit itu pun dapat dicatat bahwa buku-buku terbitan Yogya masih sangat berorientasi pada hal-hal praktis. Buku-buku Sekolah Rakyat (SR), di samping buku-buku agama—yang juga praktis, tampak menonjol. Sekarang, dari 22 nama, tinggal Kanisius yang masih eksis.

Jika merujuk apa yang dicatat Selo Soemardjan dalam buku *Perubahan Masyarakat Yogya*, sedikitnya penerbitan di Yogya waktu itu tentu menghadirkan kontradiksi sekaligus ironi. Pertama, secara politis, sekira tahun 1949, Yogya berada pada fase paling vital dalam sejarahnya sebagai kota perjuangan, yakni sebagai ibukota negara. Kedua, dan lebih penting, saat itu, Yogya sedang memapankan identitasnya sebagai kota pendidikan—dengan didirikannya Universitas Gadjah Mada.

Namun, bila menengok latar belakang para penerbit itu, maka hal ini dapat dimaklumi. Kanisius misalnya. Ia lahir dari sebuah yayasan pendidikan berlabel keagamaan. Penerbit yang berdiri tahun 1922 ini merupakan hasil pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Pendidikan Guru rintisan Pater van Lith tahun 1908. Untuk memenuhi kebutuhan pengajarannya, Kanisius mencetak buku-buku sendiri. Hal ini pula yang terjadi pada Muhammadiyah, yang memiliki percetakan tahun 1915. Keduanya tak lepas dari misi dakwah yang diemban.

IKA R. HILAL/BAL.

Dalam rentang waktu cukup lama, apa yang terjadi di awal dekade 1950-an itu tampaknya tak mengalami perbaikan. Sampai awal 90-an, industri buku Yogya tetap masih jadi nomor dua. Penerbit-penerbit Yogya yang terkemuka dan produktif seperti Liberty, Andi Offset, Yudhistira, dan beberapa yang lain masih saja mewarisi "tradisi" penerbit-penerbit pendahulunya: semangat praktis dan pragmatis.

Tradisi "buku sekolahan" ini jadi *established* karena latar belakang para penerbit tersebut. Andi Offset, Liberty, BIGRAF Publishing, Lukman Offset, atau CV Karyono yang besar pada rentang 70-an sampai akhir 80-an adalah penerbit-penerbit yang memulai usahanya dari percetakan. Andi Offset yang berdiri tahun 1985 adalah jelmaan dari percetakan Andi Offset yang memulai usahanya tahun 1979. Begitu pula Liberty, BIGRAF, dan kawan-kawan.

Yang mungkin berbeda, kalau penerbit pasca-kemerdekaan menerbitkan buku-buku teks sekolah menengah ke bawah, maka semenjak dekade 70-an, orientasi mulai bergeser. Penerbit-penerbit Yogya mengalihkan sasaran bidiknya pada konsumen mahasiswa yang taat dan patuh menuruti anjuran dosen. Liberty
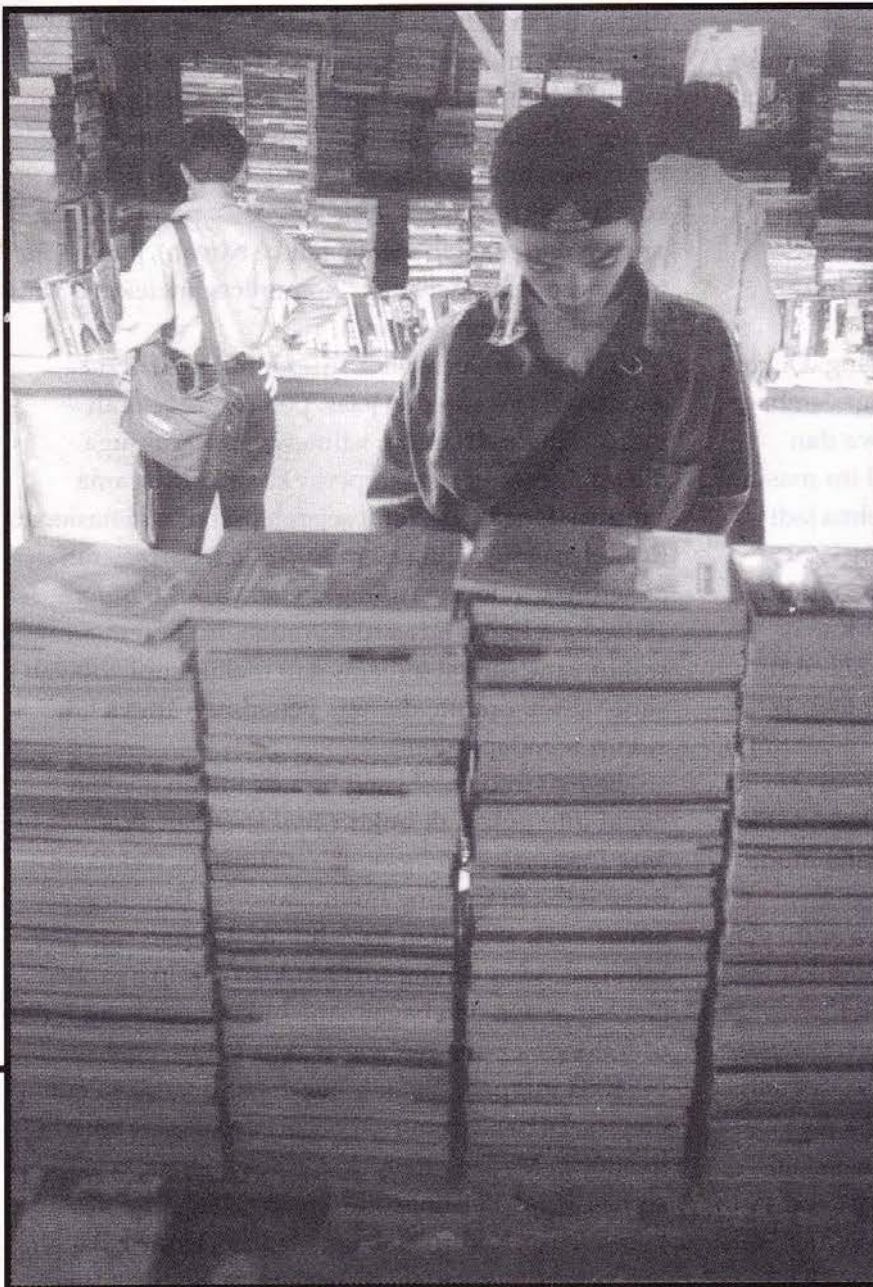
dan Andi Offset paling menonjol.

Penerbit-penerbit ini bersaing dengan penerbit-penerbit universitas yang juga sedang mengalami masa-masa suburnya. Penerbit seperti Gadjah Mada University Press, STIE YKPN Press, Duta Wacana Press, dan sejenisnya banyak mencetak buku-buku laris. *Saking* larisnya, buku-buku terbitan universitas ini dibajak habis-habisan. Wilayah buku akademis ini memang selalu ramai konsumen. Dan tentu saja, sangat menjanjikan profit.

Tapi apa yang salah dengan menerbitkan buku-buku kuliah? Bukankah memang buku jenis ini yang dibutuhkan mahasiswa? Dengan keras, Mansour Fakih, direktur INSIST (Institute of Social Transformation) menyatakan bahwa buku teks tak memperkaya wawasan apa-apa. "Buku seperti itu (buku teks—*Red.*) tak mendidik mahasiswa berpikir kritis," tegas doktor lulusan University of Massachusets, AS ini.

Karena itu, bisa dimaklumi jika Mansour masygul. "Aneh sekali.Yogya ini barometernya universitas di Indonesia. Namun kalau kita masuk ke toko buku, yang kita temui hanya bahan bacaan yang tak memperkaya wawasan," ucapnya dengan agak getir. "Sampai akhir kekuasaan Orde Baru, rak-rak buku masih dipenuhi oleh buku-buku teks kuliah," jelasnya.

Namun dengan segera ia mafhum. "Waktu itu (sebelum Mei '98—*Red.*), orang bisa dihukum delapan tahun hanya karena membawa (bukan menerbitkan!) buku yang dianggap membahayakan 'stabilitas nasional'. Jadi dapat kita bayangkan, jika buku-buku yang punya daya kritik diharamkan, ya... seperti itulah buku-buku yang terpajang di toko dan kios-kios," papar pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 47 tahun lalu itu. "Buat apa ambil risiko. *Toh,* justru buku teks yang laku," tambahnya sedikit nyinyir.

Memasuki kurun 90-an, perbukuan Yogya memunculkan gejala menarik. Ada kegairahan baru muncul. Penerbit dengan jalur alternatif, baik isi maupun tampilan, mulai bermunculan. Ada usaha untuk merintis wacana-wacana kritis. Mereka tak turut larut berebut rejeki di lapisan buku akademik, sekalipun tak benar-benar bisa lepas. Yang lebih penting, motor dari iklim ini kebanyakan adalah orang-orang baru dalam dunia penerbitan Yogya.

Kebangkitan perbukuan Yogya, kalau bisa dibilang begitu, tidak bisa dinilai sebagai heroisme. Geliat seperti ini merupakan hal biasa dan tak istimewa. Dominasi buku-buku akademik, yang melulu teks dan cenderung doktriner, dirasa menjenuhkan. Para motor penerbitan Yogya awal 90-an—yang notabene para pelaku pasar tulen—mengendus peluang itu.

Adalah Mas'ud (44), seorang "penjual" buku, yang kemudian menjadi aktor utama lakon ini. Tahun 1993 ia mendirikan penerbit yang kini telah mengemuka: Pustaka Pelajar. Dialah orang pertama yang mencoba menembus kebekuan konvensi buku di Yogya. Latar belakang sebagai pedagang membuatnya memiliki "ideologi pasar" yang kental. Modal pasar inilah yang membuat Pustaka Pelajar menelikung jalan: menerbitkan wacana-wacana alternatif.

"Sekalipun masih takut-takut, kami coba menerbitkan buku-buku yang agak *nyerempet-nyerempet,*" tutur Khamdani, editor tetap Pustaka Pelajar. Sebagai contoh, ia menyebut buku *Gerundelan Orang Republik* karya Y.B. Mangunwijaya—yang pernah ditolak oleh

Ada usaha untuk merintis wacana-wacana kritis. Mereka tak turut larut berebut rejeki di lapisan buku akademik, sekalipun tak benar-benar bisa lepas. Yang lebih penting, motor dari iklim ini kebanyakan adalah orang-orang baru dalam dunia penerbitan Yogya.

Gramedia, Jakarta, karena kekritisannya. Langkah Pustaka Pelajar yang juga menonjol adalah menerbitkan skripsi dan tesis. "Ini kami lakukan untuk memunculkan penulis-penulis muda," aku Khamdani.

Apa yang dilakukan oleh Pustaka Pelajar secara tak langsung memberi rangsangan bagi kegairahan penerbitan Yogya. Tak lama kemudian muncul Bentang (Yayasan Bentang Budaya). Mereka menggebrak dengan lebih dahsyat—terutama dalam mengemas produk terbitan mereka.

Sekalipun sempat jatuh bangun di awal perintisannya, penerbit yang dikomandoi Buldanul Khuri ini membentang dengan *cover* yang khas: eksotik, aneh, dan kadang absurd. Sesuai dengan nama yayasan yang menaunginya, Bentang kemudian mengidentifikasikan diri dengan wacana sastra-budaya. Wacana yang juga masih sedikit sekali disentuh, terutama oleh penerbit Yogya.

Lahirnya Bentang lalu membawa tren baru dalam percaturan perbukuan Yogya. Tren itu tak lain adalah "membelotnya" para aktivis perbukuan dari para penerbit tempat mereka bekerja. Dengan semangat kemandiriannya, para aktivis yang terdiri dari para editor buku, penerjemah, desainer *cover*, atau *lay-outer* berinisiatif mendirikan penerbitan sendiri. Ada desas-desus yang mengatakan, pembelotan ini marak karena ketidakcocokan antara para aktivis dengan pemilik penerbitan, baik dalam hal visi-misi maupun pemerataan kesejahteraan.

"Aneh sekali. Yogya ini barometernya universitas di Indonesia. Namun kalau kita masuk ke toko buku, yang kita temui hanya bahan bacaan yang tak memperkaya wawasan,"

Masuk pasca-Mei 1998, maraknya penerbitan Yogya tampaknya tak lagi bisa dikatakan sebagai sebuah kealternatifan. Jalur minoritas ini secara meyakinkan kemudian mulai jadi perkasa. Daftar penerbit baru dengan berbagai latar belakang kelembagaan dan kepentingan makin panjang saja.

Kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogya pada tahun 1996, menemukan kembali momentumnya pada masa reformasi ini. Mereka mulai mengambil terobosan dengan menerbitkan buku. INSIST Press (divisi penerbitan dari INSIST), Yayasan Untuk Indonesia (YUI), Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), atau Lembaga Pemberdayaan Rakyat (Lapera) adalah sebagian contoh.

Bersamaan dengan itu, metamorfosis gerakan mahasiswa ke bisnis perbukuan juga tak kalah membuat hiruk-pikuk. Penerbitan jenis ini muncul dan dilahirkan oleh para aktivis gerakan kemahasiswaan yang memanfaatkan kendornya kontrol penguasa. Mereka memandang, buku adalah media yang paling efektif guna mengukuhkan keberadaan dan "melanjutkan perjuangan".

IKA R. HILAL

MANSOUR FAKIH

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) mungkin bisa disebut pertama. Penerbit yang lahir pada tahun 1994 ini dibidani oleh para aktivis gerakan dan pers mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain itu, patut disebut pula Yayasan Litera Indonesia, Penerbit Jendela, dan Yayasan Aksara Indonesia, yang lahir lebih belakangan.

Mungkin perlu dicatat bahwa pada penerbitan jenis ini muatan ideologis tampak lebih kental (walaupun sangat tipis batasnya dengan tujuan-tujuan ekonomis). LKIS pernah mencatat sukses dengan buku *Kiri Islam*. Sementara, Yayasan Aksara Indonesia dengan terang-terangan mengusung sastra kiri dalam ideologi penerbitannya. Maka, muncullah Maxim Gorky, antologi *Dongeng dari Sayap Kiri*, Franz Kafka, dan beberapa yang lain dalam koleksi kepustakaan mereka. Atau, Yayasan Litera dengan buku-buku Che Guevara-nya dan Penerbit Jendela yang menerbitkan cerpen Jean Paul

IKA R. HILAL
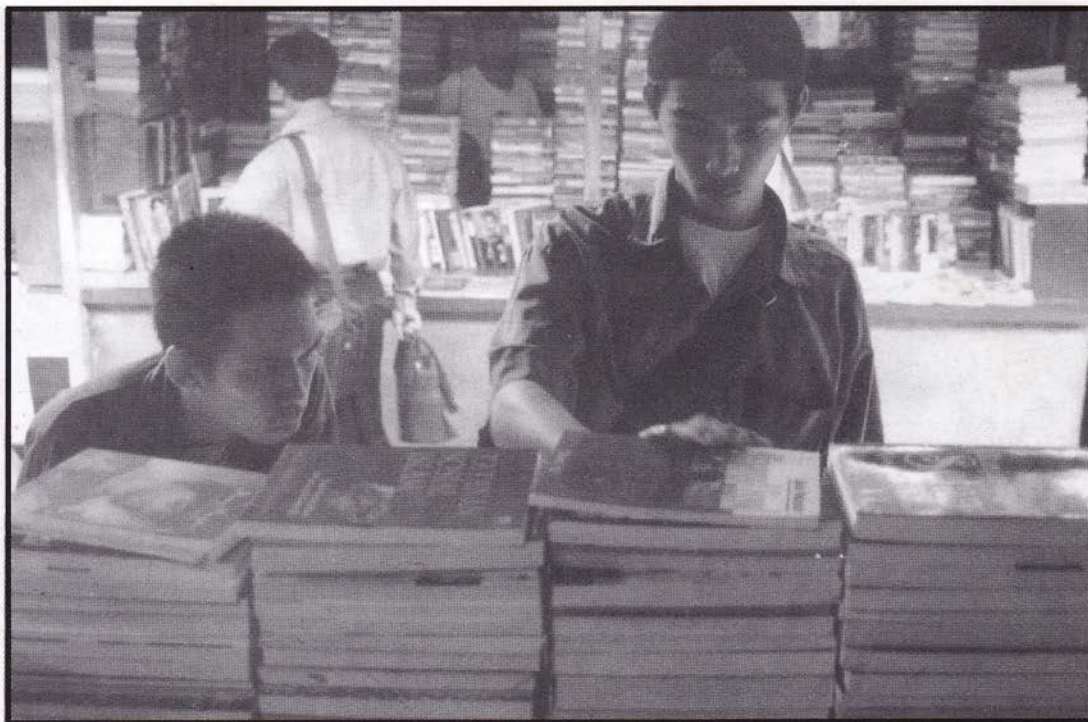
Sartre.

Di sisi lain, hadirnya *funding* ditengah kegairahan ini juga semakin memupuksuburkan dunia perbukuan Yogya. Diawali oleh Proyek Adikarya IKAPI yang bekerja sama dengan Ford Foundation di akhir tahun 1998, *funding-funding* lain kemudian menyerbu Indonesia. (Baca: Siapa Curang, Dia Dapat!). Dan, penerbit Yogya pun menyambut dengan riang gembira.

Apapun latar belakangnya, yang jelas Yogya pasca-Mei '98 telah jadi tanah subur bagi bisnis perbukuan. Data terakhir yang didapat BALAIRUNG menyebutkan, di Yogya yang kecil ini telah hidup tak kurang dari 114 penerbitan, dan 80 diantaranya aktif. Sebuah lonjakan yang menakjubkan!

Dengan begitu banyak penerbit, belum lagi yang tumbuh di luar Yogya, tak bisa dihindari, pasar buku Yogya menjadi sangat riuh. Persaingan tentu saja tak terbatas pada pemasaran, tapi juga tampilan, kemasan, sampai pada pilihan tema dan wacana.

Karena pemerintah tak lagi terlalu *cawe-cawe*, peluang penerbit untuk menyodori pembaca dengan isu-isu variatif lebih terbuka. Buku yang dulu tak mungkin beredar bebas, kini hadir di kios kaki lima dengan tampilan heroik (baca: luks), *cover* mencolok, dibarengi promosi gencar, bedah buku meriah, dan resensi yang menarik.

Apakah ini berarti angin surga bagi misi mulia yang diemban buku untuk "memanusiakan manusia" telah berhembus? Sebuah perintisan menuju peradaban dan dunia baru sudah dimulai di Yogya? Tunggu dulu! "Secara kuantitas, dan dilihat dari segi kebebasan berpikir memang ya. Namun, secara *content*, mutu, saya tak berani mengatakannya," tutur Indra Ismawan (26), seorang penulis buku sekaligus pemilik sebuah penerbitan yang berada di bilangan Sagan Yogyakarta, dengan kalem.

Apa yang diutarakan oleh Indra bukannya tanpa alasan. Yogya tidaklah baik-baik saja. Jangan disangka wajah industri buku Kota Gudeg ini semulus *cover-cover* buku karya Buldanul Khuri, Si Ong H.W., ataupun Siti Soendari (para desainer sampul terkemuka Yogya). Ia menyimpan ceruk-meruk gelap dibalik tampilannya yang eksotik dan menghanyutkan. Ada ketidakberesan yang [bisa dikatakan] cukup akut.

Mau bukti? Kita bisa *mengupili* koreng perbukuan Yogya dari hal yang sudah lebih dulu tercium baunya: terjemahan. Berulang kali, buku-buku terjemahan terbitan Yogya terbantai di kolom resensi beberapa media ibukota! Contoh mutakhir adalah kasus terbantainya novel *L'immortalite* karya Milan Kundera. Menurut Nirwan Dewanto, yang banyak menerjemahkan esei Milan Kundera pada awal karir penulisannya, buku sastra kelas kakap ini diterjemahkan secara serampangan. (Baca: "Terjemahan: Proyek Pembodohan Massal")

Borok lain yang tak kalah berkerak adalah pada

IKAR HILAL/BAL

proses perburuan naskah oleh penerbit. Sekalipun tak semuanya jelek, banyak sekali buku yang didapat dari proses perburuan yang alakadarnya. Sebuah penerbit bisa mencetak buku dari kumpulan makalah dan kliping tulisan seorang tokoh yang bisa dijual namanya.

Atau, bisa pula penerbit memfotokopi beberapa halaman artikel di internet, untuk kemudian "diedit" habis-habisan dan diterbitkan. Buku *Sosialisme Religius: Sebuah Jalan Keempat* yang dengan gagah mengusung nama besar Mohammad Hatta, misalnya, adalah tampilan keren dari kumpulan makalah sebuah pesantren kilat. Pada tataran ini, ideologi pasar terasa sangat kental dalam menentukan sebuah buku terbit atau tidak.

Hal ini kemudian diperparah oleh *editing* yang pas-pasan. Sebagian besar editor Yogya bukan layaknya editor buku pada umumnya: penguasaan bahasa di atas rata-rata, wawasan luas, dan seorang penulis ulung. Jangan membayangkan menemukan editor-editor setangguh H.B Jassin, Sapardi Djoko Damono, Muchtar Lubis, atau Ajip Rosidi di dunia penerbitan Yogya!

Rekruitmen untuk jadi editor pun sangat tidak menjamin mutu editor. "Karena saya sering ke Shopping Centre dan kenal baik dengan Pak Mas'ud, akhirnya saya diajak gabung dengan Pustaka Pelajar," tutur Eko Prasetyo mengisahkan bagaimana ia jadi editor di Pustaka Pelajar.

Kasus Eko adalah gejala umum di penerbitan Yogya, terutama yang muncul di dekade '90-an. Para editor Yogya lahir dari tradisi pertemanan! Hal ini menjadi semakin terbuka, lantaran penerbit-penerbit itu lahir dan dikelola juga dengan semangat pertemanan. Selain Pustaka Pelajar, Media Pressindo, Aksara Indonesia, Jendela, dan Qalam juga dibesarkan dengan manajemen pertemanan.

Guna menutupi belang, sekaligus agar tetap bisa bersaing di pasar, penerbit kemudian berlomba-lomba mempermak buku terbitannya dengan segala macam cara. Ia bisa disiasati dengan mengemas produk semenawan mungkin: *cover* yang mencolok (ini merupakan ciri khas buku-buku Yogya) dan judul buku yang menggiurkan. Atau, bisa pula dengan mempermewah tampilan buku. Cara ini dilakukan dengan memperbesar ukuran huruf. Cara ini berimbas pada menebalnya halaman buku yang pada akhirnya mengatrol harga buku.

Cara lain? Penerbit "memperalat" nama tokoh terkemuka untuk mengangkat buku pas-pasan yang diterbitkannya. Misalnya, dengan menempelkan nama si tokoh di kata pengantar. Ini pun kadang-kadang

asal comot dari makalah-makalah atau artikel di koran, dan tak perlu harus berkaitan dengan isi buku. Hal seperti ini pernah menimpa Jalaluddin Rakhmat. Ceramah agamawan kondang asal Bandung ini pernah dicomot jadi kata pengantar sebuah buku, tanpa lebih dulu diberi tahu. Cara lainnya bisa ditempuh dengan mengundang si tokoh untuk menjadi pembedah buku, tentu saja diikuti dengan publikasi yang gencar.

Yang lebih seru, persaingan tak terjadi di pasar semata. Para penerbit bahkan sudah saling jegal saat bersaing memperebutkan naskah atau pun editor [*freelance*]. Yang paling ramai tentu saja pada terjemahan buku-buku langka. Jika di pasar ditemukan beberapa buku dengan tema, judul, atau isi yang relatif sama—bahkan ada yang seratus persen persis, maka hal ini merupakan buah dari persaingan yang kadang-kadang tidak sehat. Ini bisa dilihat dari buku-buku Marx yang muncul dengan berbagai judul, Che Guevara dengan berbagai tampilan, atau Nietzsche dengan berbagai terbitan.

Sementara itu, untuk menyiasati "kekalahan" (atau bisa pula untuk menjaga kelangsungan hidupnya), penerbit-penerbit Yogya dua tahun terakhir ini punya jurus baru: *ngempeng* ke *funding*! Rupanya, Proyek Adikarya IKAPI yang bekerja sama dengan The Ford Foundation itu benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh penerbit-penerbit Yogya.

Yang agak keterlaluan, buku-buku ber-*funding*—yang kemudian lebih banyak seperti beras JPS, baik dari segi urgensi maupun mutu—harganya tetap selangit! Ada memang pembelaan dari penerbit–penerbit ber-*funding* bahwa harga buku-buku mereka sebenarnya sudah ditekan sekian persen. Tapi perbandingan besarnya kucuran dana *funding* dengan biaya terbit membuat apologi ini sulit diterima. Tak bisa dihindari, sekali lagi muncul prasangka, demi periuk nasinya, penerbit mengorbankan konsumen sebagai tumbal. (Baca: Siapa Curang, Dia Dapat!)

Sampai di sini, bisa dirasa, industri buku menjadi lahan basah bagi yang ingin cepat kaya. Tapi, sungguh ironis ketika di balik itu semua justru ditemukan kesenjangan ekonomi pada orang-orang yang mengais rejeki di ladang subur ini. Maraknya penerbitan, *booming* penjualan buku, atau mudahnya merayu *funding* tak cukup membawa pencerahan nasib bagi sangat banyak orang yang berada di balik dunia perbukuan.

Bayangan kapitalisme yang melembayung di jagad perbukuan Yogya tampak dari malasnya para pemilik modal penerbitan berbagi rejeki dengan para buruh percetakan, tukang *bending*, tukang klem, penunggu kios buku, pegawai toko, bahkan sampai ke penulis buku, penerjemah, *lay outer*, desainer *cover*, dan sederet orang-orang "rendahan" lainnya. Pembaca bisa dengan heroik membaca Marx tanpa tahu bahwa ia membeli buku itu dari penunggu kios buku yang digaji Rp60000 sebulan. Atau, kita tak pernah berpikir bahwa pencetakan buku itu bisa jadi telah menelan korban sepotong jempol dari buruh percetakan yang seringkali harus kerja *overtime* (lembur) guna memenuhi tuntutan terbit di momen yang pas.

Penulis, misalnya, tak kalah mengharukan nasibnya. Mereka, yang oleh undang-undang hanya diberi porsi 10% dari harga buku, masih harus menghadapi penghargaan rendah dari penerbit. Dengan dalih proyek idealis, isu tidak menjual, atau bahkan modal kecil, penulis harus siap menerima angka 7,5% sampai 5% sebagai royalti. Itu pun sering kali tak sesuai kesepakatan. Bahkan, penulis harus

Yang lebih seru, persaingan tak terjadi di pasar semata. Para penerbit bahkan sudah saling jegal saat bersaing memperebutkan naskah atau pun editor [*freelance*].

siap menerima kenyataan bukunya dibajak atau dicetak ulang penerbit tanpa diberi tahu terlebih dahulu.(Baca: Penulis Dalam Tirani Penerbitan)

Pelit dan agak *ogah*-nya penerbit Yogya untuk sedikit lebih menggembungkan anggaran penerbitannya juga terlihat dari bagaimana mereka melangkahi *copyright*, terutama pada penerbitan karya terjemahan. Dengan alasan mengurusnya sulit, memakan waktu dan biaya, serta tidak efektif, penerbit sering kali menempuh jalan pintas. Mereka semena-mena menerbitkan buku terjemahan tanpa konfirmasi dan pemberitahuan kepada penulis atau penerbit aslinya.

Setelah remuk di tingkatan produksi, monopoli di tingkatan distribusi juga berperan besar dalam memperpuruk wajah perbukuan Yogya. Dengan jumlah penerbit yang begitu tinggi, distributor buku Yogya ternyata hanya di bawah dua komando: C.V. Adipura dan Social Agency. Ini diperparah dengan kehadiran setan-setan pembajakan yang mengacak-acak pasar di level bawah. Kehadiran pembajak-pembajak buku ini semakin memperuncing dan memperparah perseteruan terselubung antarpedagang rendahan di kios-kios di Shopping Centre. Padahal, pedagang-pedagang kecil itu harus pula menghadapi ekspansi modal dari toko-toko buku besar yang terus menjamur. Ini belum ditambah dengan sindikat pencurian buku atau mafia distributor gelap. Gejala ini semakin menegaskan bahwa wajah perbukuan Yogya tak semulus *cover-cover* buku yang diterbitkannya.

Separah itukah ketidakberesan yang melanda perbukuan Yogya? Ya, ini memang sulit diterima. Tapi, begitulah kenyataannya. Sederet kontradiksi dan ironi sekali lagi harus kita temui. Kawah candradimuka pendidikan seperti Yogya ternyata tak menjamin bisa memunculkan Gatotkaca-Gatokaca yang cakap. Ini bisa dibuktikan dengan mutu buku yang compang-camping. Padahal, buku—sekali lagi—adalah anak paling sah dari intelektualitas. Mungkinkah ini hasil dari didikan buku-buku teks Yogya selama ini? Sulit sekali menarik kesimpulan.

Yang jelas, bertumpuknya sarjana di Yogya tak cukup memberi harapan. CitraYogya yang konon tukang becaknya pun bisa ber-*cas-cis-cus* dengan para turis bule, ternyata harus dimentahkan oleh kasus penerjemahan buku yang amburadul. Menumpuknya buku terjemahan sekaligus sepinya karya penulis Yogya juga memberi bukti lain: kecerdasan mahasiswa Yogya menonjol hanya saat demontrasi!

Penghargaan terhadap intelektualitas pun rendah. Penulis tak mendapat tempat yang cukup layak. Penerjemah juga dibayar murah. Tak pelak, para penerjemah menggarap terjemahannya pun alakadarnya.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana orang Yogya berusaha. Entah karena "jiwa kemahasiswaannya" atau memang sektor manufaktur yang tak cukup kuat, perbukuan Yogya secara nyaman berjalan dengan manajemen kekeluargaannya. Ini bukan tuduhan, tapi diakui sendiri oleh beberapa kalangan penerbit buku Yogya. Hasilnya, para pekerja pun digaji secara "kekeluargaan".

Manajemen keluarga memang akan membuat pemilik modal dan pekerja menjadi lebih dekat dan merasa senasib. "Ya, sekalipun mungkin gaji secara kekeluargaan, tapi di sisi lain, kita saling tolong-menolong, *kok*. Mereka (para pekerja—*Red*) susah, ya kita bantu, *dong*." kata seorang pemilik penerbitan yang jujur mengakui

Setelah remuk di tingkatan produksi, monopoli di tingkatan distribusi juga berperan besar dalam memperpuruk wajah perbukuan Yogya.

penerbitannya menggunakan manajemen keluarga.

Yang aneh, reaksi konsumen, terutama Yogya yang dikenal kritis, ternyata adem-ayem saja. Beberapa fakta membuktikan bahwa konsumen tak cukup tanggap, bahkan terkesan cuek. Para peresensi, yang seharusnya jadi mata pertama yang menilai baik-buruknya sebuah buku ternyata tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Terhadap buku terjemahan, misalnya. Tidak jelas, apa karena tidak cukup tahu terjemahan yang baik, atau memang menjaga diri untuk tidak menilai negatif—karena ia membutuhkan imbalan buku dari sang penerbit, suara para peresensi itu cenderung aneh. Tak jarang, mereka memuji-muji buku yang di kemudian hari justru terbukti bopeng. Jika terus dibiarkan, hal ini tentu akan mempengaruhi opini publik pembaca awam.

BASKORO

Di kalangan pembaca tampaknya terjadi semacam euforia. Kehadiran Marx, Che Guevara, Nietzsche, Milan Kundera, Franz Kafka, Maxim Gorky, dan sederet nama lain membuat pembaca—yang telah lama menantikan nama-nama itu—terlalu berbunga-bunga. Mereka kemudian jadi lupa bahwa mereka harus melakukan kritik. Lebih parah, mereka tak cukup peka dengan *mark-up* habis-habisan yang dilakukan penerbit, baik itu buku ber-*funding* yang tetap mahal, buku-buku yang diterbitkan sekenanya, dst.

Fenomena ini memang tidak menggembirakan. Tetapi bukan berarti kita terus-terusan menyesalinya atau bahkan menghujatnya. Perlu dicatat apa yang ditegaskan oleh Mansour Fakih dan Indra Ismawan. "Lama-kelamaan, konsumen akan bisa menyeleksi sendiri buku-buku yang layak dibaca." Atau, kita bisa menghibur diri dengan pernyataan optimistik yang pernah diutarakan oleh Ignas Kleden. "Seburuk apapun sebuah buku, ia tetap berguna bagi pembacanya, paling tidak untuk merangsang semangat bahwa suatu saat si pembaca akan membuat yang lebih baik," kata Ignas.

Seburuk apapun buku-buku Yogya, tentu tak mungkin diingkari bahwa membludaknya penerbitan Yogya telah menyumbangkan apa yang sebelumnya sulit didapat dari dunia perbukuan kita: berpikir kritis! Ribuan buku yang membanjir, apapun wujudnya, telah memberi pilihan wacana yang beragam. Transfer pengetahuan pun terbuka lebar. Di lain pihak, industri buku telah berjasa besar dalam meningkatkan angka pendapatan daerah, memberi lahan untuk menyambung hidup bagi sekian jiwa, menjadi lompatan strategis bagi idealisme gerakan mahasiswa, dan tentunya, semakin mengentalkan identitas Yogya dengan industri pendidikannya.

Dengan semangat "membuat yang lebih baik" ini, anggap saja buku-buku terbitan Yogya sebagai langkah awal dari sebuah usaha menuju kemajuan. Bukankah kesuksesan *Renaissance*, Restorasi Meiji, Revolusi Cina, dan sekian cerita keberhasilan yang lain juga dimulai oleh buku-buku buruknya? Semoga.❐

Buku Paling Tua

Teks tertulis paling tua yang diketahui adalah ungkapan piktografis (dengan gambar) pidato Sumeria. Ditulis dengan bahasa Aramaic, buku ini disebut Papyri Samaria, ditemukan 13,7 kilometer sebelah utara Jeriko, berasal dari tahun 375 - 335 Sebelum Masehi.

Tipologi Penerbit Buku Yogyakarta

1920

Infografis: Kinoy/Balairung

Latar belakang:
Program penerbitan dari lembaga pendidikan dan keagamaan

Tahun perintisan:
1920-an

Pelaku pasar:
Lembaga pendidikan dan keagamaan

Karakteristik buku:
Buku-buku teks sekolah dan tuntunan agama praktis

Penerbit:
Kanisius, Muhammadiyah, Penjiaran Islam, Badan Oesaha Pendidikan Kristen Indonesia (BOPKRI), dll.

1970

Latar belakang:
Berangkat dari usaha percetakan

Tahun perintisan:
1970-an

Pelaku pasar:
Pengusaha percetakan

Karakteristik buku:
Buku-buku pelajaran, teks kuliah, buku-buku praktis

Penerbit:
Liberty, Andi Offset, Lukman Offset, BIGRAF, C.V. Karyono, dll..

Latar belakang: Penerbitan Universitas

Tahun perintisan: 1970

Pelaku pasar:
Lembaga-lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi

Karakteristik buku:
Buku-buku kuliah dan hasil penelitian ilmiah

Penerbit:
Gama Press, Duta Wacana Press, BPFE, UII Press, dll.

Kolase Memanjang

1990

Latar belakang:
Dimulai dari berdagang buku

Tahun perintisan: 1990

Pelaku pasar: Pengusaha/pedagang buku

Karakteristik buku:
Mengusung wacana-wacana alternatif dan buku-buku agama populer

Penerbit:
Pustaka Pelajar, Bintang Cemerlang, Fajar Pustaka, Mitra Pustaka, dll.

1994

Latar belakang:
"Pembelotan" para aktivis perbukuan dari penerbit induk

Tahun perintisan:
1994

Pelaku pasar:
Para editor, desainer sampul, lay-outer, atau penerjemah

Karakteristik buku:
Wacana alternatif makin beragam, dengan dominasi sastra-budaya dan sosial

Penerbit:
Bentang Budaya, Qalam, Aksara Indonesia, dll.

1996

Latar belakang:
Pengembangan kegiatan LSM ke Penerbitan

Tahun perintisan: 1996

Pelaku pasar: LSM/NGO

Karakteristik buku:
Hasil riset, buku-buku terjemahan, wacana politik berkembang pesat

Penerbit:
IDEA, Lapera, Insist Press, YUI, LP3Y, LSPPA, dll.

1998

Latar belakang:
Metamorfosis gerakan mahasiswa

Tahun perintisan:
1998

Pelaku pasar:
Para aktivis dan mantan aktivis mahasiswa

Karakteristik buku:
Buku-buku politik, terjemahan naskah-naskah klasik, wacana kiri merebak

Penerbit:
LKIS, Litera, Media Pressindo, Jendela, Melibas, dll.

SALING SIKUT DEMI PERUT?

FENDI,FELIX
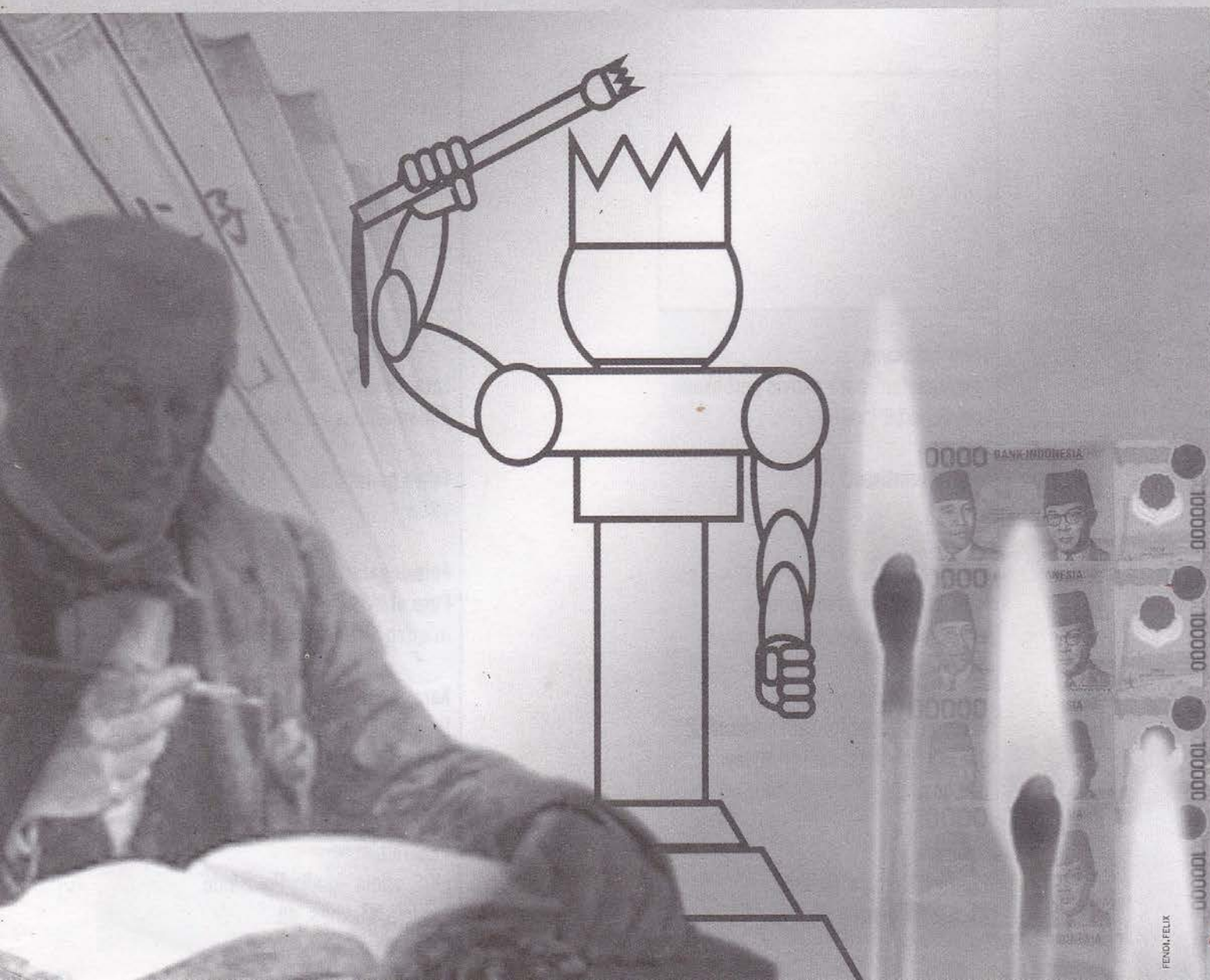
Siapa sangka, pusaran uang penerbitan buku sangat menggiurkan. Tak heran jika muncul banyak penerbit baru. Ternyata, ini berimbas pada persaingan dan penekanan biaya produksi yang memalukan.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penerbit buku yang ada di Yogyakarta telah mencapai angka 114. Peningkatan ini dibarengi pula dengan jumlah buku yang diproduksi. Tak kurang 504.000 eksemplar buku diterbitkan dalam satu bulannya.

Buku memang media yang representatif untuk mengemukakan ide secara utuh dan mendalam. "Buku menawarkan ruang yang lebih leluasa dibanding dengan menulis di koran," tegas Abdul Munir Mulkhan, penulis buku *bestseller, Syekh Siti Jenar,* yang sekaligus dosen Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta.

Tak salah jika dalam "Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik tentang Kebudayaan" (1999), Ignas Kleden bertutur, "Buku adalah fenomena kebudayaan. Dia tidak hanya merupakan produk kebudayaan, tapi juga memproduksi budaya. Karenanya, konsekuensi bagi mereka yang mengelola buku haruslah memiliki wawasan kebudayaan yang memadai."

Namun, yang dibayangkan Ignas Kleden tak seutuhnya benar. Karena yang terjadi di Yogya, banyak penerbit yang hanya mengais untung semata. Ketika pasar sedang dilanda "demam" buku, maka gejala ini langsung ditangkap oleh penerbit. "Kalau masyarakat sedang suka sama Nietzsche, ya... kenapa tidak?" tegas Mas'oed (57), pemilik Pustaka Pelajar.

Sebut saja Media Pressindo. Buku *Supersemar Kudeta Soeharto* yang ditulis oleh Centre of Information Analysis (CIA) yang mereka terbitkan Oktober 1998, habis terjual dalam waktu tiga minggu. Buku setebal 169 halaman dengan ukuran 12,5 X 16 cm ini dijual di pasaran seharga Rp4.750.

Dengan strategi harga semurah itu, mereka mampu mengembalikan modal 3,5 juta rupiah yang dikumpulkan. Karena buku itu, dalam tujuh bulan pertama, mereka sudah bisa membeli mesin cetak sendiri. Bagi Indra Ismawan (26), penulis dan salah seorang pendiri Media Pressindo, *booming* itu terjadi bertepatan dengan bergulirnya reformasi 1998.

Tidak hanya Media Pressindo, Penerbit Jendela pun mengalami hal yang sama. Buku pertama mereka, *Shaping Globalization,* juga habis terjual dalam dua minggu. Dengan cerita yang tak jauh berbeda, uang patungan yang mereka kumpulkan sejak September 1999 lalu, telah mampu menghasilkan 15 judul buku.

Bagi Ruslani, Pemimpin Penerbit Qalam, keputusannya untuk menjadi penerbit buku lebih karena ingin memberdayakan teman-teman satu kosnya. "Daripada tak ada pekerjaan, lebih baik disatukan. Teman saya yang mendesain sampul, sedang saya menerjemahkan dan mengedit," tutur penerjemah buku *Selamat Jalan Tuan Presiden* milik Gabriel Garcia Marquez.

Alasan lebih sederhana diungkapkan oleh A.S. Muzakky (29). "Mudah kok jadi penerbit itu, modal saya cuma dua: bisa *ngedit* dan komputer," aku jujur pemilik penerbit Zaituna yang khusus menerbitkan karya-karya Emha Ainun Nadjib. Zakky, panggilan akrabnya, bahkan lebih jauh mengakui, alasan jadi penerbit karena susah cari *kerjaan* lain.

Dengan modal naskah dari Cak Nun yang sudah beken itu, penerbit yang berdiri pada November 1996 ini, praktis selalu untung. Karena, orang sudah kenal siapa Emha. Jadi, kesempatan laku/akan jauh lebih besar.

Bagi penerbit-penerbit lain yang tidak memiliki stok

IKA R. HILAL

naskah seperti mereka, Yogyakarta tetap menjadi sumur ide dan gagasan. "Tidak susah kalau mencari penulis di Yogya. Dosen-dosen, profesor, mahasiswa, atau juga aktivis LSM 'kan banyak," kata Mas'oed.

Dalam menjalankan proses redaksionalnya, penerbit juga tak memakan waktu lama. Institute of Social Transformation (Insist) Yogyakarta misalnya. Untuk satu judul buku, dari perburuan naskah hingga siap didistribusikan, mereka hanya memerlukan 1,5 bulan.

Apalagi kalau naskah yang diterbitkan adalah kumpulan artikel. Penerbit cukup memungut beberapa tulisan yang dimuat di media massa, lalu mengedit dan membubuhi kata pengantar dari orang terkenal. Dengan begitu, mereka bisa *nyambi* menyiapkan naskah yang lain.

Cara ini tidak saja meringankan, tapi juga menghemat biaya produksi yang harus dikeluarkan. Seharusnya, penerbit wajib membayar royalti sebesar 10—12,5% dari harga jual buku pada penulis. Dengan menerbitkan kumpulan artikel, mereka punya alasan untuk tidak membayar royalti.

Tapi bagaimana kalau ketahuan dan dituntut? "Ya, bilang saja, sebenarnya sudah coba dihubungi, tapi susah!" celetuk Eko Prasetyo, Redaktur Pelaksana Jurnal Wacana. Atau yang lebih untung, menerbitkan naskah penulis yang sudah meninggal lebih dari 50 tahun. Dengan begitu, selamatlah uang sebesar 10% itu, "Aman sudah!" tambah mantan editor Pustaka Pelajar ini dengan santai.

Nah, untuk biaya terjemahan, penerbit mematok harga berkisar Rp6.000—Rp7.000 tiap halamannya. Penerbit Pustaka Pelajar hanya perlu membayar Rp1.254.000 pada Eko Prasetyo, ketika menerjemahkan buku Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni* setebal 209 halaman. Pustaka Pelajar sendiri akan meneguk keuntungan sebesar Rp996.000.

Tapi keuntungan akan berkurang jika buku itu hasil kerja penulis. Contohnya, buku laris, *Mencapai Pernikahan Barakah*, yang ditulis M. Fauzil Adhim. Buku ini dijual dengan harga Rp16.500 dan dicetak 1500 eksemplar (edisi pertama). Untuk itu, Mitra Pustaka merogoh kocek sejumlah Rp2.475.000 untuk membayar royalti.

Padahal, buku itu laris manis bak kacang goreng. Maret 2001, karya mahasiswa Psikologi UGM ini telah naik cetak untuk kesepuluh kalinya. Berarti, penerbit yang masih satu pemilik dengan Pustaka Pelajar ini harus mengeluarkan Rp24.750.000. Wow, bukan jumlah yang sedikit!

Tingginya persaingan antarpenerbit akhirnya membuat mereka harus saling sikut. Mulai dari rebutan naskah, kualitas cetakan, sampai desain sampul. Kompetisi ini semakin diperpanas dengan posisi editor yang kadang bertindak sebagai broker naskah. "Editor kadang sudah bermain seperti mafia. *Sampeyan* berani berapa?" ungkap seorang

editor yang tidak mau disebut namanya.

Solusinya, penerbit menggunakan (naskah) terjemahan untuk menggelembungkan pundi keuangannya. Akibatnya, sudah pasti naskah-naskah terjemahan akan jadi rebutan. Bisa saja naskah yang akan diterbitkan sudah beredar di dua penerbit yang berbeda.

Kalau Anda datang ke Gramedia, Social Agency, atau ke Shopping, Anda akan dapati berderet buku dengan judul yang sama. Uniknya, mereka dihadirkan oleh dua penerbit bahkan lebih. Tak heran, Che Guevara, Karl Marx, atau Tan Malaka hadir dengan tampilan wajah yang berbeda pula.

Buku *Student Hidjoe* contohnya. Buah karya Mas Marco Kartodikromo ini diterbitkan oleh Bentang Budaya dan Yayasan Aksara Indonesia. Perbedaan keduanya hanyalah fisik dan harga. Ukuran kertas yang digunakan Bentang lebih besar (1/2 folio) dibanding Aksara. Dan yang jelas, sampul yang digunakan juga berlainan.

Penampilan buku kemudian menjadi jurus jitu menarik pembeli. Orang seringkali *kepincut* dengan kualitas cetak, tata letak, dan juga sampul yang bagus. Maka, di sanalah penerbit bisa bermain harga. Dengan ukuran yang lebih besar, *Student Hidjoe* milik Bentang Budaya dijual dengan harga Rp17.500, sedang Aksara Rp16.500.

Selain itu, persaingan menguasai pasar demi terdistribusikannya buku, juga makin marak. Herannya, jumlah penerbit bukan malah menyusut. Yang terjadi di lapangan, makin banyak saja penerbit-penerbit baru bermunculan.

Bahkan, penerbit yang mengaku "bermodal dengkul" pun tetap yakin bisa bersaing di pasar. Contohnya, Penerbit Litera yang berdiri pada akhir 1998. "Jangankan kantor, sampai sekarang pun komputer kami belum punya!" ujar Ajianto Dwi Nugroho (25), pendiri Litera yang mantan aktivis gerakan mahasiswa ini.

Selain berpikir soal strategi pasar menghadapi persaingan yang ketat ini, para penerbit juga harus memikirkan nasib para "bawahan". Mereka harus membayar karyawan, editor, desainer sampul, *lay outer*, belum lagi buruh-buruh percetakan—untuk yang sudah punya mesin cetak sendiri. Pastinya, akan rugi besar kalau buku yang mereka terbitkan tak laku keras. Karena, modal tak cepat kembali.

Perhitungan keuntungan yang akan didapat penerbit buku paling cuma 10-15% dari harga jual buku. Itu setelah dipotong 10-12,5% untuk membayar royalti penulis, sekitar 15% untuk ongkos cetak, dan yang paling besar adalah alokasi distribusi yang mencapai 65%.

Pantas saja jika mereka juga mulai memangkas biaya produksi di sana-sini, termasuk menekan gaji editor buku. Gaji seorang editor buku rata-rata berkisar Rp500.000 sebulan. Tak jarang ia harus mengedit beragam tema yang bisa jadi tak ia kuasai.

Apa yang didapat memang tak sebanding dengan kerja yang kadang sampai 24 jam. "Malah kita harus jadi bemper menghadapi *complain* dari penulis atau klien yang lain," kenang Subandi yang mengaku hanya digaji Rp175.000 ketika menjadi sekretaris Buldan di Bentang Budaya.

Ini belum menyangkut nasib orang-orang yang berkutat di dunia percetakan buku. Sejak meningkatnya order, mereka harus bekerja hingga jam 12 malam. "Uang lembur kita dihitung Rp2.500 perjamnya," kata Warsip, buruh percetakan Bintang Cemerlang.

Pekerjaan mereka akan makin berat jika ada kesalahan cetak. Mereka harus merobek, menyusun, dan mengelem ulang, "Ya, manual

"Kalau masyarakat sedang suka sama Nietzsche, ya... kenapa tidak?" tegas Mas'oed (57), pemilik Pustaka Pelajar.

IKA R. HILAL
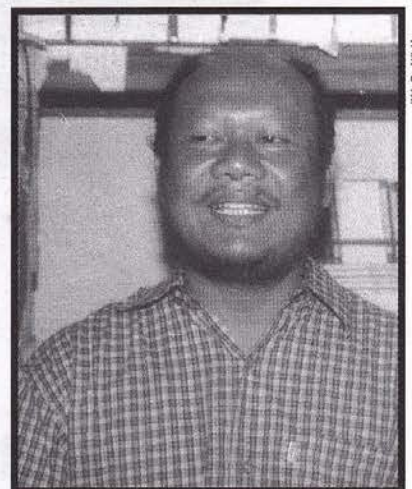
mBak," sambung Sulis, buruh bagian pemotongan kertas. Gaji mereka tetap saja tak beranjak dari Rp300.000 sebulannya.

Siasat lain yang digunakan penerbit adalah subsidi silang. Menurut Mas'oed, selain menerbitkan buku yang *booming* karena bertepatan dengan momen tertentu, mereka juga menerbitkan buku yang lakunya jangka panjang. Menjelang tahun ajaran baru, penerbit ramai-ramai mengeluarkan buku-buku teks. Menjelang Ramadhan atau Natal, buku-buku rohani juga menjadi gerbang untuk pemasukan keuntungan.

Banyak macam siasat yang dipakai para penerbit. Tapi, rincian biaya produksinya tak jauh berbeda. Hitungan itu sangat tergantung pada jenis kertas, kualitas cetakan, hingga fluktuasi dolar.

Perkiraannya seperti ini. Harga kertas yang digunakan untuk mencetak isi 2000 eksemplar buku rata-rata dibeli seharga Rp800.000. Sedang, kertas sampul kira-kira Rp240.000. Dan untuk keperluan pemfilman naskah dikeluarkan Rp122.500, ini sudah termasuk film untuk isi. Supaya sampul mengkilat, maka diberi *UV coating* yang menghabiskan ongkos sekitar Rp120.000.

Biaya cetak isi yang dikenakan pada buku setebal 292 halaman seperti buku *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah,* bernilai Rp2.920.000 (Rp5 x 292 halaman x 2000 eks). Sedangkan, cetak sampul biasanya memerlukan Rp350 perlembarnya, harga seluruhnya mencapai Rp700.000. Jadi, total jenderal pengeluaran untuk satu buku sebesar Rp4.902.500.

Buku yang ditulis oleh mahasiswa Psikologi UGM ini kemudian dijual Mitra Pustaka seharga Rp16.500. Kalau dihitung bersih, maka akan terkumpul uang sejumlah Rp16.500 x 2.000 eks, yaitu Rp33.000.000. Setelah dihitung-hitung, ongkos cetaknya hanya sekitar 15% dari pendapatan.

Tapi, jangan *keburu* senang dulu! Sebabnya, 65% dari total penjualan harus dialokasikan ke distribusi, yakni sebesar Rp21.450.000. Mereka masih harus membayar Fauzil Adhim sebesar Rp3.300.000. Walau sudah disunat di sana-sini, Mitra Pustaka tetap bisa meraup laba bersih sebesar Rp8.250.000.

Andai saja tiga judul buku bisa diterbitkan dalam sebulan, maka duit sebesar Rp24.750.000 (Rp8.250.000 x 3) akan dikantongi penerbit. Nominal ini akan semakin menggiurkan kalau satu atau dua hak cipta naskah sudah jadi milik publik (berarti tak perlu membayar royalti). Duit Rp3.000.000—Rp6.000.000 dipastikan akan mendekam di kantong penerbit.

Kini keuntungan penerbit makin menggunung dengan dikucurkannya dana hibah program Adikarya IKAPI. Pusaran uang yang melingkupi buku akan semakin deras ketika buku masuk dalam jalur distribusi.❐

FAKTOR PENEKAN	LANGKAH YANG DITEMPUH	AKIBATNYA
Kebutuhan ruang untuk berkarya Kebutuhan mempublikasikan karya	Membayar di muka keperluan penulis buku	Asal karyanya dipublikasikan, penulis tidak terlalu menuntut ketika haknya dilanggar
Fluktuasi dollar yang akan berpengaruh pada harga kertas	Terbit dengan sampul lunak Cetak dengan kertas buram (CD)	Kualitas cetak berkurang
Pasar yang tidak stabil Monopoli oleh distributor buku	Menaikkan harga jual buku Membuka jalur distribusi sendiri (toko buku) Membuka agen distribusi di luar kota	Harga buku membubung Lebih menekan biaya produksi
Penerbit dibebani oleh gaji editor, penerjemah, karyawan, dsb. Persaingan antar penerbit	Memperbanyak jumlah produksi buku Subsidi silang dari tema-tema yang diterbitkan Menerbitkan kumpulan tulisan Menerbitkan naskah terjemahan Menerbitkan naskah yang sudah jadi milik dunia Saling berebut naskah	Rebutan naskah terbit dengan tema yang sama Royalti penulis terabaikan Tidak membayar *copyright* Perang cover Perang harga Berlomba dengan tampilan yang luks Membubuhi kata pengantar dari orang terkenal Kesejahteraan karyawan terabaikan

INFOGRAFIS: L. RIZKI "KINOY" RAHMAN

KONGLOMERASI DI RANAH DISTRIBUSI

Pesatnya jumlah penerbit tak dibarengi naiknya jumlah distributor. Akibatnya, penerbit kelabakan memasarkan buku. Tak heran, dua distributor kuat mudah menyetir penerbit. Ujung-ujungnya, buku semakin mahal.